

# P Majalah Parlementaria



| Edisi : 144 TH. XLVI. 2016 |



## KALEIDOSKOP 2016 SATU TAHUN KINERJA DPR RI

**GRATIS**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

PARLEMEN BERPERAN  
PENTING DALAM  
PEMBERANTASAN  
KORUPSI

8

DELEGASI INDONESIA  
PERJUANGKAN  
PERLINDUNGAN  
MIGRANT WORKERS

76



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, SH, M. Hum  
(Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si,  
(Deputi Persidangan)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Suratna, M.Si  
(Karo Pemberitaan Parlemen)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Dra. Tri Hastuti  
(Kasubag Media Cetak)  
Insan Abdirrohman, SH  
(Kasubag Media Sosial)  
Ahyar Tibi, SH  
(Kasubag Analis Media)

**REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,  
Muhammad Husen, Sofyan Efendi,  
Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,  
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra Sasmita, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**  
Rizka Arinindyah, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,  
Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

**ADMINISTRASI FOTO**  
Hasri Mentari

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350  
Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.  
www.dpr.go.id/berita



## **PENERBITAN & DISTRIBUSI**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP  
(Kabag Penerbitan)

**WK. PIMPINAN PENERBITAN**  
Mediantoro, SE  
(Kasubag Produksi),  
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si  
(Kasubag Distribusi)

**STAF PRODUKSI**  
Eko Murdiyanto, Farid, SE, Barliansyah, Fathurahman,  
Mujiono, Abdul Kahfi, S.Kom

**SIRKULASI**  
Siti Rondiyah, Oji, Remon, Ifan, Arif, Lamin  
Telp: 021-571 5697, Fax: 021-571 5421  
Email: penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNGJAWAB BAGIAN PENERBITAN**

## **PENGANTAR REDAKSI**

Edisi 144 Parlementaria kali ini diisi dengan kaleidoskop perjalanan lembaga perwakilan ini sepanjang tahun 2016. Sebagaimana edisi sebelumnya, edisi di penghujung tahun ini merupakan rangkuman perjalanan kegiatan Dewan khususnya ketiga fungsi dan tugas pokok di bidang legislasi, pengawasan, anggaran dan diplomasi parlemen.

Banyak capaian yang dihasilkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, meski demikian masyarakat berharap kinerja Dewan bisa ditingkatkan lagi. Secara umum perjalanan sejarah Dewan pada tahun 2016 diwarnai berbagai dinamika politik, diantaranya konsolidasi di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI Ade Komarudin. Akom sapaan akrab Ade Komarudin berhasil meningkatkan kinerja Dewan dengan capaian hingga Oktober lalu menyelesaikan pembahasan 17 RUU.

Pada tanggal 30 November 2016, kepemimpinan DPR RI dibawah Ade Komarudin digantikan oleh Setya Novanto- sesama kader Golkar. Penggantian Ketua DPR RI ini disepakati seluruh fraksi DPR RI dan sejak tanggal 30 Nopember itulah secara resmi Ketua Umum Partai Golkar ini menjabat kembali sebagai Ketua DPR RI.

Kita apresiasi penggantian ini sebab merupakan wilayah dan kedaulatan partai Golkar dan patut diapresiasi pula tekad Setya Novanto untuk terus meningkatkan kinerja Dewan hingga akhir periode 2019 mendatang.

Pada edisi akhir tahun ini pula, diharapkan bisa menjadi sarana evaluasi, koreksi dan introspeksi apa saja yang sudah dikerjakan. Keberhasilan kita tingkatkan dan segala kekurangan dipakai untuk evaluasi dan memperbaiki kinerja ke depan. Masih banyak tantangan dan tugas-tugas kenegaraan pada tahun 2017 yang membutuhkan partisipasi para Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya.

Selamat tinggal Tahun 2016 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2017.

**IKUTI AKUN MEDIA SOSIAL DPR RI**  
**Follow, Like & Subscribe**

Facebook: DPR RI | Twitter: @DPR\_RI | Instagram: @DPR\_RI | YouTube: DPR RI

medsos@dpr.go.id | www.dpr.go.id



# DAFTAR ISI

<b>ASPIRASI</b> .....	<b>4</b>
<b>KALEIDOSKOP 2016</b>	
Refleksi Tingkatkan Kinerja Dewan .....	<b>6</b>
Parlemen Berperan Penting Dalam Pemberantasan Korupsi .....	<b>8</b>
Terus Bekerja Untuk Kepentingan Rakyat .....	<b>9</b>
Berjuang Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat .....	<b>10</b>
DPR RI dan Pemerintah Sepakat untuk Penghematan Anggaran .....	<b>11</b>
Komisi I Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan .....	<b>12</b>
Komisi II DPR RI DPR Terus Tingkatkan Kualitas Pemilu .....	<b>14</b>
“Perjuangan Komisi III dalam Bidang Hukum” .....	<b>16</b>
DPR RI Lahirkan UU untuk Lindungi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam .....	<b>18</b>
Dari Keamanan Bagasi Hingga Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung ....	<b>20</b>
Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Menguntungkan Indonesia .....	<b>22</b>
Kaleidoskop Komisi VII DPR RI .....	<b>24</b>
Komisi VIII Selesaikan Beberapa RUU Terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Rakyat .....	<b>26</b>
Ratifikasi MLC, Perkuat Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Pelaut .....	<b>28</b>
Dorong Empat Sukses Asian Games XVIII .....	<b>30</b>
Rotasi Pimpinan Komisi XI .....	<b>32</b>
BKSAP DPR RI Perjuangkan Sejumlah Resolusi dan Rekomendasi .....	<b>34</b>
DPR RI Hasilkan 17 Rancangan Undang-Undang .....	<b>36</b>
BURT DPR RI Dorong Wujudkan Parlemen <i>Modern</i> Berwibawa dan Kredibel .....	<b>38</b>
MKD Terus Akomodatif Merespon Aduan .....	<b>40</b>
Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan .....	<b>42</b>
Jadikan UU Paten Sebagai Payung Hukum .....	<b>44</b>
Setjen DPR RI Raih WTP 8 Kali Berturut-turut .....	<b>46</b>
Peran Aktif BKD Sebagai Sistem Pendukung Baru Kinerja Dewan .....	<b>48</b>
Raih WTP Kembali, Irtama Terus Tingkatkan Pengawasan Intern .....	<b>50</b>
<b>SUMBANG SARAN</b>	
Menuju Parlemen <i>Modern</i> dalam Demokrasi Indonesia .....	<b>52</b>
<b>SETAHUN DPR RI</b>	
“Menutup 2016, Menyongsong 2017” .....	<b>56</b>
<b>FOTO BERITA</b> .....	<b>60</b>
<b>PROFIL</b>	
Wakil Ketua Komisi VI DR RI, Inas Nasrullah Zubir Politisi Religius dan Sederhana .....	<b>72</b>
<b>LIPUTAN KHUSUS</b>	
Sidang APA Kamboja Delegasi Indonesia Perjuangkan Perlindungan <i>Migrant Workers</i> .....	<b>76</b>
<b>POJOK PARLE</b> .....	<b>78</b>



**6 KALEIDOSKOP 2016**



**63 FOTO BERITA**



**76 LIPUTAN KHUSUS**



**72 PROFIL**

## Laporan Diskriminasi Hukum

Kami kuasa hukum dari Robinson Pangemanan, warga yang mendapat amanat dari masyarakat Desa Sungai Muntik, Kecamatan Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau untuk membersihkan alur Sungai Muntik karena adanya limbah kayu gelondongan tumpahan muatan kapal yang telah mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Bahwa sebelum melakukan pembersihan klien kami telah meminta ijin kepada PT Erna Djulawati Plymil selaku pemegang ijin logpond agar aktivitas perusahaan tersebut tidak terganggu.

Bahwa pada saat dilakukan pembersihan ternyata klien kami menemukan ribuan batang kayu gelondongan dari berbagai ukuran dan jenis yang diperkirakan telah berada di dasar sungai lebih dari 10 tahun.

Bahwa setelah kejadian tersebut, klien kami

ditangkap dan digelandang ke Polres Sanggau dan melalui proses peradilan divonis hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kami selaku kuasa hukum merasa keberatan atas tuduhan pencurian, karena semua proses pembersihan alur sungai tersebut sudah dilakukan melalui perijinan dan penemuan kayu gelondongan tersebut adalah wilayah ijin Logpond PT Erna Djulawati Plymil.

Kami saat ini sedang melakukan upaya PK dan memohon penyelesaian agar Komisi III DPR RI membantu permasalahan tersebut sesuai ketentuan berlaku dan melakukan tindakan yang dipandang perlu demi keadilan.

**Basoki Salego**  
Sanggau, Kalimantan Barat

## Hentikan Rekayasa Kasus Petani

Kami menyampaikan bahwa berdasarkan surat laporan Polisi No.LP/240/VII/2015/RESPASBAR tanggal 28 Juli 2015 tentang Penahan Sdr. Sukaryanto terkait dugaan pencurian buah kelapa sawit Perkebunan M. Akam Ray.

Berdasarkan pengakuan Sdr. Sukaryanto bahwa buah kelapa sawit yang dipanen adalah milik pribadi, sesuai dengan pengakuan keterangan anggota pekerja perkebunan M.Akram Ray (pelapor) mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang di panen Sdr. Sukaryanto adalah yang ada di kebun milik pribadi.

Selanjutnya sesuai pengecekan batas lahan pada tanggal 28 September 2015 oleh anggota Polres Pasaman terbukti buah kelapa yang dipanen Sdr. Sukaryanto adalah berada di kebun milik pribadi.

Menurut kami pada tanggal 13-14 Oktober 2015 ketika membesuk menurut pengakuan Sdr. Sukaryanto mengalami pemaksaan dan penekanan supaya mau menandatangani surat yang isinya agar mengakui buah kelapa sawit yang dipanen Sdr. Sukaryanto berada dilahan M.Akram Ray.

Dari hal diatas menurut kami telah terjadi rekayasa dalam penahanan Sdr. Sukaryanto yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum.

Kami memohon agar Komisi III melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum.

**Kelompok Tani Sungai Paku Sumber Agung,  
Pasaman Barat, Sumatera barat**

## Perlindungan Hukum Perkara Penyaluran Raskin

Kami Ketua Forum Intelektual dan Kekeluargaan Masyarakat (FIKMAS) Desa Bancamara, yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI, perihal Permohonan Perlindungan Hukum terkait tidak adanya tindak lanjut laporan pelanggaran dalam penyaluran Raskin warga Desa Bancamara oleh Kejari Sumenep sejak 11 Juni 2015.

Menurut kami, tidak ditanganinya kasus tersebut karena ada persekongkolan antara Kejari Sumenep dan Kepala Desa Bancamara (terlapor) padahal telah ada bukti kuat pemalsuan tanda tangan warga. Pihak Kejari hanya menindaklanjuti kasus Raskin di Desa Guluk-Guluk yang menjadi target pemeriksaan dan mengabaikan kasus Raskin di Desa Bancamara.

Kami memohon melalui Komisi III DPR RI agar Kejagung RI memerintahkan Kejari Sumenep menindaklanjuti laporan tersebut.

**Abd. Gani**  
Sumenep, Jawa Timur



## Kriminalisasi Panitia Pembangunan Masjid

Suami saya adalah Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Aceh, berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No.602/PPB/307/TBJK/PPTKIII/2009 tgl. 16 Oktober 2009 dengan menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2009-2010 sebesar Rp 4 Miliar. Pembangunan tersebut terhenti pada 2010 karena kehabisan dana. BPK Aceh (setelah melakukan audit) merekomendasikan pembangunan tersebut dilanjutkan menggunakan dana hibah Tahun 2011.

Bahwa pada setiap proses pembangunan masjid tersebut selalu dilakukan rapat panitia bersama termasuk untuk perencanaan struktur pembangunan yang dikontraskan kepada PT. Citra Lestari Consultant sebesar Rp.797.000.000. Berdasarkan audit lapangan oleh ahli dari Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe dan Drs. Yan dari BPKP Provinsi Aceh menyatakan tidak ada kerugian negara dalam proses pembangunan tersebut yang menggunakan kontrak lumpsum, namun Penyidik Polres Aceh Tamiang tidak mempercayai audit tersebut yang justru meminta ahli konstruksi dan ahli material jalan dari USU yang melakukan penghitungan tanpa investigasi lapangan hanya berdasar pada surat edaran INKINDO tahun 2010 sebagai pedoman.

Atas keterangan 2 orang ahli dari USU tersebut, Penyidik Polres Aceh Tamiang telah menetapkan tersangka pada

saat berkasnya dilimpahkan ke Kejari Kuala Simpang Aceh (ketika tidak dapat dibuktikan dalam persidangan JPU merubah isi dakwaan dalam surat tuntutan) yang diduga direkayasa dan mengirimkan berkas serta barang bukti ke PN Tipikor Banda Aceh tanpa memperhatikan BAP. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara para saksi perkara pekerjaan pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Tamiang dengan perkara perencanaan struktur pembangunannya, sehingga dalam proses persidangan Majelis Hakim menggabungkan 2 (dua) perkara yakni perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna dan No.47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna yang merupakan pelanggaran KUHAP.

Kami mempertanyakan tindakan para penegak hukum tersebut yang telah mengenyampingkan Permenkeu tentang Hibah Daerah, tidak mempertanyakan pertanggungjawaban dari saksi kunci PA (Pengguna Anggaran), dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang tidak mengawasi adanya uang negara dalam rekening Panitia Pembangunan Masjid namun hanya mengawasi pelaksana pekerjaan pembangunan masjid bukan pengelola uang negara.

Kami memohon Komisi III DPR RI mengawal perkara tersebut di MA RI demi keadilan.

**Hj. Zuliani**

**Aceh Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam**

## Laporan Pelanggaran Pemilu Pilbup Lamongan

Saya adalah warga masyarakat Lamongan yang melaporkan dugaan adanya pelanggaran pidana Pemilu pada Pilbup Kabupaten Lamongan dengan cara melakukan rekayasa dalam penyelenggaraannya, dengan fakta sebagai berikut :

Calon perorangan a.n. Nursalim dan Edy Wijaya mendapat dukungan dari pemilih fiktif sebanyak 2.66% sesuai tanda tangan yang dikumpulkan di formulir B1 KWK padahal seharusnya untuk bisa mengikuti pilbup paling sedikit 6,5%.

Terdapat nama dan tanda tangan fiktif dalam formulir B1 KWK sebagai surat pernyataan dukungan perseorangan kepada Nursalim dan Edy Wijaya yang tersebar di 15 desa dengan jumlah suara + 3067 suara.

Adanya surat pernyataan dukungan calon perorangan a.n. Mujianto disertai nama dan tandatangan yang diduga palsu yang tersebar di 9 desa sebanyak + 9.211 suara.

Formulir B1 KWK tidak ditandatangani dan stempel oleh masing-masing kepala desa.

Formulir B1 KWK kepada kedua calon Bupati (Nursalim dan Mujianto) tidak dilampiri fotocopi Identitas Penduduk (KTP).

Ditemukannya formulir B1 KWK dengan nama-nama fiktif yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan Calon Bupati.

Penyerahan dokumen dukungan perseorangan tidak dilakukan secara transparan.

Anggota PPS, Anggota PPK, anggota KPU Lamongan, diduga memalsukan, menambah daftar dukungan terhadap kedua calon perseorangan dengan bukti adanya data rekapitulasi dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan.

**Sawong Aries Prabowo**

**Kediri, Jawa Timur**

Ketua DPR RI

# Refleksi Tingkatkan Kinerja Dewan

Tahun 2016 segera kita lewati dan akan memasuki tahun 2017. Sebagai tahun ketiga pengabdian DPR RI periode 2014-2019, kiprah Dewan sebagai lembaga tinggi negara cukup dinamis. Jika pada awal pengabdiannya sejak 20 Oktober 2014 hingga akhir tahun 2015, kinerjanya cukup rendah, lantaran kondisi politik saat itu dengan adanya dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih. Akibat kegaduhan politik itu berimbas kepada kinerja DPR RI yang hanya menghasilkan menyetujui tiga Rancangan Undang-undang. Mulai awal tahun 2016 kegiatan lembaga perwakilan ini kembali bergeliat.

Dinamika politik di tanah air demikian tinggi, pada 2016 tepatnya tanggal 11 Januari terjadi pergantian Ketua DPR RI dari Setya Novanto kepada Ade Komarudin. Seusai dilantik sebagai Ketua DPR RI baru saat itu, Akom- panggilan akrab Ade Komarudin mencanangkan perbaikan kinerja. Ia bertekad untuk segera membenahi fungsi Dewan. "Momentum ini menjadi refleksi untuk meningkatkan kembali kinerja Dewan," kata Akom usai pelantikan.

Perbaikan kinerja yang dilakukan di bidang legislasi mendapat perhatian khusus. Bahkan membuat perbandingan produktivitas DPR RI dari periode ke periode dalam capaian legislasi. Periode 1999 dinilainya paling produktif dan periode kepemimpinannya berharap tidak kalah produktif. Hingga Oktober dalam catatan Parlemen sekitar 17 RUU bisa diselesaikan.

## Kurangi Reses

Sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja legislasi, Akom mengatakan bahwa pimpinan dewan, bersama pimpinan fraksi dan BURT memutuskan untuk mengurangi masa reses Anggota DPR RI dari lima minggu menjadi 17 hari. Rapat pimpinan Fraksi pengganti Bamus sudah memutuskan beberapa hal salah satunya pengurangan masa reses, lima minggu menjadi 17 hari saja, hal ini demi memaksimalkan kinerja dewan, terutama dalam hal legislasi," jelas Akom.

Pengurangan masa reses menjadi 17 hari, jelas Akom, dengan uraian sembilan hari untuk kunjungan perseorangan ke daerah pemilihan



Ketua DPR RI, Ade Komarudin

masing-masing, lima hari untuk Kunker Komisi dan tiga hari untuk sosialisasi UU.

Dengan pengurangan ini, jelas Akom, agar target legislasi dewan yang sudah diputuskan dalam rapat Paripurna sebanyak 40 RUU dapat tercapai ditahun ini. "Kami ingin bekerja buat rakyat, kita ingin menghasilkan UU yang banyak ditahun ini, sebagaimana yang dimintakan oleh publik kepada DPR RI," tegas Akom.

Selain itu, ia juga membandingkan dengan kongres di negara lain, seperti Amerika yang jumlah hari kerjanya 120 hari, Australia 69 hari, dan Selandia Baru 67 hari, "Anggota DPR RI kita masa kerjanya 180 hari, jika dibanding dengan mereka kita tidak banyak kemajuan, rakyat membayar gajinya buat Anggota Dewan, maka kita harus bekerja maksimal buat rakyat," terang Akom.

## Pengangkatan Pejabat Publik

Pada acara HUT ke-71 DPR RI tanggal 29 Agustus 2016 lalu, patut dicatat ialah melalui Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/ 2016 M



Ade Komarudin bersama Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah usai dilantik sebagai Ketua DPR RI

berhasil menurunkan Ongkos Naik Haji tahun ini sebesar 132 USD.

Sedangkan terkait fungsi pengawasan, DPR RI juga telah memberikan persetujuan dan pertimbangan atas usulan pengangkatan pejabat publik, yaitu persetujuan terhadap Anggota Komisi Yudisial, Pimpinan KPK, Kapolri, dan pertimbangan terhadap Calon Duta Besar. Selain itu, DPR RI juga telah memilih dan menetapkan Calon Anggota Ombudsman RI, Calon Dewan Pengawas LPP RRI, Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Calon Anggota Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Calon Komisiner Komisi Penyiaran Indonesia.

Selain menata ruang kerja, perhatian Akom cukup besar kepada pers, dengan fasilitas yang cukup representatif. Hal itu ditunjukkan dengan diresmikannya ruang kerja para wartawan Media Center yang tidak kalah dengan fasilitas yang sama di lembaga negara lainnya. Ketua DPR RI Akom ingin menjadikan komplek perlemen ini sebagai salah satu tujuan wisata edukasi bagi masyarakat. Tujuannya antara lain agar masyarakat merasa turut memiliki, menikmati dan sekaligus menjaga keindahan dan kenyamanan lingkungan di Komplek Parlemen.

“Saya sebagai Pimpinan DPR RI ingin menjadikan komplek perlemen ini sebagai salah satu tujuan wisata edukasi bagi masyarakat. Sehingga hal ini dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memahami proses demokrasi dan pembuatan kebijakan negara oleh wakil rakyat,” ujarnya

Hingga akhir Oktober lalu, DPR RI telah mengesahkan 17 Rancangan Undang-Undang (RUU) sejak Januari hingga Oktober 2016. Dari 17 RUU, 9 adalah RUU prioritas 2016 dan 8 merupakan RUU Kumulatif Terbuka. Sementara 19 RUU dalam tahap pembicaraan tingkat satu, 3 RUU telah selesai harmonisasi di Baleg, 4 RUU dalam tahap harmonisasi dan 15 RUU dalam tahap penyusunan.

### Pergantian Ketua DPR RI

Dinamika politik di tanah air yang demikian tinggi berpengaruh pada



Setya Novanto menandatangani surat keputusan usai pelantikannya sebagai Ketua DPR RI disaksikan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah.

foto : Iwan Armanias/iw

dinamika partai politik yaitu dengan penggantian Ketua DPR RI dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto. Akom menyatakan ikhlas posisinya sebagai Ketua DPR RI diganti. Sebagai politisi, ia juga menyatakan taat hukum dan organisasi. Keikhlasannya melepas kursi Ketua DPR RI demi menjaga keutuhan NKRI.

Dalam jumpa pers yang didampingi Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah, Akom mengatakan, jabatan ini amanah yang suatu saat bisa diambil kembali. Semua Pimpinan DPR RI, ungkap Akom, sudah membaca dan menelaah surat usulan pergantian posisi Ketua DPR RI dari DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar.

Usai pelantikan tanggal 30 November 2016 lalu, Setya Novanto berjanji untuk meningkatkan kinerja parlemen. Ketua DPR RI ini berkesempatan menghadiri silaturahmi sekaligus peresmian pengurus Press Room atau wartawan koordinatoriat DPR RI pada Kamis (1/12/2016) di Ruang Media Center.

Kepada seluruh pengurus yang baru periode 2016-2018, Novanto mengucapkan selamat dan meminta agar apa yang sudah dilakukan dengan baik dapat diteruskan dan apa yang kurang bisa diperbaiki. Hal ini sebagai upaya DPR RI untuk mendekati diri dengan masyarakat dengan informasi yang cepat dan akurat,

“Sekaligus saya mohon doa restu, supaya pekerjaan-pekerjaan kami di DPR RI bisa berjalan lancar bekerja sama-sama demi kepentingan bangsa dan negara, dan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Novanto.

Hatur nuhun Kang Akom, Selamat bertugas Pak Novanto. ■



Ketua DPR RI, **Setya Novanto**

foto : Jaka/iw

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon

# Parlemen Berperan Penting dalam Pemberantasan Korupsi

**P**arlemen punya peran penting dalam upaya memberantas korupsi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, parlemen bisa membuat undang-undang antikorupsi, menyusun anggaran negara hingga melakukan pengawasan program pemerintah agar terhindar dari praktik-praktik korupsi.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dalam acara *The Middle East and North Africa-The Organization for Economic Co-operation and Development (MENA-OECD) Governance Forum* di Tunisia, Tunisia, beberapa waktu yang lalu mengatakan, pembangunan inklusif sesuai dengan tujuan OECD, tidak akan tercapai jika masih terjadi banyak korupsi.

“Sebagai wakil rakyat, parlemen harus ikut berperan dalam memberantas korupsi. Setidaknya ada hal yang bisa dilakukan parlemen untuk memerangi korupsi, yaitu melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” jelasnya.

Untuk dapat melakukan peranan ini dengan baik, kata Fadli, setiap anggota parlemen harus melakukan dua hal. Pertama, meningkatkan kapasitas pribadi. Setiap anggota parlemen harus memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang anti-korupsi. Kedua, memperkuat jaringan antar-parlemen dunia.

“Memerangi korupsi dapat lebih efektif jika anggota parlemen bergabung bersama sebagai sebuah kelompok, bukan perorangan. GOPAC adalah contoh jaringan parlemen internasional yang fokus pemberantasan korupsi,” jelas politisi F-Gerindra itu.

Sebagai Presiden *Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC)* Indonesia, pihaknya siap bekerja menyukseskan komitmen dan memimpin gerakan antikorupsi. Isu-isu antikorupsi dan kemitraan dalam



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon, dalam acara MENA-OECD di Tunisia.

foto : Andri/iw

memerangi bahaya endemik korupsi terus dilakukan. Ke depan, GOPAC Indonesia berkomitmen untuk terus fokus pada penguatan fungsi parlemen dalam beragam isu anti-korupsi.

Sementara, dalam sidang umum *Inter Parliamentary Union (IPU)* ke 134 di Zambia pada Maret 2016, Fadli menyampaikan pidato umum pentingnya peran kelompok muda dalam pemberantasan korupsi. Ia mencatat, populasi kelompok muda yang berusia 10-24 tahun secara global saat ini mencapai 1,8 miliar. Angka ini semakin bertambah jika kita masukan populasi dalam kelompok usia 25-30 tahun.

“Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi kelompok muda saat ini. Tapi sayangnya saat ini masih banyak dari kelompok muda yang tidak terberdayakan. Mereka masih terikat dengan kemiskinan, sulitnya akses pendidikan, dan bahkan masih berada dalam situasi konflik yang menyulitkan mereka untuk berkembang,” kritisi Fadli.

Isu kesejahteraan buruh pun menjadi sorotan Fadli. Politisi asal dapil Jawa Barat itu menekankan bahwa

buruh Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera. Ia juga menegaskan, bahwa PHK yang terjadi dalam satu tahun terakhir ini, tidak bisa dianggap remeh. Sebab, menyediakan pekerjaan adalah bagian dari amanah konstitusi. Isu membanjirnya buruh Cina di Indonesia, merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah dan tidak boleh digampangkan.

Berbagai penghargaan pun diterima Fadli selama kurun waktu 2016. Diantaranya penghargaan dari *The Royal Palace of Puri Agung Negara Djembrana*, Bali. Kehormatan ini diberikan atas dedikasinya dalam bidang kebudayaan, adat, sosial, dan kemanusiaan.

Bahkan pada saat peringatan ulang tahun ke-45, Fadli menyabet sejumlah rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Rekor yang dipecahkan Fadli adalah kolektor kemasan rokok dan rokok terbanyak, yakni sebanyak 7 ribu kemasan, kemudian insan Indonesia yang pertama menjabat Plt. Ketua DPR RI, penggagas dan kolektor wayang Minangkabau, dan kolektor wayang golek terbesar. ■

(sf)



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto

# Terus Bekerja untuk Kepentingan Rakyat

**W**akil Ketua DPR RI Agus Hermanto terus menjalankan komitmennya untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal itu terbukti dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan sepanjang 2016 yang cukup diisi dengan kegiatan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan untuk tujuan kepentingan bangsa.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI dan Komisi VII, Agus Hermanto telah menjalankan kegiatan yang cukup padat yang berkaitan dengan fungsi dan tugas DPR RI. Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dijalankan:

## Memastikan Ketersediaan Energi Panas Bumi

Di awal tahun 2016, Agus Hermanto berkunjung ke Bumi Nyiur Melambai, Sulawesi Utara untuk memastikan kondisi penambangan panas bumi di daerah tersebut. Terutama kebijakan energi nasional dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ditargetkan sebesar 23% pada tahun 2015. "Indonesia memiliki potensi energi panas bumi sebesar 40% dari seluruh potensi panas bumi di dunia dan salah satunya ada di Sulut ini," tegasnya.

Untuk itu, ungkap Politisi Demokrat ini, upaya-upaya optimalisasi sumber panas bumi harus terus dilakukan untuk mengejar target pengembangan PLTPB sebesar 3.583 MW sampai dengan tahun 2020. Dengan demikian, target total 35.000 MW akan tercapai apabila pembangunan infrastruktur dan kapasitas PLTPB ditingkatkan.

## Mendorong Tindak Tegas Pelaku BPJS Palsu

Agus menyatakan pemalsuan BPJS merupakan perbuatan melanggar hukum, dan para pelakunya harus diberikan sanksi tegas. Hal itu seiring dengan maraknya pemalsuan kartu BPJS pada pertengahan 2016 ini.

"Tindakan pemalsuan BPJS merupakan



foto : Iwan Armanias/iw

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto memberikan bantuan kepada warga miskin.

perbuatan melanggar hukum, dan hal ini harus ditindak dengan tegas. Kita bisa bayangkan program BPJS adalah program yang dulu kita kuatkan, saya juga termasuk dalam tim Pansus yang membahas Undang-undangnya," tandas Agus.

Politisi F-Demokrat itu juga meminta agar dilakukan upaya pemberantasan yang serius untuk mengatasi masalah tersebut. "Yang melanggar hukum harus ditindak, pelanggaran ini telah membuat kita semua tercengang, padahal kalau kita lihat hasilnya juga tidak besar. Saya merasa prihatin kepada saudara-saudara kita yang tergantung pada BPJS tetapi tidak bisa mendapatkan pelayanan karena BPJS nya palsu," ujarnya.

## Perjuangkan Nasib Pelaut Indonesia

Agustus 2016 Agus menerima audiensi Solidaritas Pelaut Indonesia (SPI) yang menyampaikan keluhan terkait nasib pelaut Indonesia yang belum mendapatkan peran penting dalam dunia usaha. Dalam kesempatan ini, SPI juga meminta Agus Hermanto bersedia sebagai Ketua Dewan Pembina SPI. Ia pun akan menjembatani kepentingan pelaut dan memperjuangkan aspirasinya.

"Ini memang yang dirasakan saudara kita bahwa selama ini hubungan antara dunia pendidikan maritim dengan dunia usaha kemaritiman belum sinkron, sehingga masih banyak kendala," ujar Agus.

Pimpinan DPR RI ini pun akan menjembatani permasalahan ini dengan melakukan koordinasi dengan komisi terkait. Terlebih, Agus kini juga telah memenuhi permintaan SPI untuk menjadi ketua dewan pembina.

## Selenggarakan Pengobatan Gratis

Pada Masa Reses Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, Agus telah menyelenggarakan pengobatan gratis di Balai Kampung Karang Geneng Utara, Kelurahan Jagalan, Kabupaten Semarang Tengah, Jawa Tengah. Agus mengatakan, aksi sosial seperti pengobatan gratis kali ini telah dilakukannya semenjak dirinya terpilih menjadi wakil rakyat di Senayan.

"Untuk itu saya berharap, dalam kegiatan pengobatan gratis ini dapat melahirkan kedekatan saya dengan masyarakat dalam hal komunikasi," jelasnya kepada pers, usai memberi sambutan dan sekaligus membuka pengobatan gratis.

Kesibukan menjadi Wakil Ketua DPR RI pun tidak menghalangi Agus untuk dapat bertemu dan membantu masyarakat. Dalam beberapa kesempatan pun, seringkali Ia menerima kunjungan masyarakat guna menyampaikan aspirasi untuk dapat diteruskan ke Komisi. Hal ini sebagai wujud nyata dalam mengemban amanah rakyat untuk tercapainya cita-cita bernegara. ■

(hs)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Fahri Hamzah

# Berjuang Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

**W**akil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah terus berupaya memberikan upaya maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu terwujud dalam beberapa kegiatan yang telah dilalui selama tahun 2016.

Sebagai pimpinan DPR RI yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X dan Mahkamah Kehormatan Dewan, Fahri terus menjalankan fungsi dewan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Beberapa yang telah dilakukan yakni:

## Desak RUU Pertembakauan Mampu Tekan Impor Tembakau.

Pada pertengahan 2016, Fahri Hamzah mendesak agar RUU Pertembakauan harus mampu menekan impor tembakau. Hal tersebut diungkapkan sesuai menerima audiensi Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Yayasan Jantung Indonesia, tengah Juli 2016.

Fahri menjelaskan, dalam audiensi tersebut, disampaikan ada kekhawatiran bahwa RUU Pertembakauan akan membawa kepentingan Industri rokok dan merugikan petani tembakau. “Komnas tadi menyampaikan hasil risetnya bahwa RUU ini berpeluang akan meningkatkan industri semata, membuat pasar rokok di dalam negeri semakin masif dan dikhawatirkan akan merusak generasi muda,” ungkap Fahri.

## Respon Cepat Terkait Vaksin Palsu

Seketika mendengar peredaran vaksin palsu di tengah masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah langsung mendesak pemerintah membuat peraturan untuk melakukan penghentian sementara vaksinasi terhadap anak. Hal ini dikarenakan sulitnya membedakan vaksin yang asli maupun palsu.

“Pemerintah harus membuat larangan yang ketat, menggunakan instrument apakah itu keputusan menteri atau keputusan presiden

karena vaksin ini kan tidak mudah diidentifikasi asli atau tidaknya,” ungkap Fahri saat bersilahturahmi dengan para Wartawan Koordinatoriat DPR RI di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/07/2016).

Ia juga mempertanyakan mekanisme peraturan pemerintah terkait pihak yang harus bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan ulang setiap vaksin atau obat yang masuk maupun yang akan didistribusikan. Menurutnya, persoalan vaksin palsu tidak boleh dipandang sederhana mengingat kasus ini sudah ada sejak tahun 2003 silam.

## Desak Pemerintah Audit BPJS Kesehatan

Mengenai rencana kenaikan iuran BPJS pada pertengahan 2016, Fahri Hamzah menegaskan Pemerintah harus segera mengaudit secara menyeluruh, terutama kegagalan dari pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia mengkritisi BPJS Kesehatan yang hendak menaikkan premi per 1 April 2016, tidak sejalan dengan prinsip BPJS Kesehatan itu sendiri.

“Kerja BPJS seperti prinsip asuransi pada umumnya. Bukannya menjamin pelayanan kepada masyarakat, sekarang malah mau ditingkatkan preminya. Pemerintah harus meninjau dan mengaudit secara menyeluruh kegagalan BPJS itu, yang menyebabkan persoalan,” tegas Fahri usai menerima audiensi perwakilan Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Maret 2016.

“Ini harus diaudit secara menyeluruh oleh Pemerintah. Apakah hanya persoalan likuiditas, atau soal kurangnya setoran premi, atau ada soal yang lebih mendasar, yang merupakan kritik orang, kenapa tiba-tiba Pemerintah seperti lepas tangan menyerahkan kepada BPJS Kesehatan dan beroperasi seperti asuransi swasta,” tegas Fahri.



foto : Arief/iw

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Fahri Hamzah

## Tingkatkan Pelayanan Haji

Fahri Hamzah juga mendesak pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan haji. Politisi PKS yang juga sebagai Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji DPR RI ini mengatakan sudah saatnya Pemerintah mengubah pola pikir selaku penyelenggara haji dengan jumlah jemaah terbesar di dunia. Fahri menilai, Pemerintah masih bersikap seolah Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji yang sedikit. Padahal jumlah kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 160 ribu jemaah.

“Jangan seperti peserta kecil. Jemaah kita ini mayoritas di sana. Karena itu mentalitas kita harus sebagai penyelenggara yang juga ambil saham dalam pengadaan fasilitas,” tegas Fahri, usai Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016 dalam rangka HUT DPR RI ke-71, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Agustus 2016.

Memasuki tahun 2017, Fahri akan terus berkomitmen menjalankan tugas konstitusional dalam rangka penguatan kerja dewan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gonjang-ganjing politik yang terjadi di partainya pun tidak mengurangi semangatnya untuk tetap bekerja keras dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tugas yang diemban sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat. ■ (hs)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Taufik Kurniawan

# DPR dan Pemerintah Sepakat Hemat Anggaran



foto : Iwan Armanias/iw

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Taufik Kurniawan berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Rapat Paripurna pengesahan RAPBN 2017.

DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk disahkan menjadi Undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menekankan, satu hal yang paling disepakati antara DPR RI dan Pemerintah adalah untuk melakukan penghematan anggaran. Menurutnya, penghematan ini agar bisa digunakan untuk belanja prioritas dan mendesak, agar tidak terjadi lagi pemotongan anggaran di tahun 2017.

“Postur APBN kali ini sudah ideal. Bahkan, merupakan yang terbaik dari situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional. Apalagi, diakui atau tidak, pelaku pasar dunia tengah menunggu apakah Bank Sentral AS akan menaikkan suku bunga atau tidak,” kata Taufik, usai memimpin rapat paripurna pengesahan RAPBN 2017 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, akhir Oktober lalu.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu mengatakan bahwa APBN 2017 sangat penting. Sebab, APBN 2017 bisa menjadi batu pijakan untuk menentukan

langkah berikutnya. Apalagi setelah digulirkannya program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Diharapkan, *Tax Amnesty* mampu memberikan penguatan bagi perekonomian nasional.

Taufik berharap momentum ini dapat menarik pemegang investasi di luar negeri, dan mengembalikannya ke Indonesia. Ia juga berharap, agar target bisa tercapai agar defisit anggaran dapat diselesaikan. Pemerintah didorong agar melakukan langkah optimal.

Tak lama sebelumnya, Taufik juga menekankan, DPR RI tidak ingin pemerintah terjebak dan cukup puas dengan asumsi makro. Sebab, asumsi mikro dan pelaku ekonomi lainnya juga harus bisa menjadi daya dukung dan daya dorong untuk meningkatkan perekonomian. “Secara prinsip, DPR RI mengapresiasi kerja keras dari semua pihak, terkait penetapan asumsi-asumsi makro. Namun sekali lagi, asumsi makro tidak hanya berkuat pada angka-angka saja, melainkan bisa mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Taufik tidak menampik, pemotongan

anggaran merupakan *domain* dari Pemerintah. Apalagi pada tahun anggaran 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian dan Lembaga.

“Terkait dengan Inpres pemotongan anggaran, itu merupakan domain pemerintah. DPR RI tidak dalam kapasitas meminta ataupun mendorong. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah melakukan *adjustment* untuk melakukan efisiensi anggaran yang secara garis besar adalah *adjustment* teknis, tidak terkait asumsi-asumsi makro yang lain,” imbuhnya.

Taufik memastikan, selama pembahasan RAPBN, khususnya RAPBN 2017, seluruh fraksi di DPR RI menginginkan adanya efektivitas dan efisiensi anggaran yang tepat sasaran. Sehingga, penggunaan anggaran tepat sasaran dan bisa mendukung Program Nawacita yang digagas oleh pemerintah. Ia juga mengingatkan, sentralisasi penggunaan anggaran harus bisa menyentuh pada kebutuhan masyarakat.

Baru-baru ini, Taufik juga memastikan pihaknya mendukung langkah Presiden dalam memberantas masalah pungutan liar. Pihaknya pun tidak mempermasalahkan mengenai besar kecilnya pungli itu, namun lebih kepada keseriusan Pemerintah dalam memberantas pungli, baik di pusat maupun daerah.

“Pada prinsipnya kami telah sampaikan, bahwa DPR RI mendukung langkah Presiden yang melakukan gebrakan untuk membasmi pungutan liar. Karena hal tersebut menjadi salah satu indikasi dukungan penuh dari pemerintah untuk konsen terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek mengenai pungutan liar sekecil apapun,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

(sf)



foto : Rizka/iv

Komisi I DPR RI saat menetapkan sembilan nama Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) priode 2016-2019

## ◀◀ KOMISI I DPR RI

# Komisi I Terus Tingkatkan Kualitas Penyiaran

**K**omisi I DPR RI yang salah satunya membidangi penyiaran terus berupaya meningkatkan kualitas penyiaran dan proses penyebaran informasi untuk diterima masyarakat. Beberapa hal yang sudah dilakukan yakni melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dewan pengawas Radio Republik Indonesia (RRI), pemilihan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia serta melakukan proses revisi UU Penyiaran dan dalam waktu dekat akan menyusun RUU RTRI (Radio dan Televisi Republik Indonesia).

Di bidang penyiaran, Anggota Komisi I DPR RI, Supiadin Aries Saputra mendorong agar stasiun TV lokal lebih memprioritaskan kearifan dan budaya lokal agar tak kalah saing dengan TV Nasional serta bisa memberikan daya tarik khusus kepada masyarakat.

Hal ini harus menjadi perhatian bersama, karena TV Lokal bisa dijadikan identitas daerah dan belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Dalam kasus di Garut misalnya, ada stasiun yang bernama 9 TV dan sudah

bertahun-tahun menjalani masa percobaan. Supiadin juga menyoroti mengapa perijinan penyiaran di Indonesia begitu susah dan memakan waktu yang lama.

Setelah melakukan rapat intern Komisi I DPR RI akhirnya menetapkan sembilan nama Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) priode 2016-2019. Penetapan ini diumumkan di depan awak media di ruang rapat Komisi I Gedung Nusantara II DPR RI.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari didampingi para Wakil Ketua Komisi menjelaskan, penetapan ini telah melalui musyawarah, namun tidak menemukan kata mufakat dan akhirnya dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

“Memutuskan sembilan calon anggota KPI Pusat priode 2016-2019 berdasarkan suara terbanyak. Setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah mufakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 287 tata tertib DPR RI,” jelas Kharis, tengah Juli 2016.

Sembilan komisioner terpilih tersebut adalah Nuning Rodiyah,

Sudarwanto Rahmat Muhammad Arifin, Yuliandrie Darwis, Ubaidillah, Dewi Setyarini, H Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Agung Suprio.

Selain itu, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI terhadap 15 calon, akhirnya Komisi I juga telah menetapkan lima Dewan Pengawas terpilih yakni Mistam, Frederik Ndolu, Hasto Kuncoro, Tantri Relatami dan Rosalita Widiastuti pada Rabu, Februari 2016.

Anggota Komisi I Rachel Maryam Sayidina mengatakan bahwa Komisi I DPR RI sudah berusaha mencari yang terbaik untuk menentukan Dewan Pengawas RRI ini.

“Komisi I telah berusaha mencari *the best from the best* dari yang ada. Tentunya setiap calon pasti punya kelebihan dan kekurangan, dari situ Komisi I memberi penilaian seobjektif mungkin untuk memilih yang terbaik. Kami juga berusaha menggali lebih dalam tidak hanya sebatas visi dan misi saja. Ya mudah-mudahan hasil kerja selama 2 hari ini sesuai dengan ekspektasi,” ujarnya.

Rachel juga memberikan harapan agar dengan adanya Dewas baru ini bisa membawa RRI menjadi lebih baik. “Tentunya jika kami sudah memilih kami berharap dewas RRI bisa membawa RRI menjadi lebih baik dan maju kedepan. Harapannya, itu bisa terealisasi,” ujar Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Barat II ini.

ini sebenarnya sudah pernah dibahas pada periode sebelumnya. Layanan LPP, lanjut politisi Hanura ini, tak boleh dihambat oleh sistem birokrasi. Karena ini adalah penyiaran publik, jadi harus fleksibel demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Banyak pasal yang harus cermat dibahas dalam RUU ini karena menyangkut interaksi dengan masyarakat luas dari

Hafidz ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TVRI Iskandar Achmad.

“Terkait fungsi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dalam bidang informasi, pendidikan, hiburan dan sabuk pengamanan NKRI, Komisi I mendesak TVRI untuk menjadi pelopor dalam peningkatan dan pembinaan moral masyarakat Indonesia,” ujar Meutya.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga mendorong agar TVRI mampu menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mudah melakukan komunikasi dengan pemerintah. “Kami juga berharap TVRI dapat meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan siaran serta mensosialisasikan program Kementerian dalam tayangan berita maupun interaktif kepada masyarakat,” papar legislator dapil Sumatera Utara I ini.

Selain itu, Komisi I juga menyoroti persoalan sumber daya manusia di lingkungan TVRI. Sebagaimana yang dipaparkan Meutya, Komisi I mendesak agar Direksi TVRI dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara internal, tanpa ada campur tangan dari pihak luar.

“Terkait persoalan SDM di LPP TVRI, Komisi I mendesak direksi dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan internal dengan memperhatikan aspek pembinaan karir, kepemimpinan dan komunikasi,” tutup Meutya. Komisi I pun juga akan terus menghasilkan regulasi yang dapat memacu peningkatan kualitas penyiaran melalui UU RTRI nantinya. ■



foto : Andri/iw

Anggota DPR RI Fraksi Hanura Arief Suditomo dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU RTRI

### Perkuat RRI dan TVRI

Selain itu, ke depan Komisi I juga akan berupaya memperkuat RRI akan berupaya memperkuat RRI melalui penggabungan dengan TVRI melalui UU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). “Tapi UU ini belum dibahas karena Komisi I masih dalam pembahasan UU Penyiaran, nanti setelah UU Penyiaran selesai dibahas, baru kita bicara UU RTRI,” ujar Rachel.

Anggota DPR RI Fraksi Hanura Arief Suditomo, dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) di Media Center DPR RI, Mei lalu mengatakan banyak siaran dari TVRI dan RRI yang tak tercover oleh siaran swasta, terutama menyangkut program budaya. Siaran swasta justru memasukkan budaya asing ke ruang privat keluarga Indonesia.

Disampaikan Arief, saat ini RUU RTRI masih pada tahap awal pembahasan yang isinya ingin memperkuat LPP agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Diupayakan RUU ini selesai sebelum masa keanggotaan dewan berakhir pada 2019. Dan RUU

beragam etnik dan kultur. “Kelak, TVRI dan RRI bisa menjadi penyeimbang dari siaran swasta nasional,” ucap Arief yang kini duduk di Komisi VIII DPR RI.

Harapan besar terhadap Lembaga Penyiaran Publik juga diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi I Meutya Viada



**Terkait fungsi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dalam bidang informasi, pendidikan, hiburan dan sabuk pengamanan NKRI, Komisi I mendesak TVRI untuk menjadi pelopor dalam peningkatan dan pembinaan moral masyarakat Indonesia.**



foto : Jaka/iw

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafidz



foto : Runi/iw

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman bersama Ketua KPU.

## ◀ KOMISI II DPR RI

# Komisi II DPR Tingkatkan Kualitas Pemilu

**K**omisi II DPR RI yang salah satunya membidangi pemilihan umum (Pemilu) terus melakukan upaya perbaikan dalam segi regulasi terkait penyelenggaraan pemilu. Pada pertengahan 2016, Komisi II telah menyelesaikan pembahasan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Setelah melalui pembahasan panjang dan menuai pro kontra antar fraksi, Revisi UU Pilkada akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada awal Juli 2016. Beberapa

poin yang direvisi dalam UU tersebut dimaksudkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum menjadi lebih baik lagi.

Dalam UU Pilkada yang baru, terdapat beberapa poin perubahan yang disahkan, yakni:

Poin pertama, mengenai penetapan waktu pemungutan suara agar serentak secara nasional untuk Pileg, Pilpres dan Pilkada. Dalam UU sebelumnya ditetapkan tahun 2027, UU sekarang dipercepat jadi 2024.

Poin kedua, tentang meninggalnya pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon. Dalam UU Pilkada disepakati KPU memberikan waktu 30 hari melakukan pergantian, jika salah satu calon meninggal dunia pada

waktu 29 hari sebelum pemilihan;

Poin ketiga, mengenai peningkatan verifikasi kualitas calon perseorangan, Komisi II dan pemerintah menyepakati untuk dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus melalui langkah menemui pendukung pasangan calon.

Poin keempat, mengenai perbaikan norma terkait penyalahgunaan jabatan petahana. Pejabat negara, pejabat ASN, anggota TNI-Polri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Poin kelima, perbaikan pengaturan terkait penanganan pelanggaran Pilkada. Untuk tindak pidana Pilkada perlu dilakukan penguatan

fungsi Sentra Gakkumdu yang mengikutsertakan peran penyidik Kepolisian dan mempersingkat alur penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

Terkait sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dimulai dari upaya hukum secara berjenjang yang dimulai dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota ke Bawaslu hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Khusus yang menyangkut perselisihan hasil, diubah dengan menggunakan acuan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir.



Anggota Komisi II DPR RI, Sirmadji

Terkait mantan narapidana, diwajibkan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah menjadi narapidana. Persyaratan bagi PNS, anggota DPR RI, anggota DPD dan Anggota DPRD yang mencalonkan diri wajib mundur setelah secara resmi ditetapkan oleh KPU provinsi/KPU kabupaten/kota sebagai calon.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga telah melakukan rapat konsultasi dalam menyelesaikan Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu. Hal



Setiap pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang akan mendapatkan hukuman diskualifikasi.



foto : Rumi/iw

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman

itu dimaksudkan agar peraturan yang dihasilkan selaras dengan UU.

“Yang penting adalah bagaimana PKPU itu benar-benar sesuai dengan ruh dan isi dari UU. Jangan sampai ada yang melenceng sedikitpun,” ujar Sirmadji.

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, dengan dilakukan RDP disaat reses ini Komisi II bisa mengoreksi PKPU yang telah diterbitkan KPU. Hal ini diperuntukan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

“Melalui konsultasi ini, saya harapkan bisa dikoreksi dan diproses. Misalnya saja soal kartu tanda penduduk, itu harus dieksplisitkan yakni e-KTP. Karena kita ingin ke depan proses pemilu itu berbasis pada e-KTP,” sambungnya.

Tiga PKPU yang merupakan turunan UU No 10 Tahun 2016 adalah PKPU terkait Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2017, PKPU Pencalonan, dan PKPU Pilkada di daerah khusus, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

Selain itu, Komisi II juga menyoroti persoalan politik uang yang setiap pemilu selalu terjadi di Indonesia. Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman menegaskan, setiap pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang akan mendapatkan hukuman

diskualifikasi.

“Kalau calon yang melakukan ya didiskualifikasi tapi kalau tim suksesnya untuk apa didiskualifikasi, kan yang penting ada pembuktiannya. Kalau tim sukses yang penting pembuktian. Kecuali kampanye dalam pertemuan terbatas dan dialog tatap muka, itu memang didanai oleh parpol dan pasangan calon,” ujar Rambe.

Terkait usulan Anggota DPR RI mundur jika maju dalam Pilkada, ada sebagian fraksi yang mengusulkan untuk tidak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga Anggota DPR RI yang maju Pilkada harus mundur.

“Secara tegas ada fraksi yang mengusulkan tidak akan melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga tetap harus mundur. Namun ada yang mengusulkan agar Anggota DPR RI yang menduduki jabatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk mundur bila maju dalam Pilkada,” ujar legislator dapil Sumatera Utara II ini.

Tak hanya itu, Komisi II DPR RI juga telah menyelesaikan *fit and proper test* Anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021. Selama 2016 ini, Komisi II DPR RI juga telah menghimpun masukan terkait usulan Daerah Otonom Baru (DOB) terhadap daerah pelosok dan melakukan rapat konsultasi dalam menyusun Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. ■

(hs)

## ◀◀ KOMISI III DPR RI

# Perjuangan Nasib Hakim dan Hukum Indonesia

Dalam satu tahun terakhir ini banyak hal yang telah dilakukan dan diperjuangkan Komisi III DPR RI terkait dengan ketiga fungsi kedewannya, yakni fungsi legislasi terkait dengan produk undang-undang dan peraturan yang ada, kedua adalah fungsi pengawasan terhadap kinerja para mitra kerjanya, seperti Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan, BNN, serta Pengadilan tinggi. Fungsi ketiganya adalah penganggaran atau *budgeting*.

**Dalam hal legislasi**, ada beberapa rancangan undang-undang yang kini masih dalam pembahasan Komisi III DPR RI, baik dalam internal Komisi III sendiri, maupun pembahasan bersama pemerintah.

Komisi III DPR RI berhasil memperjuangkan RUU Jabatan Hakim menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Hal tersebut terjadi usai seluruh fraksi dalam sidang paripurna DPR RI pada Rabu (12/10) menyetujui RUU tersebut. Sejatinnya RUU ini telah diajukan Komisi III DPR RI sejak September tahun lalu. Namun setelah melalui berbagai proses diskusi dan rangkaian penyusunan akhirnya naskah akademis dan draf RUU

tentang Jabatan Hakim ini disampaikan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa RUU ini merupakan tindak lanjut Komisi III atas permintaan para hakim yang meminta kedudukan yang jelas. Selama ini pengaturan mengenai hakim masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Belum ada landasan hukum bagi perbaikan penataan hakim sejak rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian dalam suatu sistem kekuasaan kehakiman yang lebih baik.

Oleh karena dalam draft RUU ini juga akan mempertegas tentang kedudukan hakim sebagai pejabat negara, keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi pengangkatan hakim agung tingkat pertama. Selain itu, dalam RUU ini juga akan mengatur tentang syarat-syarat peserta pendidikan calon hakim tingkat pertama, diantaranya memiliki pengalaman praktik di bidang hukum sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris,

mediator atau arbiter tersertifikasi paling singkat lima tahun.

RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya merupakan RUU usul inisiatif Pemerintah pada tahun 2015. RUU ini memiliki jumlah pasal yang tidak sedikit yakni 786 pasal dan 2306 Dim (Daftar Inventaris Masalah). Tak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa RUU ini merupakan induk dari hukum pidana yang ada di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menjelaskan bahwa buku pertama ini mengatur soal ketentuan hukum umum. Sementara buku kedua dari revisi UU KUHP ini berisikan tentang ketentuan delik hukum. "Jika proses revisi UU KUHP ini berjalan lancar, maka ini adalah karya besar dari pembaruan sistem hukum di Indonesia," ungkap Nasir Djamil.

Selain ke dua RUU tersebut, Komisi III DPR RI bersama dengan pemerintah juga tengah membahas beberapa RUU prolegnas lainnya. Seperti RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diusulkan pemerintah pada 26 Januari 2016 lalu, dan RUU tentang Narkotika dan Psikotropika yang diusulkan pemerintah pada 20 Juni 2016.

**Dalam hal pengawasan**, banyak hal yang dilakukan Komisi III DPR RI terkait kinerja mitra kerjanya. Kasus terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap sejumlah perusahaan yang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan misalnya. Kasus ini mendorong Komisi III untuk membentuk Panja Pengawasan Karhutla. Hal ini dalam rangka pengawasan terhadap mitra kerjanya, Kepolisian Republik Indonesia.

"Ini masalah yang sangat serius. Kepolisian menetapkan sejumlah perusahaan menjadi tersangka, namun secepat halilintar Polda di sejumlah daerah malah menerbitkan SP3

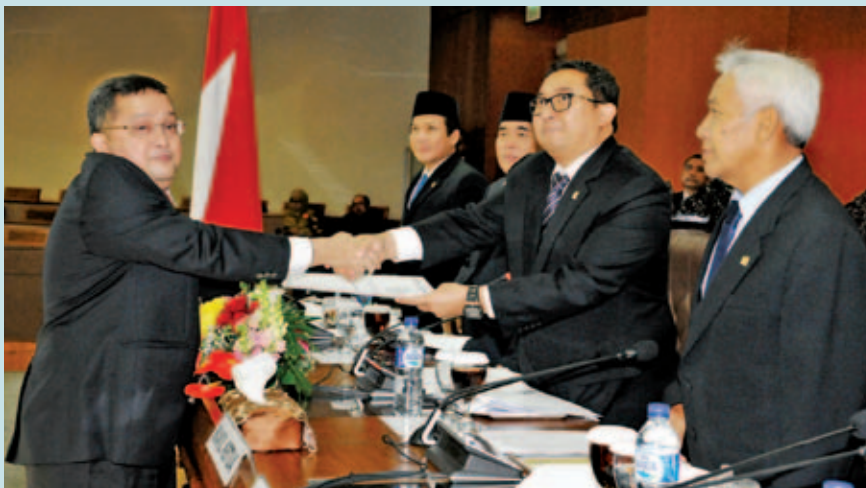


foto: Iwan Armanias/iw

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon usai mengikuti sidang paripurna.



terhadap perusahaan tersebut. Ada apa ini?,” ujar Wakil Ketua Benny K Harman di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/09/2016).

Di Tahun 2016, Komisi III DPR RI juga menyoroti hubungan dua lembaga negara yang menjadi mitra kerjanya, Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA) yang belakangan terkesan kurang harmonis.

“Dalam laporan KY disebutkan bahwa selama ini pengelolaan manajemen hakim dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung dan terbukti belum optimal. Jangan sampai hal itu menjadi sebuah sinyalemen yang semakin menjauhkan KY dan MA seperti yang diberitakan media massa,” ujar anggota Komisi III, Achmad Zacky

tersebut. Kami menilai hal itu tidak layak, Apa tujuan jaksa melakukan itu,” ujar Desmond.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi Partai Gerinda itu mengatakan bahwa deponering itu telah mendegradasi wibawa Kepolisian. Oleh Karena itu, Komisi III akan mengkaji secara akademis, kemudian dalam waktu dekat juga akan memanggil Jaksa Agung.

Di bulan Juni dan Agustus, Komisi III DPR RI melakukan fit and proper test terhadap Pimpinan dari lembaga-lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Sebut saja fit and proper test Calon Kapolri, Tito Karnavian pada Juni 2016 lalu. Tito sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

anggaran. Kami melihat ini merupakan *side back* dari keadaan 3-4 tahun yang lalu. Di satu sisi pemerintah menuntut para penegak hukum, serta kementerian/ lembaga penunjang penegakan hukum untuk bekerja maksimal. Apalagi pemerintah baru saja meluncurkan paket reformasi hukum yang pertama, di sisi lain anggarannya makin terbatas. Pemotongan ini bukan untuk anggaran 2017 mendatang saja, melainkan juga anggaran 2016 lalu juga mengalami pemotongan,” papar anggota Komisi III, Arsul Sani.

Oleh karena itu, politisi dari Fraksi PPP ini mengungkapkan bahwa pihaknya beserta fraksi-fraksi lainnya akan memperjuangkan anggaran mitra-mitra kerjanya. Jika pemerintah



Ketua Komisi III DPR RI,  
**Bambang Soesatyo**



Wakil Ketua Komisi III DPR RI,  
**Benny K Harman**



Anggota Komisi III DPR RI,  
**Nasir Djamil**



Anggota Komisi III DPR RI,  
**Arsul Sani**

Siradj. Hal tersebut mengemuka dalam rapat konsultasi Komisi III dengan KY, Rabu (2/3) di ruang rapat Komisi III, Senayan, Jakarta.

Oleh karena itu Komisi III DPR RI berharap agar KY dapat menjaga kehormatan, martabat dan nilai luhur hakim, sekaligus mampu bersinergi dengan Mahkamah Agung untuk mencapai tujuan utama menegakkan keadilan.

Selain itu, adanya deponering kasus dua mantan Pimpinan KPK, AS dan BW menjadi perhatian Komisi III terhadap mitra kerjanya, Kejaksaan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa menduga ada unsur tertentu dalam deponering kasus dua mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima masukan dari Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum (FMPPH) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (7/3).

“Kami tidak menemukan alasan logis atas deponering dua kasus

Komisi III DPR RI juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan tujuh calon Hakim Agung pada akhir Agustus 2016 lalu. Tiga dari tujuh Hakim Agung terpilih adalah Panji Widagdo dan Ibrahim sebagai calon Hakim Agung untuk kamar peradilan perdata, serta Edy Riadi pada kamar peradilan agama.

**Di fungsi anggaran,** Komisi III DPR RI mempertanyakan pemotongan anggaran mitra kerjanya oleh Menteri Keuangan. Komisi III DPR RI mempertanyakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap empat mitra kerja Komisi III, Polri, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan para mitra kerjanya tersebut di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta (18/10/2016).

“Keempat mitra Komisi III itu memiliki anggaran yang cukup signifikan atau besar. Secara umum mitra kami itu mengalami pemotongan

ingin program penegakan hukum yang telah diluncurkannya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo akan mengkaji usulan tambahan anggaran yang diajukan KPK dalam pagu Tahun Anggaran 2017 senilai Rp398,516 miliar.

“Tentu kami akan mengkaji lagi, dan akan menyesuaikan dengan keuangan negara. Kami minta Anggota Komisi III di Banggar bisa memperjuangkan permohonan dari para mitra kerja di Komisi III, agar kinerja mereka bisa meningkat,” kata Bambang di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (19/9).

Dia menilai usulan tambahan anggaran KPK itu sudah logis sehingga pihaknya akan memperjuangkan ke Banggar agar dana tersebut diloloskan.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat juga menyambut baik permintaan Kejaksaan Agung yang ingin anggaran lembaga adhyaksa ditambah sebesar Rp 310 miliar dalam APBN Perubahan 2016. ■

(ayu)

## ◀ KOMISI IV DPR RI

# DPR Lahirkan UU untuk Lindungi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

**S**elama Periode 2016, Komisi IV DPR RI terus menjalankan tugas dan kewajibannya dalam fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi dalam kerangka representasi rakyat. Sesuai ruang lingkupnya yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan, mitra kerja Komisi IV adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, dan Dewan Maritim Nasional.

kemudian, sudah menjadi Lembaran Negara. Undang-undang itu dapat segera disosialisasikan dan diimplementasikan.

“Undang-undang ini sangat diharapkan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat Nelayan, Pembudi Daya ikan dan Petambak Garam. Karena resiko terbesar dalam usaha dinegeri ini adalah adanya di nelayan,” tutur politisi F-PD Dapil Jawa Barat VIII itu.

Herman mengatakan, kerentanan dalam masalah harga juga ada pada

tujuan akhir dari eksekutif. Sehingga Kementerian Perikanan dan Kelautan, sebagai institusi yang melaksanakan undang-undang itu, harus dengan sungguh-sungguh dan serius memandu kegiatan dan programnya.

Undang-undang ini merupakan kesepakatan DPR RI dan pemerintah, dan tentunya menjadi komitmen bersama agar ke depan cita-cita dan tujuan kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan.

Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur harus menjadi kewajiban kementerian terkait. Sebelumnya memang belum ada payung hukum yang mengatur tentang masalah itu, contohnya soal asuransi nelayan yang belum pernah ada payung hukumnya dan hanya dilakukan secara sporadis.

Dengan adanya undang-undang tersebut akan menjadi payung hukum untuk pelaksanaan asuransi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dan DPR RI sudah menganggarkan dana sebesar 250 Milliar rupiah agar hal itu dapat dilaksanakan pada tahun 2016.

Pembangunan infrastruktur perikanan, pelabuhan, pendaratan ikan kecil dan sebagainya, serta termasuk sarana didalamnya yakni pengadaan kapal, sudah memiliki payung hukum yang bisa dijadikan sebagai kaitan atau cantolan agar seluruh kegiatan yang dilakukan ini berdasarkan amanat undang-undang.

Sejak awal hingga dipenghujung tahun 2016, Komisi IV tetap konsen untuk mengawal masalah Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (TBPP), baik yang THL di Kementerian Pertanian (Kementan), THL di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maupun THL di Kementerian Kehutanan.

“Masalah THL secara konsisten



foto : Naefuroji/aw

Anggota Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan usai penandatanganan Draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Sebagai bukti nyata hasil kemitraan kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, di tahun 2016, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, telah berhasil disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, dalam kurun waktu satu bulan

Pembudi Daya Ikan, rentan terhadap harga dan juga rentan terhadap penyakit. Kerentanan terhadap harga juga terjadi di Petambak Garam, karena ketiga profesi itulah yang memang rentan terhadap perubahan iklim.

Untuk itu, unsur-unsur perlindungan dan unsur pemberdayaan harus lahir dari Undang-undang tersebut, yang dapat melandasi terhadap berbagai aktifitas, program,

kami kawal di Komisi IV, hal ini semata-mata sebagai bentuk dedikasi kami sebagai wakil rakyat, yang menuntut kinerja dari teman-teman THL yang selama ini telah bekerja keras dan baik, namun disisi lainnya kami juga ingin memberikan jaminan bagi masa depannya,” ujar Herman Khaeron.

Menurutnya, Komisi IV sengaja mengundang Kepala Divisi SDM dari dua Kementerian, yakni dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada saat digelarnya audiensi yang dihadiri para perwakilan THL-TBPP di Gedung Parlemen, hal itu dimaksudkan agar bisa memangkas jalur pengambilan keputusan dan penyampaian informasi,” tandasnya.

Karena bagaimanapun pemerintahlah yang mengeksekusi dan melaksanakan berbagai rujukan keputusan dan hasil-hasil yang disimpulkan dalam rapat di Komisi IV, yang kemudian dilaporkan juga kepada Komisi IV, lanjut Herman.

Kehadiran para tenaga penyuluh non PNS dalam agenda rapat pada saat itu, yakni agar dapat secara langsung mendengarkan informasi yang utuh dari Kepala Divisi SDM baik Kementan maupun KKP.

Nasib para penyuluh dan tenaga honorer dilapangan terkesan tidak terurus dengan baik, karena para

penyuluh tersebut belum memiliki kepastian status yang jelas bagi kelangsungan hidupnya. Dijaman globalisasi ini, para tenaga penyuluh tersebut masih menggunakan cara tradisional, belum ada penambahan teknologi bagi peningkatan sumber daya manusianya.

Sementara Anggota Komisi IV Taufiq R. Abdullah, mendesak kepada pemerintah agar para tenaga penyuluh dan tenaga honorer itu segera diangkat menjadi CPNS, Karena memang hal itu sudah menjadi kebutuhan. Menurutnya, secara prinsipil tingkat urgensi tenaga penyuluhan itu sudah tidak perlu diragukan lagi, sebab semua sepakat bahwa penyuluh ini penting. Tanpa adanya penyuluh kegiatan yang berkaitan dengan pangan tidak akan tercapai.

“Kedaulatan pangan hanya akan menjadi omong kosong jika tanpa adanya penyuluh,” tandas Taufiq.

Taufiq berharap, khusus untuk tenaga honorer tersebut harus ada langkah-langkah afirmatif, tidak bisa kalau mereka disamakan dengan tenaga baru. ” Bagi saya masalah ini sangat serius, maka tuntutan saya kepada Kementerian PAN, jangan mengatakan lagi akan “dikaji” , sekarang sudah waktunya hasil kajian itu disampaikan kepada kita. Sehingga

kita akan mendapatkan gambaran yang jelas berapa kebutuhan tenaga honorer untuk tahun ini, dan tahun berapa para tenaga penyuluh itu akan diangkat,” ucapnya.

Terkait pernyataan yang mengatakan bahwa yang akan diangkat adalah mereka yang berusia dibawah 35 tahun, baginya hal itu sudah menjadi informasi lawas, lalu bagaimana nasib mereka yang berusia diatas 35 tahun. Kementerian PAN harus menghimbau agar para tenaga honorer itu segera diangkat, sebab kalau tidak nasib mereka akan terlunta-lunta.

Meski demikian, Komisi IV DPR RI tetap memberikan apresiasinya kepada pemerintah, yang telah mengalokasikan formasi pengangkatan THL TBPP menjadi CPNS pada tahun 2016 sebanyak 6.075 orang. Dan meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang P3K sebagai dasar acuan pengangkatan menjadi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk tenaga harian lepas dan tenaga bantu lainnya.

Dewan juga sepakat dengan pemerintah agar THL TB dan sejenis lainnya dilingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK dapat diakomodir menjadi pegawai ASN pada formasi selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. ■

(dep)  
foto : Naefuroji/hw



Komisi IV DPR RI saat audiensi dengan tenaga penyuluh pertanian tentang status kepegawaian.

## ◀◀ KOMISI V DPR RI

# Dari Keamanan Bagasi Hingga Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

DPR RI terus menunjukkan peningkatan kinerja yang baik, dalam setahun ini, Komisi V DPR RI sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi representasi politik Anggota Dewan, intens melakukan kegiatan baik itu legislasi, pengawasan dan anggaran, serta rutin melakukan audiensi untuk mendapat masukan terkait isu-isu yang memerlukan keterlibatan DPR RI untuk diperjuangkan.

Dalam hal pengawasan, Komisi V pun rutin melakukan kunjungan ke daerah-daerah termasuk ke daerah pemilihan (dapil) untuk berkomunikasi langsung dengan konstituen baik di masa reses maupun di luar reses. Hal ini dimaksudkan agar para wakil rakyat dengan konstituen lebih dekat dan menyerap langsung aspirasi, kemudian melakukan serangkaian tindakan advokasi atas aspirasi tersebut dalam bentuk kebijakan.

Di awal 2016, tepatnya bulan Januari salah satu yang tengah menjadi sorotan mengenai hilangnya bagasi sejumlah penumpang pesawat. Komisi V DPR RI saat itu melalui Ketua Komisi V Fary Djemy Francis menyatakan bahwa hilangnya bagasi penumpang di sejumlah bandara disebabkan karena rendahnya tingkat keamanan di bandara asal dan tujuan termasuk juga pengawasan maskapai penerbangan sebagai penanggung jawab pengangkut karena pengurusan *ground handling* (bagasi penumpang-red) diserahkan kepada pihak ketiga.

Atas hal tersebut, Komisi V DPR RI melakukan langkah cepat dengan melakukan sidak ke sejumlah bandara untuk mengecek pelayanan bagasi di Bandara Soetta, Bandara Juanda, Surabaya, Bandara Ngurah Rai, Bali, dan Bandara Kualanamu, Medan.

Pada Februari 2016, terjadi pro dan kontra di masyarakat dan DPR RI



foto : Agung/iw

Anggota Komisi V DPR RI Sidak pelayanan bagasi di Bandara Ngurah Rai, Bali.

terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat raker dengan Menhub Ignatius Jonan saat itu, Nizar Zahro Anggota Komisi V DPR RI dari Gerindra memberikan pernyataannya, bahwa pada prinsipnya Fraksi Gerindra sejak awal konsisten jika ingin membangun infrastruktur namun yang terpenting konsisten dalam regulasinya. "Kita setuju asalkan semua regulasi itu di penuhi, kalau semua regulasi itu kita tabrak bagaimana kita menjalani proses bertata negara yang baik," ujar Nizar.

Selanjutnya, Suhartono Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, menerangkan, bahwa kereta cepat harus terwujud "Bagi kami (fraksi Nasdem\_red) harus terwujud, ini merupakan kebanggaan bangsa kita biar kita tidak kuno," jelasnya.

Pendapat berbeda di kemukakan oleh Umar Arsal dari Fraksi Demokrat, menurutnya berbicara kereta cepat bukan soal penting atau tepat, "Saya pribadi merasa untuk kondisi sekarang belum tepat dan mendesak, dan kami

hampir dari semua teman-teman Fraksi Demokrat belum semuanya setuju untuk saat ini," tegasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah terus mendorong agar pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan sesuai dengan rencana. Setelah menggelar rapat, pemerintah memutuskan untuk segera melakukan *groundbreaking* pada 21 Januari 2016 di Walini, Bandung.

Pada bulan Maret, Komisi V DPR RI prihatin adanya polemik angkutan berbasis *online*, dimana waktu itu belum dapat terselesaikan oleh pemerintah, hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan horisontal ditengah masyarakat.

Berkaitan dengan sejumlah pihak yang menghendaki payung hukum regulasi untuk menyelesaikan permasalahan angkutan umum berbasis teknologi aplikasi, Komisi V DPR RI siap menyambut usulan dari pemerintah jika hendak melakukan revisi UU No.22 tahun 2009 tentang

Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Di bulan yang sama, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik terkait pengelolaan dana desa dan pendamping desa. Komisi Perhubungan ini pun melakukan kunjungan kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di daerah seperti mendorong pengembangan bandara di Bengkulu, mendorong pembangunan sarana dan prasarana bandara Haluoleo Kendari agar menjadi bandara alternatif Sultan Hasanuddin, dan menyoroti pembangunan teluk kendari

Di bulan April terjadi insiden tabrakan pesawat Batik Air dan Trans Nusa di bandara Halim yang disesalkan Komisi V DPR RI dan meminta Menteri Perhubungan mengevaluasi bandara Halim untuk penerbangan sipil. Selanjutnya, dalam memenuhi kebutuhan transportasi kereta api dalam negeri, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke PT. INKA di Madiun, Jawa Timur untuk mengetahui sejauhmana kesiapan sarana, prasarana serta sumber daya manusia PT.INKA dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang gencar membangun transportasi perkeretaapian nasional.

Berlanjut ke bulan Mei, Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR RI melakukan rapat bersama pakar guna mendapat masukan. Menurut salah satu pakar transportasi laut Capt. Asnar Sitompul menyoroti dari segi keamanan di laut yang merupakan titik awal dari pembangunan tol laut. Menurut Asnar bukan langsung membangun beberapa pelabuhan dan



foto : Andri/iw

Tim Kunker Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke PT. INKA di Madiun, Jawa Timur.

fasilitasnya serta membangun banyak kapal berbagai type, tetapi itu setelah Tol Laut nya lebih dahulu tertata rapi atau dilakukan bersamaan. Serta menginformasikan kaitannya dengan penataan ulang atau evaluasi alur-alur laut pelayaran yang menjadi tol laut yang akan dilalui oleh kapal-kapal yang akan dibangun itu dimana akan menambah jumlah lalu lintas laut.

Di Juni, berkaitan dengan hari kesiapan mudik lebaran 2016, Komisi V DPR RI melakukan sejumlah peninjauan kesiapan infrastruktur dan angkutan lebaran ke beberapa daerah, serta menargetkan *zero accident* saat mudik berlangsung. Di bulan yang

sama ini pula, Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena bersama Pemerintah dalam hal ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan 100 unit rumah khusus untuk Pimpinan Kelompok Keagamaan, Kepala Suku dan para Pelintas Batas di Jayapura, Papua.

Juli 2016, Komisi V DPR RI konsen pada proyek strategis pemerintah yaitu pembangunan bendungan Bendo di Ponorogo, Jatim guna menyuplai kebutuhan air baku yang kelak bisa dimanfaatkan untuk konsumsi dan irigasi tanaman pangan. Dibulan Agustus, dalam masa resesnya, Komisi V DPR RI melakukan kunker sejumlah wilayah, diantaranya Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Jawa Barat. Komisi V DPR RI pun berkesempatan meninjau pembangunan Terminal 3 ultimate Soetta. Bulan September, lebih banyak membahas anggaran mitra kerja Komisi V DPR RI serta pengawasan ke beberapa daerah. Bulan Oktober, November, dan Desember, Komisi V tetap intens melaksanakan fungsi pengawasan ke sejumlah daerah terutama di segi pembangunan infrastruktur khususnya yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, sambil tak lupa menyelesaikan RUU yang tengah dibahas Komisi V DPR RI dan dipertengahan Desember RUU Jasa Konstruksi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. ■

(nt)



foto : Naefuroji/iw

Komisi V DPR RI saat rapat kerja membahas anggaran dengan mitra kerja.



foto : Jaka/iw

Komisi VI DPR RI saat Rapat Kerja dengan mitra kerja.

## ◀◀ KOMISI VI DPR RI

# Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Menguntungkan Indonesia

**P**erjanjian perdagangan dan industri internasional menjadi topik penting pembahasan di Komisi VI DPR RI, pengkajian tersebut berlangsung pada Masa Persidangan II. Dalam sejumlah Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI selalu mempertimbangkan untung rugi dari perjanjian perdagangan internasional.

Komisi VI meninjau perjanjian perdagangan internasional yang tertulis dalam enam surat dari Presiden RI Joko Widodo. Pendalaman ini guna membahas enam surat tersebut perihal rencana ratifikasi. Pertama, tentang protokol perubahan terhadap persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.

Kedua, mengenai perdagangan jasa dalam persetujuan kerangka kerja sama ekonomi menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India. Ketiga, Persetujuan ASEAN mengenai petunjuk alat kesehatan.

Keempat, protokol perubahan ketiga terhadap persetujuan perdagangan barang di bawah persetujuan kerangka kerja sama ekonomi komprehensif di antara pemerintah negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

Kelima, protokol perubahan terhadap persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi komprehensif di antara pemerintah negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.

Keenam, protokol untuk melaksanakan komitmen paket kesembilan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di Bidang jasa.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, dalam hal perjanjian perdagangan internasional yang menimbulkan akibat luas yang mendasar dalam kehidupan rakyat, serta terkait dengan keuangan negara, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan

bahkan berwenang mengesahkan atau sebaliknya.

“Perjanjian internasional yang dapat membahayakan kepentingan nasional Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak atau setuju dengan perjanjian perdagangan internasional tersebut,” ungkap Azam.

Lebih tegas Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima mendesak agar perjanjian internasional harus menguntungkan Indonesia. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pejabat Kadin Bernadino dan Ratna Sari di ruang sidang Komisi VI.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, meminta kepada Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk mengetahui secara detail tentang untung rugi bagi Indonesia dalam melakukan perjanjian internasional. Pasalnya pengusaha-pengusaha nasional ada dalam ruang lingkup Kadin. Lembaga ini merupakan pelaku industri yang langsung merasakan dampaknya.

“Ini kan harus ditimbang sama

Kadin, yang lebih kuantitatif, kalau kita (Komisi VI) kan lebih politis. Teknokratik dan datanya Kadin yang lebih tahu,” ujar Aria.

Dia mengharapkan dalam perjanjian perdagangan internasional Indonesia tidak boleh merugikan, negara harus mendapat keuntungan. Aria juga memaparkan pentingnya pemangku kepentingan industri dan perdagangan nasional mengidentifikasi kemampuan Indonesia dalam memasuki perdagangan bebas.

“Kalau perjanjian ini mau ditandatangani posisi Indonesia akan mendapat keuntungan di sektor mana” tanya Aria kepada Kadin.



**Perjanjian internasional yang dapat membahayakan kepentingan nasional Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak atau setuju dengan perjanjian perdagangan internasional tersebut,**

Industri logam menjadi salah satu sektor yang diperhatikan Komisi VI dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional. Dalam rapat disimpulkan bahwa, industri logam menjadi kunci jalannya perindustrian mesin perkakas.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana meminta Kementerian Perindustrian untuk membuat persiapan secara matang agar industri logam dan baja nasional mampu menghadapi persaingan perdagangan internasional. Pasalnya dua industri tersebut saat ini dinilai belum mampu menghadapi persaingan perdagangan internasional.

Penilaian tersebut diungkapkan setelah Komisi VI DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (ASIMPI). “Pemerintah

perlu mempersiapkan. Pemerintah harus menyiapkan *road map* industri baja, industri logam,” pinta Azam.

### **Pemerintah Disarankan Ciptakan Kantong Pangan Nasional**

Guna mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan nasional, pemerintah disarankan untuk menciptakan kantong-kantong pangan nasional. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima, kantong pangan nasional di setiap daerah startegis bisa mengintegrasikan *supply and demand* pangan nasional.

“Maka pemerintahan Jokowi



foto: Rumi/iw

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI  
Azam Azman Natawijana

ini kalau akan melakukan target kedaulatan pangan, harus benar-benar mengintegrasikan *supply and demand* dalam konteks wilayah nasional. Dan membuat kantong-kantong pangan di setiap wilayah yang menjadi lumbung pangan di masing-masing daerah. Wilayah timur mana, wilayah tengah mana, wilayah barat, harus dibagi-bagi lagi. Itu yang saya kira mengenai capaian kedaulatan pangan dan harus terukur,” papar Aria di Nusantara I.

Untuk mengintegrasikan ketersediaan dan kebutuhan pangan nasional, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan kepada setiap kementerian yang berwenang untuk melakukan koordinasi secara kompak dan sinergis. Aria menilai koordinasi pada setiap pemangku kepentingan masih belum optimal.

“Yang penting itu koordinasi,

Bulog itu kerjanya apa dalam konsep swasembada pangan. Kan masuk lima program prioritas pemerintah, termasuk swasembada pangan. Perdagangan, perindustrian, pertanian ngapain, jadi disetiap benak masing-masing Dirut, itu harus ada mereknya. Harus ngapain poinnya. Saya melihat koordinasinya masih kurang,” tandas Aria.

### **Komisi VI Tegur Menkeu Soal Kewenangan Bahas PMN**

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005, pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) berada dalam ruang lingkup kewenangan Komisi VI DPR RI. Hal ini ditekankan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana, saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Deputi BUMN.

Azam menilai langkah Sri tidak tepat, karena telah menghadiri rapat kerja tentang suntikan dana ke BUMN atau Penyerahan Modal Negara (PMN) di Komisi XI beberapa waktu lalu. “Jadi semua aturan itu harus dibaca semua. Ini kekeliruan,” tegur Azam saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan yang mewakili Menteri BUMN, di ruang sidang Komisi VI, Nusantara I.

Sebenarnya Komisi VI sudah menyetujui dana PMN BUMN dan sudah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI Rp 54 triliun untuk 24 BUMN. Dana itu sudah masuk ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Namun secara tumpang tindih Komisi XI mengundang Menteri Keuangan untuk membahas PMN empat BUMN, yakni PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Krakatau Steel, dan PT Pembangunan Perumahan senilai Rp 9 triliun. Dasar hukumnya yakni PP Nomor 41 Tahun 2003.

Menanggapi peringatan tersebut Sri menjelaskan pada dasarnya, dia menghormati semua undangan komisi dan tidak mau memperkeruh suasana antar komisi. Ia mengatakan berusaha menindaklanjuti seluruh undangan yang dilakukan secara resmi.

“Saya tidak tahu bakal bahas ini, tapi izinkan saya jawab. Saya menghormati seluruh pimpinan, jadi seluruh lembaga-lembaga atau alat kelengkapan yang dituntut menjalankan legislatif. Saya menghormati pada komisi yang menjadi wakil rakyat,” ujar Sri menanggapi pertanyaan. ■

(eko)

## ◀◀ KOMISI VII DPR RI

# Pemerintah Dapat Ambil Alih Freeport Indonesia

**D**i awal tahun 2016 pemberitaan media diramaikan dengan isu akan berakhirnya kontrak karya PT. Freeport Indonesia (PT. FI) pada 2021 dan renegosiasi perpanjangan kontrak tambang di Papua sampai tahun 2041 yang sudah dilakukan. Terhadap masalah ini, Komisi VII DPR RI minta pemerintah bersikap tegas.

Menurut penilaian Komisi VII, jika hasil evaluasi Kementerian ESDM terhadap PT. FI lebih banyak kerugian, pemerintah diminta untuk tidak melanjutkan kontrak tersebut. Jangan sampai belum jelas status kontraknya, sudah diperdagangkan sahamnya. Oleh karena belum ada kejelasan mengenai kontrak tersebut, dewan berharap Kementerian BUMN tidak terburu-buru untuk membeli 10,64 persen divestasi saham yang ditawarkan PT. FI.

Dewan menilai, pemerintah sebenarnya dapat mengambil alih PT. FI tanpa membeli saham divestasi yang ditawarkan. Pengambilalihan oleh negara tersebut dapat terjadi jika pemerintah tidak memperpanjang kontrak selambat-lambatnya dua tahun sebelum kontrak habis, yaitu di tahun 2019.

Sebagaimana diketahui, penawaran saham tersebut merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. Dalam PP 77/2014 tersebut, PT. FI diwajibkan mendivestasi sahamnya sebesar 30 persen hingga tahun 2019. Saat ini, Indonesia memiliki 9,36 persen saham, sehingga secara bertahap PT FI mengajukan kembali penawaran saham sebesar 10,64 persen tersebut. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.

Kemudian, setelah masalah PT. FI



Anggota Komisi VII DPR RI saat mengunjungi PT Freeport Indonesia.

foto : Suci/iw

yang cukup menjadi perhatian Komisi VII DPR RI adalah masalah pemilihan skema operasi pada Blok Masela, apakah akan dilakukan dengan *offshore* dengan fasilitas pengolahan kilang terapung (FLNG) atau skema *onshore* dengan menggunakan pipa di darat.

Penilaian Komisi VII DPR RI, persoalan ini mestinya tidak terjadi jika tata kelola migas itu tidak seperti sekarang. UU Migas dianggap merusak industri LNG nasional. Mestinya dengan UU Nomor 8 Tahun 1971 hak untuk membangun pabrik LNG itu Pertamina, meskipun pendanaan tidak dari APBN.

Pertamina bisa menunjukkan otoriti kepada Bank bahwa ia memiliki cadangan agar Bank memberikan pinjaman dalam membangun pabrik LNG. Pertamina yang bangun pabrik LNG di Arun dan Badak, demikian pula setelah pabrik LNG selesai dibangun Pertamina juga yang mengoperasikan proses LNG itu, maka terbentuklah PT LNG Arun dan PT LNG Badak,

dibawah kekuasaan negara. Komisi VII menegaskan, industri LNG menjadi rusak dikarenakan UU Migas yang menghancurkan sistem itu. Sehingga yang membangun pabrik LNG adalah kontraktornya.

Dalam hal ini juga, dewan minta pemerintah bersifat terbuka terhadap masalah Blok Masela ini. Sebagaimana diketahui masalah Blok Masela sudah menjadi perdebatan yang cukup lama. Sudah sejak tahun 2008, namun sampai saat ini ternyata masih berlarut-larut juga. DPR RI sangat butuh kejelasan tentang Blok Masela ini.

Dari informasi yang didapat bahwa seluruh perencanaan telah diajukan kepada Presiden untuk diambil keputusan. Karena ini berkaitan dengan khalayak hidup orang banyak, kepentingan pembangunan bangsa dan negara terutama bagi masyarakat Maluku yang mengalami dampak langsung dari seluruh pengoperasian Blok Masela ini, dewan minta Menteri





foto : Jaka/iw



foto : Jaka/iw

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan PT Freeport Indonesia yang diwakili Presiden Direktur mengenai divestasi saham

ESDM memberikan dokumen terkait hal tersebut.

Kemudian, berkaitan dengan pemilihan on off nya itu sendiri apakah onshore ataupun offshore. Harapannya, setinggi-tingginya menguntungkan Indonesia dan mensejahterakan masyarakat Maluku secara khusus.

Setelah kasus PT. FI dan Blok Masela, ketiga adalah kasus PT. Lapindo Berantas yang berencana mengeksplorasi sumur minyak dan gas (migas) di Tanggulangin 1 (TGA-1), Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo pada Maret 2016. Hal tersebut menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan terutama korban lumpur atas bencana yang terjadi pada tahun 2006 lalu.

Tidak hanya masyarakat, Komisi VII DPR RI dengan keras menolak rencana tersebut dan minta pemerintah menghentikan rencana pengeboran tersebut, pasalnya kalangan politisi tidak mau bencana lumpur lapindo kedua terjadi.

Penolakan tersebut disampaikan saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menurut Komisi VII, kantong lumpur yang luasnya radius 3 Km dari pusat semburan dengan kedalaman 2.000 Km akan dibor kembali di Tanggulangin yang jaraknya antara 2 sampai 2,5 Km dari pusat semburan, itu berpotensi untuk terjadinya bencana kedua.

Komisi VII menyayangkan, SKK Migas telah mengeluarkan WP&B (Work Program and Budget) dan Pemerintah Daerah telah mengeluarkan ijin UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan

dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

Anehnya, ijin teknisnya dari Kementerian ESDM baru keluar belakangan. Seharusnya ijin teknis keluar terlebih dahulu. Ini logikanya terbalik, ijin teknis harus keluar terlebih dahulu sebelum ijin yang lain. Ijin teknis memungkinkan atau tidak. Dewan tidak tahu di teknis atau di lingkungan bahwa itu akan menimbulkan bencana atau tidak. Jangan tiba-tiba ijin komersial sudah keluar, UKL-UPLnya keluar, ijin teknisnya belakangan. Jangan sampai terulang kembali masalah Lapindo ini.

Komisi VII juga melihat pemerintah ragu pada beberapa elemen pemerintah, apakah itu Pemerintah Daerah atau SKK Migas yang telah mengeluarkan ijin. Komisi VII minta pemerintah realistis dan tegas walaupun sikap tersebut akan membawa resiko komersial bagi pemerintah.

Terkait reklamasi 17 pulau pantai

utara Jakarta juga dipertanyakan Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komisi VII DPR RI meminta gambaran menteri terkait rencana ini mengingat di sana ada dua pembangkit listrik yaitu PLTU Tanjung Priuk 3.200 megawatt dan PLTGU Muara Karang 1.600 Megawatt.

Komisi VII juga mempertanyakan bagaimana provokasi pemerintah. Karena kebetulan Presiden Jokowi adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, tentunya beliau mengetahui rencana reklamasi ini dan mungkin bahkan mendorong rencana ini. Prioritas presiden itu apa, beliau ingin jadi atau tidak. Jika jadi, bagaimana bentuk perintah itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Laksanakan atau tahan. Kita tidak bisa melaksanakan pembangunan tapi pada saat yang sama juga ada dampak lingkungan. ■

(sc)



foto : Jaka/iw

Komisi VII DPR RI saat Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait reklamasi 17 pulau pantai utara Jakarta.

## ◀ KOMISI VIII DPR RI

# Komisi VIII Selesaikan Beberapa RUU Terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Rakyat

**K**omisi VIII DPR RI yang berrmitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selama tahun 2016 telah berhasil menyelesaikan sejumlah RUU terkait pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

Beberapa perangkat perundang-undangan yang dibahas sejak 2014 hingga akhir tahun 2016 ini adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, penanganan fakir miskin Penyandang Disabilitas, Jaminan Produk Halal dan RUU Keuangan Haji. Dan saat ini Komisi VIII akan melakukan pembahasan atas RUU Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, dan RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU).

Selanjutnya pada masa sidang di tahun 2016 ini, Komisi VIII telah mengundang peraturan mengenai perlindungan anak, ditandai dengan Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Perppu disetujui dalam sidang paripurna, Oktober 2016, tanpa ada perubahan isi. Namun, pengesahan ini disertai catatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Gerindra sempat menolak pengesahan Perppu menjadi UU. Namun, setelah lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR RI, PKS akhirnya menyetujui dengan catatan.



foto : Jaka/iw

*Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI berjabat tangan dengan Pimpinan DPR RI usai Sidang Paripurna Pengesahan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.*

Sedangkan Gerindra tetap dalam posisi menolak. Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya, yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A.

Terbangun dalam sebuah sistem peridungan anak, baik sistem hukum dan kebijakannya (sistem kesejahteraan anak dan keluarga, sistem peradilan anak), dukungan sarana dan prasana yang berbasis pada sistem informasi dan data perlindungan anak menjadi sebuah keniscayaan yang harus terwujud. Sehingga antara Kementerian/ lembaga memiliki kejelasan tugas dan fungsi di dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik dalam preventif, penanganan dan rehabilitasi atau kuratif dalam sistem kerja yang terintegrasi, yang melibatkan berbagai Kementerian dan lembaga terkait,

antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, Rementierian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Penegak Hukum (Kepolisian, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, Kejaksaan, dll), KPAI dan berbagai *stakeholder* lainnya termasuk partisipasi masyarakat (LSM, Ormas, tokoh, dll).

## UU Penyandang Disabilitas

Selain itu Komisi VIII juga telah berhasil menyelesaikan revisi Undang-undang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas pada Maret 2016 lalu, secara bulat dan aklamasi. Pengesahan RUU tentang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-undang ini berarti Undang-undang No 4/1997 tentang Penyandang Cacat dinyatakan tidak berlaku lagi.



foto : Kresno/iw

Ketua Komisi VIII usai Rapat Paripurna revisi Undang-undang berkaitan dengan penyandang disabilitas menjadi Undang-Undang.

Revisi Undang-undang tentang Penyandang Cacat atau UU No 4/1997 menjadi UU Penyandang Disabilitas berawal dari sebuah keinginan bersama untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia.

Beberapa hal pokok yang menjadi pembaharu dalam semangat perwujudan keadilan dan kesetaraan di dalam undang-undang ini antara lain adalah semangat undang-undang yang berparadigma *right base* bukan lagi *charity base*, perluasan terminologi penyandang disabilitas dan ragam disabilitas, terpaparkannya upaya pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam 22 bidang. Selain itu, pelibatan pemerintah daerah secara eksplisit, serta adanya lembaga non struktural independen yang akan terlibat dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang yaitu Komisi Nasional Disabilitas.

### Belum Berpihak pada Pendis

Selanjutnya melalui fungsi tugas pengawasan di bidang pendidikan agama, Komisi VIII menyurati Lembaga Pendidikan Islam (Pendis) yang masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari Kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah belum menunjukkan keberpihakan pada lembaga Pendis. Sehingga aspek tata kelola mulai dari manajemen

pengelolaan lembaga pendidikan, SDM, sarana dan prasarana, juga belum memadai dan tidak optimal.

Kondisi ini juga diperparah dari aspek anggaran yang dirasa belum berkeadilan, dan berbagai permasalahan yang dialami oleh lembaga pendidikan Islam belum menjadi perhatian serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah.

Komisi VIII memandang disparitas anggaran masih tinggi antara lembaga pendidikan di bawah Kemenag dan Kemendikbud serta Kemenristekdikti. Anggaran untuk pendidikan agama Islam dalam struktur anggaran pendidikan pada APBN masih sangat kecil, Dari data Kementerian Agama

RI, alokasi anggaran pendidikan Islam selama 5 tahun terakhir selalu berada di kisaran angka 11%.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak, dampak dari minimnya anggaran tersebut, kebutuhan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam tidak mencukupi. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam, yang tujuannya memfokuskan pada pembahasan pengelolaan pendidikan Islam, mengidentifikasi berbagai persoalan lembaga pendidikan Islam, baik dari aspek kebijakan dan regulasi, anggaran, kelembagaan, SDM, dan tata kelola yang selanjutnya merekomendasikan alternatif solusi atas berbagai permasalahan tersebut.

Ini adalah sebagai wujud tanggungjawab dan kesadaran peran strategis lembaga pendidikan Islam, mulai dari pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, sampai perguruan tinggi, Keberadaan lembaga pendidikan Islam memiliki sejarah yang khusus terhadap pembangunan SDM Indonesia selama ini,. Apalagi lembaga pendidikan Islam juga terbukti telah melahirkan para pemimpin yang berkualitas.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan, Komisi VIII juga melakukan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke daerah-daerah tertentu yang berhubungan dengan Kementerian/ Lembaga mitra, sekaligus untuk menyerap aspirasi rakyat terkait bidang kerja. ■

(as)



foto : Iwan Armanias/iw

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja terkait Pendidikan Islam.

## ◀ KOMISI IX DPR RI

# Ratifikasi MLC, Perkuat Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Pelaut

Pada tahun 2016, Komisi IX DPR RI telah berhasil meratifikasi Rancangan Undang-Undang tentang Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat Paripurna Kamis (8/9).

Dengan diratifikasinya RUU tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum bagi kebijakan nasional dalam meningkatkan sistem perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja pelaut yang sifatnya mobile sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia.

Disahkannya Konvensi tersebut juga mencerminkan komitmen kuat bangsa Indonesia sebagai negara poros maritim, dengan jumlah tenaga kerja pelaut terbesar kedua setelah Filipina. Selain itu, akan lebih meningkatkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi sekitar 570.000 tenaga kerja pelaut Indonesia yang dimana sekitar 378.000 pelaut berlayar di kapal asing.

“Dengan meratifikasi konvensi ini, maka pemerintah dapat menyempurnakan sistem perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja pelaut dan awak kapal, serta menunjukkan kehadiran bagi seluruh warga negara yang bekerja di sektor maritim,” ujar Ketua Komisi IX Dede Yusuf M. Effendi saat menyampaikan sambutan dalam rapat Paripurna.

## Ringankan Beban Iuran

Pada Bulan Maret Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 19 tahun 2016. Perpres ini terfokus pada kenaikan iuran premi yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 1 April 2016.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi IX Dede Yusuf M. Effendi mengingatkan, iuran BPJS Kesehatan jangan sampai menjadi beban masyarakat.

Menurutnya, tujuan utama BPJS Kesehatan adalah meringankan rakyat atas biaya berobat. Karena itu, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan iuran. Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah melakukan tindakan preventif, promotif dan kuratif terlebih dahulu, bukan malah menaikkan iuran.

“Salah satu tindakan preventif dan promotif itu, misalnya dengan mendorong agar 155 jenis penyakit dapat diselesaikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sehingga pasien tidak perlu langsung ke RS. Hal ini dapat mengurangi penumpukan pasien di RS,” ujarnya.

Dengan maksud meringankan beban iuran yang ditanggung masyarakat, Komisi IX melakukan

berbagai upaya untuk mencari solusi yang berpihak kepada peserta mandiri BPJS Kesehatan. Dengan meminta pihak Menteri Kesehatan, Pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan serta Staf Ahli Menteri Keuangan, mengkaji peraturan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Melalu perdebatan panjang saat Raker pada tanggal 16 Maret dengan Pemerintah tersebut, akhirnya Pemerintah sepakat untuk tidak menaikkan iuran peserta kelas III, sehingga iuran tetap Rp 25.500.

Terkait keputusan itu, Dede mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah mendengar aspirasi masyarakat dan DPR RI khususnya Komisi IX. “Artinya ini merupakan *win-win solution* dari Pemerintah. Karena di dalam kesimpulan Komisi IX saat raker dengan Menkes, DJSN,



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf berjabat tangan dengan Menteri Kesehatan.

foto : Jayadi/iw



foto : Jayadi/iw

Raker Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan

dan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, salah satunya adalah Komisi IX mempertanyakan mengenai iuran peserta mandiri kelas III pada pasal 16F,” kata Dede

Namun, lanjut Dede, terlebih dahulu DPR RI akan melihat setelah Perpres berjalan. Jika ada peraturan yang memberatkan masyarakat, maka Komisi IX akan mengevaluasi Perpres tersebut.

“Dalam kurun waktu berjalannya peraturan ini, kita bisa melakukan rekomendasi-rekomendasi, karena kita tidak dapat mencabut Perpres tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi, apalagi Panja BPJS Kesehatan belum selesai,” ungkap Dede.

### Berantas Vaksin Palsu

Pada pertengahan Juni 2016, publik dikejutkan oleh terbongkarnya kasus vaksin palsu. Dari hasil penyidikan Bareskrim Polri, ditemukan adanya penawaran vaksin impor tertentu yang bukan vaksin program dari pemerintah dengan harga yang lebih murah. Bareskrim menetapkan 14 rumah sakit dan 8 klinik atau bidan yang telah menerima distribusi vaksin palsu tersebut.

Merespon kasus peredaran vaksin palsu tersebut, Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Palsu, yang kedepan bertujuan mengeluarkan output rekomendasi yang mampu menutup semua celah peredaran obat dan vaksin palsu.

Komisi IX sudah memanggil seluruh

**Komisi IX dalam rapatnya meminta kepada Kemenkes dan Bareskrim Porli untuk menarik semua vaksin yang saat itu beredar.**

pemangku di bidang kesehatan, seperti Menteri Kesehatan, Kepala Badan POM, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Farmasi Indonesia, Bareskrim Porli. Untuk menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya, termasuk proses produksi dan distribusi vaksin palsu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas).

“Komisi IX dalam rapatnya meminta kepada Kemenkes dan Bareskrim Porli untuk menarik semua vaksin yang saat itu beredar dan mengganti dengan vaksin yang asli dan aman guna menjamin keamanan dan perlindungan kesehatan bayi-balita Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Saleh P. Daulay.

Selain itu, Komisi IX juga mendesak Badan Pengawasan Obat dan Makanan lebih agresif dalam mengawasi distribusi vaksin dan obat-obatan pada umumnya. Bahkan Komisi IX akan membentuk RUU untuk memperkuat BPOM dalam menjalankan tugasnya.

“Pengawasan terhadap pengelola limbah medis di rumah sakit juga merupakan salah satu hal yang perlu di sorot dalam kasus vaksin palsu,

Semua harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Saleh. Pelaku juga harus diberikan hukuman berat, sesuai ketentuan yang diatur UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### Amandeman UU 39/2004

Kekerasan dan pelecehan seksual masih terus dialami para pahlawan devisa negara Indonesia. Menanggapi hal itu, Komisi IX melakukan revisi Undang-undang No 39 tahun 2004 untuk menambah perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

“Komisi IX sedang melakukan amandeman UUD 39 yang menitik beratkan kepada perlindungan serta mendorong tenaga kerja formal dan terampil mendapatkan posisi yang lebih baik,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Ermalena.

RUU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) menitikberatkan kepada perlindungan dan keamanan mulai dari dokumentasi, pendataan, asuransi sampai pekerja berada di lokasi dan kembali lagi ke Indonesia. Inilah esensi dari RUU PPILN yang sedang dibentuk. “Kami berharap RUU PPILN tidak hanya memberikan perlindungan dan keamanan bagi TKI tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan harus termonitor oleh pemerintah melalui pelatihan-pelatihan program bersama pemerintah di daerah. “Kontroling harus terus dilakukan,” ungkapnya. ■

## ◀◀ KOMISI X DPR RI

## Dorong Empat Sukses Asian Games XVIII

**K**omisi X DPR RI, atau yang dikenal dengan Komisi Pendidikan atau Komisi Olahraga, menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi Dewan. Mengawali tahun 2016, Komisi X membentuk Panitia Kerja (Panja) Persiapan Asian Games XVIII (Panja PAG XVIII), guna mengawal dan mengawasi persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018.

Panja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya (F-PD) itu telah bekerja dari Januari hingga Juli 2016. Beberapa persoalan yang muncul antara lain lambannya terbitnya payung hukum, revisi susunan Panpel INASGOC pasca kepengurusan KOI periode 2015-2019 terbentuk, persoalan *broadcasting fee* sebesar US\$ 30 juta, dan penggunaan dana sosialisasi persiapan AG XVIII secara serentak di beberapa kota di Indonesia yang dikhawatirkan ada potensi kerugian uang negara.

“Melihat persoalan-persoalan itu, pembentukan Panja PAG XVIII ini bertujuan untuk mendukung tercapainya ‘empat sukses AG XVIII’ yaitu sukses administrasi penyelenggaraan, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi olahraga, dan sukses pemberdayaan ekonomi,” kata politisi asal dapil Aceh itu.

Di bidang pendidikan, Komisi X juga membentuk Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Sarjana Mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). Ketua Panja Beasiswa dan SM3T, Ferdiansyah (F-PG), mengatakan pihaknya menemukan bahwa satuan biaya pendidikan sebesar Rp 600 ribu per bulan/mahasiswa, sejak tahun 2010 tidak ada peningkatan. Satuan biaya pendidikan ini dinilai terlalu rendah terhadap kebutuhan hidup mahasiswa per bulan.

“Panja meminta kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan program



Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya didampingi Anggota Komisi X meninjau lokasi Pacuan Kuda di Pulomas, Jakarta Timur.

foto : Azka/iw

beasiswa dengan tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan,” tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Masih dalam bidang yang sama, terkait rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy untuk menghapus Ujian Nasional (UN) pun mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (F-Gerindra). Ia menilai, selama ini kurikulum yang digunakan tidak terpusat pada pemerintah tetapi pada satuan pendidikan masing-masing yaitu sekolah.

“Jika kurikulum di buat sekolah otomatis kemampuan siswa di setiap sekolah akan berbeda, namun kenapa pemerintah selama ini masih campur tangan apalagi mengadakan evaluasi penentu kelulusan. Padahal kurikulum dibuat oleh guru yang lebih paham karakteristik siswanya,” kritisi politisi asal dapil Jambi itu.

**Perlu Kajian Mendalam untuk FDS**

Gagasan Full Day School (FDS) yang pernah diwacanakan Mendikbud pun mendapat respon pro dan kontra dari publik. Anggota Komisi X Dadang Rusdiana (F-Hanura) mengungkapkan, perlu ada kajian yang mendalam dan menyeluruh. Menurutnya, perlu dilihat kesiapan siswa menghadapi perubahan ini, termasuk sekolah dan tenaga pendidik. Setelah mendapat kritik tajam dari banyak pihak, akhirnya Mendikbud membatalkan gagasan itu.

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan) menyatakan infrastruktur pendidikan di Indonesia dalam kondisi parah. Ia miris melihat jumlah sekolah rusak berbagai tingkatan di seluruh wilayah Indonesia. Ia mencatat, setidaknya hampir 1,3 juta sekolah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, berat hingga total. Sementara sekolah yang dikategorikan baik, jumlahnya kurang dari 500 ribu sekolah.

Terkait rumor masih adanya perpeloncoan pada saat Masa Orientasi

Siswa (MOS), Anggota Komisi X Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra) meminta agar pada saat orientasi penerimaan siswa baru tahun 2016 tidak ada lagi perploncoan. MOS harus menjadi ajang untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada murid baru.

Penindakan hukum kepada guru pun mendapat sorotan Komisi X. Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati (F-PPP) menyayangkan dan merasa prihatin atas putusan Majelis Hakim PN Sidoarjo, Jawa Timur terhadap Samhudi, guru yang bertugas di SMP Raden Rahmat, setelah dilaporkan orangtua siswa karena mencubit siswanya yang bernama Arif. Diketahui, majelis hakim PN Sidoarjo menjatuhkan vonis tiga bulan hukuman penjara dengan masa percobaan enam bulan terhadap guru SMP itu.

“Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan vonis tersebut. Semestinya majelis hakim menerapkan keadilan substantif terhadap Guru Samhudi. Toh, diantara kedua belah pihak yakni orang tua dan guru telah terjadi islah atau perdamaian,” sesal politisi asal dapil Jabar itu.

Sementara, terkait kekerasan yang menimpa Dasrul, guru SMK Negeri 2 Makassar, Sulawesi Selatan oleh wali murid, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana (F-Gerindra) menilai, hal ini

menunjukkan tidak adanya komunikasi antara sekolah dan wali murid. Ia juga menyayangkan kasus seperti ini terus menerus terjadi.

Dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional tahun 2016, Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam (F-PG) mempunyai keinginan besar agar kesejahteraan guru bisa lebih baik lagi di masa akan datang. Mengingat, guru adalah pihak yang paling berjasa bagi kehidupan manusia di masa akan datang.

### Pariwisata Harus Menjadi Sumber Penerimaan Negara

April 2016, Komisi X membentuk Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata. Latar belakang dibentuknya panja ini adalah adanya pembangunan pengembangan pariwisata Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pilar penerimaan devisa Negara hingga mampu mencapai posisi ketiga selain minyak dan gas, serta kegiatan ekspor dan perdagangan jasa.

Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Fiqih (F-PKS) mengatakan dirinya berharap pembangunan pengembangan pariwisata menjadi pilar penerimaan devisa negara, dan menjadi posisi ketiga setelah kegiatan ekspor impor dan perdagangan jasa.

Wisata religi, yang dikembangkan oleh Kemenpar pun mendapat

dukungan dari Komisi X. Anggota Komisi X Bambang Sutrisno (F-PG) menilai, Indonesia memiliki potensi wisata religi yang tidak kalah dengan negara tetangga. Namun ia mendorong, agar potensi ini terus dikembangkan, sehingga mampu bersaing.

### Genjot Legislasi

Pada bidang legislasi, tahun ini Komisi X sedang menyusun Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan. Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti (F-PDI Perjuangan) mengatakan, RUU Sisbuk merupakan merupakan usaha negara untuk menyusun kebijakan dan sistem perbukuan secara komprehensif sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan buku dengan mudah serta tanpa diskriminasi.

Terkait perbukuan dan minat baca masyarakat, Anggota Komisi X Dony Ahmad Munir (F-PPP) menegaskan, perlu ada perubahan revolusioner pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga perpustakaan betul-betul digemari masyarakat, minat baca meningkat, dan profesi pustakawan menjadi profesi dambaan. Apalagi, dibanding negara lain, minat baca masyarakat masih rendah.

Anggota Komisi X Marlinda Irwanti (F-PG) menilai, rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda disebabkan oleh faktor globalisasi. Ia mengusulkan, budaya minat membaca bisa dimulai dari keluarga. Mengingat, keluarga merupakan orang terdekat buat si anak.

RUU Kebudayaan pun digenjot pembahasannya oleh Komisi X, agar segera dapat disahkan. Anggota Komisi X Mujib Rohmat (F-PG) mengatakan, RUU ini merupakan salah satu elemen dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Dengan adanya RUU ini, juga menjadi upaya melestarikan kebudayaan sebagai perekat dari kesatuan bangsa. Mengingat Indonesia memiliki kebudayaan yang cukup banyak sehingga juga turut serta dalam membangun kebudayaan dunia. ■



foto : Rizka/iw

Tim Komisi X DPR RI meninjau kegiatan belajar mengajar di SDN 78 Manado, Sulawesi Utara.

## ◀ KOMISI XI DPR RI

# Rotasi Pimpinan Komisi XI

**K**ursi pimpinan Komisi XI DPR RI sempat mengalami banyak perubahan di awal tahun. Ketua sebelumnya yang pernah diduduki Fadel Muhammad (F-PG), dirotasi dua kali. Pengganti Fadel adalah Ahmadi Noor Supit yang sebelumnya memimpin Badan Anggaran DPR RI. Supit juga kemudian diganti lagi oleh Melchias Marcus Mekeng.

Kursi Wakil Ketua Komisi XI juga sempat mengalami pergantian. Supriyatno (F-Gerindra) menggantikan Gus Irawan. Dan Wakil Ketua dari F-PAN Jon Erizal diganti oleh Achmad Hafizs Tohir. Tak hanya di kursi pimpinan, di kursi anggota juga tampak wajah-wajah baru hasil *rolling* setiap fraksi.

## Komisi XI Pertanyakan Protokol VI

Protokol VI tentang kerja sama jasa keuangan dan non keuangan dengan negara-negara ASEAN dipertanyakan Komisi XI. Pasalnya, protokol ini berisi liberalisasi sektor keuangan yang belum dimengerti DPR RI. Pengajuan protokol VI oleh pemerintah untuk disetujui DPR RI ini, dinilai Komisi XI sangat tiba-tiba. Sementara Protokol I-V saja belum pernah diketahui. Akhirnya, Komisi XI pada 18 Januari 2016 memanggil Menkeu, Mendag, dan Gubernur BI.

Fadel Muhammad yang ketika



Fadel Muhammad (tengah) ketika terpilih menjadi Ketua Komisi XI DPR RI

itu masih menjadi Ketua Komisi XI menyampaikan, “Pada rapat kerja kali ini, Komisi XI ingin mendengar penjelasan Menteri Keuangan mengenai rencana ratifikasi tersebut.” Di hadapan Komisi XI, Menkeu menjelaskan, yang diminta ratifikasi adalah Protokol AFAS (ASEAN Framework Agreement of Services) putaran keenam. Protokol ini berisi paket komitmen bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa.

AFAS sendiri sudah ditandatangani

pemerintah pada 1995 di Bangkok, Thailand. Tujuannya meliberalisasi perdagangan jasa, termasuk jasa keuangan dan meningkatkan kerja sama ekonomi ASEAN. Liberalisasi jasa keuangan ASEAN, lanjut Menkeu, merupakan bagian dari tujuan ASEAN menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk meratifikasi protokol ini, pemerintah harus meminta persetujuan DPR RI seperti diamanatkan konstitusi.

Topik ini menjadi perbincangan hangat di kalangan Anggota Komisi



foto : Arief/iw



foto : Arief/iw

Pergantian pimpinan di Komisi XI DPR RI



XI. Liberalisasi sektor jasa tentu akan mereduksi peran pemerintah untuk memberi perhatian yang serius bagi pengembangan ekonomi rakyat. Badan Keahlian DPR RI sendiri dalam kajiannya merilis, protokol ini akan berdampak luas bagi kehidupan rakyat, terutama pada tatanan ekonomi dan perbankan yang ada di Indonesia.

### **Komisi XI Rampungkan RUU PPKSK**

Komisi XI DPR RI lewat Panja RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan akhirnya menyelesaikan draf RUU yang kemudian diberi nama UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Setelah melawati pembahasan maraton, UU ini terdiri dari 9 bab dan 59 pasal. Rumusan pasal-pasal RUU PPKSK lebih jelas dan terarah daripada UU JPSK.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tetap diatur dalam Bab II RUU ini. Dalam Pasal 4, KSSK yang beranggotakan Menkeu, gubernur BI, ketua OJK, dan ketua LPS, menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis



foto : Arief/iw

*Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang habis masa tugasnya pada September lalu. Komisi XI DPR RI memilih Bahrullah Akbar dari 22 nama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Setelah mendengarkan paparan semua calon, Komisi XI DPR RI menggelar voting. Dan Bahrullah mendapat 30 suara, disusul Abdul

anggota Komisi XI sendiri berharap, Bahrullah bisa melanjutkan kinerja baiknya di BPK. Dia petahana yang tahu betul pekerjaan di lingkungan BPK.

### **RUU Pengampunan Pajak Disahkan**

Satu lagi UU krusial dan penting dilahirkan oleh Komisi XI DPR RI yang kemudian disahkan rapat paripurna. Inilah UU yang sempat menuai kritik tajam. Namun, akhirnya mampu diselesaikan pada Agustus 2016. Setelah disahkan menjadi UU, tiga Peraturan Menteri Keuangan pun menyusul sebagai aturan turunannya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) mengungkapkan, ada aset yang sedang dikejar pemerintah dan tersimpan di luar negeri sebesar Rp 11.400 triliun. Aset besar ini menjadi perbincangan hangat menyertai UU Pengampunan Pajak. Menurut Hafisz, tidak semua aset bisa dibawa pulang ke Tanah Air, karena asetnya ada yang berupa obligasi, surat utang, dan properti.

Butuh proses waktu yang cukup panjang untuk mencairkan aset-aset seperti itu. Pemerintah pun, lanjut Hafisz, perlu menjelaskan lebih detail prediksi riil repatriasi aset dari luar negeri ke dalam negeri. Ketika itu, Hafisz mempertanyakan perlakuan pemerintah terhadap repatriasi di luar negeri dan di dalam negeri. Masalah terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah harus meyakinkan publik bahwa aset yang sudah berhasil ditarik ke dalam negeri, tidak lari lagi ke luar negeri. ■

(mh)



foto : Azka/iw

*Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.*

keuangan untuk ketahanan negara di bidang perekonomian. Pasal 5 dan 6 merumuskan tugas dan wewenang KSSK. Ia bertugas menetapkan penanganan krisis keuangan dan menetapkan pula penanganan permasalahan bank sistemik dalam kondisi normal maupun krisis.

### **Bahrullah Akbar Jadi Ketua BPK**

Lewat mekanisme voting dalam rapat tertutup, akhirnya terpilih satu nama untuk mengisi keanggotaan

Latif 17 suara, dan Anggito Abimanyu 9 suara. Bahrullah sendiri sebelumnya adalah Anggota BPK dan ia terpilih kembali untuk periode 2016-2021. Voting digelar malam hari. Rapat baru dinyatakan terbuka untuk umum saat penghitungan suara dimulai sekitar pukul 21:30 WIB.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menuturkannya, karena tak tercapai mufakat untuk memilih satu nama, akhirnya rapat memutuskan mengambil jalan voting. Kalangan



foto : Dok/iv

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menghadiri Sidang OECD Global Parliamentary Network.

## ◀◀ BKSAP DPR RI

# BKSAP DPR Perjuangkan Sejumlah Resolusi dan Rekomendasi

**T**ugas Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagaimana Pasal 75 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR RI salah satunya adalah mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

Di bawah ini beberapa prestasi delegasi BKSAP (delegasi Indonesia) di berbagai pertemuan dan sidang organisasi parlemen di dunia, seperti Sidang Tahunan Forum Konferensi Parlemen Negara-negara OKI (PUIC), Sidang ke-4 OECD Parliamentary Days, Sidang Kesehatan Dunia, pertemuan ASEAN Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-8, dan lain-lain.

Pada sidang tahunan Forum

Parlemen Asia Pasifik (APPF) ke-24 di Vancouver, Kanada, yang resmi ditutup pada tanggal 20 Januari 2016 delegasi DPR RI menggolkan Resolusi Kejahatan Transaksional dan Pekerja Migran.

Resolusi ini berhasil dicapai setelah melalui dinamika pembahasan, dimana tujuh rancangan resolusi yang diajukan Indonesia diterima oleh forum. Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor dua resolusi tambahan yaitu keterwakilan perempuan dalam politik dan pemberantasan terorisme.

Dari ketujuh usulan Indonesia, rancangan resolusi mengenai kejahatan transaksional dan pekerja migran menjadi catatan tersendiri. Poin-poin untuk mendorong praktek *Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing* sebagai bentuk kejahatan transaksional dapat diterima oleh Forum setelah melalui perdebatan baik di drafting committee maupun working group.

Di Konferensi Parlemen Negara-negara OKI (PUIC/Parliamentary

*Union of OIC Countries*) ke-11 di Baghdad, Irak yang berlangsung pada tanggal 20 sampai dengan 26 Januari 2016, delegasi parlemen Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak OKI agar lebih responsive terhadap terorisme, terutama yang dilakukan ISIS.

Menurut Fahri, ISIS merupakan masalah nyata dan terang benderang yang tengah dihadapi masyarakat global. ISIS menyorot kemanusiaan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Label Islam pada ISIS sungguh sangat merendahkan harkat dan martabat Islam dan penganutnya.

Sementara itu, di Sidang ke-4 OECD Parliamentary Days di Paris, Prancis pada tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2016, pada sesi "World Energy Outlook", delegasi Indonesia menggarisbawahi pentingnya negara-negara dunia untuk mematuhi *Paris Agreement* yang disepakati dalam COP21 tahun lalu di Paris.

Indonesia menekankan pentingnya untuk mempromosikan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dipaparkan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak sumber energi alternatif yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti geothermal, tenaga air, tenaga matahari dan biofuel.

Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan dari Asia yang menghadiri acara ini. Dengan menyampaikan sejumlah intervensi dalam beberapa agenda, kehadiran Delegasi DPR RI telah ikut memberikan kontribusi

BKSAP pada Sidang Parlemen Dunia (*Inter Parliamentary Union/IPU*) yang berlangsung pada tanggal 13-14 Juni 2016 di Jenewa, Swiss menyerukan kepada organisasi parlemen sedunia untuk mendesak *World Trade Organization (WTO)* agar memberikan porsi lebih bagi keterwakilan perempuan baik dalam proses negosiasi maupun dalam kesepakatan yang dihasilkan.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 58 parlemen dan organisasi internasional ini, Indonesia

yang seimbang bagi setiap komponen masyarakat.

Pada Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA)* yang diselenggarakan 25 sampai dengan 29 Juli 2016 di Pakistan, BKSAP DPR RI mengutus dua anggota untuk menghadiri Sidang tersebut.

Delegasi Indonesia pada sidang APA ini akan konsisten memperjuangkan berbagai isu politik, perdamaian dan keamanan, sosial dan kebudayaan, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta masalah energi sebagaimana hasil keputusan dalam sidang pleno kedua APA di Teheran, Iran, November 2007 untuk penguatan negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Delegasi DPR RI dalam pertemuan *ASEAN Parliamentary Assembly (AIPA)* Caucus ke-8 di Laos, menegaskan pentingnya keberlangsungan dialog *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of Migrant Workers* untuk memiliki tenggat waktu spesifik guna menyelesaikan persoalan perlindungan pekerja migran di ASEAN.

Sebagaimana diketahui, dialog mengenai perlindungan pekerja migran di ASEAN ini sendiri belum mencapai konsensus, meskipun *ASEAN Committee of Migrant Workers (ACMW)* telah menyelenggarakan 15 putaran perundingan sejak tahun 2009 dikarenakan adanya perbedaan kebijakan masing-masing negara. ■



foto: Iwan Armanias/iw

Perwakilan BKSAP DPR RI menghadiri sidang *Inter Parliamentary Union (IPU)* ke 134 di Lusaka, Zambia.

dan memperkaya jalannya diskusi serta kian mempererat hubungan antara DPR RI dengan OECD sebagai organisasi internasional yang kerap bekerjasama dengan pemerintah Indonesia.

Sedangkan, pada pertemuan *Parliamentary Session on 69<sup>th</sup> World Health Assembly (Sidang Kesehatan Dunia)* di Jenewa, 26 Mei 2016. Delegasi DPR RI Siti Hediati Soeharto memaparkan dukungan DPR RI dalam pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia telah memiliki Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari Panja MDGs pada tahun 2010-2015.

Setiap tahunnya tim Panja mengeluarkan rekomendasi yang antara lain menekankan perlunya pembentukan sebuah mekanisme bersama oleh pemerintah untuk kolaborasi dan kerjasama antar stakeholder demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, prestasi delegasi

menyerukan agar isu gender ditempatkan sebagai konsideran saat juru runding WTO melakukan proses negosiasi sehingga keputusan yang diratifikasi memberikan dampak



foto: Dok/iw

Delegasi BKSAP DPR RI dalam Sidang IPU di Jenewa, Swiss.

## ◀ BADAN LEGISLASI DPR RI

# Selesaikan Pembahasan 17 RUU

**H**ingga akhir Oktober 2016, DPR RI telah mengesahkan 17 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2016. Dari 17 RUU, 9 RUU merupakan RUU Prioritas dan 8 RUU merupakan RUU Kumulatif Terbuka. Sementara, 19 RUU dalam tahap pembicaraan tingkat satu. 3 RUU telah selesai harmonisasi di Badan Legislasi, 4 RUU dalam tahap harmonisasi dan 15 RUU dalam tahap penyusunan.

Sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah menentukan 40 RUU yang akan dibahas pada tahun 2016. Namun, pada perkembangannya beberapa RUU masuk dalam daftar Prolegnas 2016. Sehingga pada bulan Juni lalu, DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melakukan perubahan Prolegnas RUU Prioritas 2016 bertambah menjadi 50 RUU (30 RUU usul DPR RI, 18 RUU usul Pemerintah dan 2 RUU usul DPD).

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan untuk mempercepat kinerja legislasi, Baleg selalu melakukan koordinasi dengan Komisi maupun Panitia Khusus (Pansus) untuk mengetahui kendala



foto : Naefuroji/iw

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI menandatangani Draf Revisi Terbatas RUU ASN.

apa saja yang menjadi hambatan dalam pembahasan RUU.

Diakui politisi dari F-Gerindra itu, beberapa faktor internal maupun eksternal turut mempengaruhi proses pembahasan RUU sehingga menjadi lambat. Di internal DPR RI, lanjutnya, capaian kinerja legislasi

sangat bergantung pada tingkat kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga diperlukan kemampuan profesional anggota dan staf secara kolektif.

“Perkembangan Baleg dalam melakukan harmonisasi sudah maksimal dilakukan, namun menyangkut kinerja legislasi DPR RI ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh,” ungkapnya.

Selain itu, ia menekankan pencapaian kinerja legislasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh DPR RI. Meskipun, DPR RI mempunyai kekuasaan membuat Undang-Undang, namun pembahasannya harus dilakukan bersama pemerintah. Artinya, semua undang-undang yang dibuat harus melalui tahapan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden.

Dengan demikian, kinerja legislasi tidak semata-mata berada di pundak DPR RI, namun juga merupakan andil dari Pemerintah.



foto : Kresno/iw

Suasana pembahasan RUU di Baleg.



foto : Kresno/iw

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

“Ibarat pertandingan sepak bola, maka kesuksesan tim bukan ditentukan oleh kepewasaan perseorangan semata, tetapi bagaimana tim tersebut dapat berkerja sama dengan baik sehingga menghasilkan kemenangan,” tandas politisi dari dapil Sulawesi Tengah itu.

Di sisi lain, baik buruknya kinerja legislasi ditentukan oleh beberapa variable, diantaranya memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dimana kualitas undang-undang seharusnya lebih penting daripada sederet angka. ■

(ann, mp)

## RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU TAHUN 2016

JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	DPR RI	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23-2-2016.
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang Kerjasama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan.	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1-3-2016. <b>Kumulatif Terbuka</b>
RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerjasama di Bidang Pertahanan.	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1-3-2016. <b>Kumulatif Terbuka</b>
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	DPR RI	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15-3-2016.
RUU tentang Penyandang Disabilitas.	DPR RI	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17-3-2016.
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (PPSK).	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17-3-2016.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2-6-2016.
RUU tentang Pengampunan Pajak.	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28-6-2016.
RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28-6-2016. <b>Kumulatif Terbuka.</b>
RUU tentang Paten.	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28-7-2016.
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30-8-2016. <b>Kumulatif Terbuka.</b>
RUU tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2016)	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 8-9-2016. <b>Kumulatif Terbuka.</b>
RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12-10-2016. <b>Kumulatif Terbuka.</b>
RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim.	DPR RI	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 19-10-2016. <b>Kumulatif Terbuka.</b>
RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27-10-2016.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik.	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27-10-2016.
RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 26 -10 -2016. <b>Kumulatif Terbuka.</b>



foto : IwanArmanias/iw

Suasana kopi darat dengan admin media sosial dan website lembaga negara .

## ◀◀ BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DPR RI

# BURT DPR RI Dorong Wujudkan Parlemen Modern, Berwibawa dan Kredibel

**B**adan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong terwujudnya Visi untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan yang *Modern, Berwibawa dan Kredibel*.

Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019 dibentuk berdasarkan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Adapun misi dalam Renstra yaitu menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah.

BURT ingin mempercepat terwujudnya DPR RI yang modern,

berwibawa dan kredibel sesuai dengan visi dan misi yang sudah disepakati. Oleh karena itu, BURT memandang Lembaga DPR RI yang *modern* harus didukung oleh sebuah *supporting system* berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga publik mengetahui kinerja Anggota Dewan secara *real time*.

Dalam mewujudkan lembaga DPR RI yang berwibawa ini, juga terkait dengan perilaku dan akhlak para Anggota Dewan agar bisa menjadi contoh, dan perlu komitmen bersama.

Lebih lanjut, dalam menghadapi era keterbukaan informasi, DPR RI sudah bergerak ke arah yang lebih *modern* dan interaktif dengan masyarakat. Hal ini tidak bisa dihindari karena informasi sudah lebih banyak sumbernya.

Dalam kaitan ini, DPR RI mengadakan Kopi Darat dengan admin media sosial

dan *website* lembaga negara pada pertengahan Oktober di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kondisi saat ini dalam menggali informasi lebih banyak sumbernya untuk mengetahui kegiatan lembaga, perusahaan dan perorangan karena semakin majunya teknologi, tidak bisa dihindari.

DPR RI berkepentingan untuk memberikan berita yang informatif untuk menjadi lembaga yang kredibel. Tentunya DPR RI berkepentingan bahwa kegiatan yang dilakukan lembaga itu akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Itu juga merupakan salah satu visi misi DPR RI dalam lima tahun untuk menjadi lembaga yang *modern* berwibawa dan kredibel.

Peran media sosial yang dimiliki kementerian dan lembaga memiliki fungsi dalam memberitakan hal sesuai dengan fakta yang terjadi. Di DPR

RI sudah ada TV Parlemen, Official Twitter dan Facebook serta majalah. Dan DPR RI berkeinginan untuk menyampaikan hal yang benar dengan benar dan yang baik dengan yang baik.

Dengan adanya media internal DPR RI, diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan DPR RI. Dengan adanya medsos ini diharapkan terjadi interaksi dengan masyarakat yang membaca dan yang memberitakan.

pada aturan main eksekutif. Bahkan, untuk urusan pegawai, parlemen juga punya independensinya.

Selama DPR RI belum memiliki kemandirian dan independensi, selama itu pula semua urusan rumah tangganya dikendalikan pemerintah.

Sementara berbicara Renstra DPR RI, masyarakat perlu banyak mengetahui capaian yang sudah dihasilkan para Anggota Dewan. Renstra merupakan acuan strategi dan

rencana kerja DPR RI, sehingga perlu dibuat Renstra 2017-2019 agar kinerja DPR RI terukur. Masyarakat juga bisa menilai dan mengawasinya. Salah satu strategi dalam mempublikasikan Renstra DPR RI adalah dengan memberdayakan media publikasi yang dimiliki DPR RI sekaligus dapat membantu masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan para wakil rakyat di kompleks Parlemen Senayan. ■

(as)



foto : IwanArmanias/iw

Penetapan Pimpinan BURT DPR RI.

Terlebih DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat menjadi tempat bagi masyarakat untuk saling mengadu terhadap kejadian yang terjadi di daerah. Sehingga BURT memandang peran kehumasan menjadi lebih penting. DPR RI bagaimanapun adalah lembaga wakil rakyat, tempat mengadunya rakyat terhadap segala sesuatu yang terjadi di daerah.

### Mandiri dan Independen

BURT DPR RI menginginkan Lembaga legislatif yang juga lembaga perwakilan rakyat ini mandiri dan independen mengelola sistem anggaran dan kepegawaiannya. Kemandirian dan independensi parlemen menjadi keniscayaan. BURT menganggap Lembaga Legislatif bukan bawahan eksekutif yang harus taat



foto : IwanArmanias/iw

Tim BURT DPR RI meninjau pembebasan lahan di Wisma DPR RI, Cisarua, Bogor.



**BURT menganggap Lembaga Legislatif bukan bawahan eksekutif yang harus taat pada aturan main eksekutif. Bahkan, untuk urusan pegawai, parlemen juga punya independensinya.**

## MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI

# MKD Terus Akomodatif Merespon Aduan

**M**a h k a m a h Kehormatan Dewan (MKD) sebagai suatu lembaga yang dibentuk untuk menjaga martabat dewan terus melakukan sikap akomodatif terhadap aduan yang masuk baik itu dari masyarakat, lembaga ataupun dari dewan itu sendiri. Hal ini sebagai komitmen dalam membangun lembaga yang kredibel dan taat pada aturan hukum.

Sepanjang tahun 2016, MKD terus melakukan sikap akomodatif terhadap berbagai laporan yang masuk. MKD pun bersama Badan Kehormatan DPRD Provinsi seluruh Indonesia telah mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Lembaga Kehormatan Dewan (ALKD). Asosiasi ini diharapkan memberikan

manfaat bagi upaya penegakan etika lembaga perwakilan di masa yang akan datang.

“Hari ini, Pimpinan MKD DPR RI dan seluruh perwakilan DPRD Provinsi menandatangani sebuah Deklarasi untuk mengekspresikan dan tekad bersama, bahwa kita adalah satu, kita adalah Parlemen. Sekali bersatu kita tidak mau dipisah-pisahkan,” ujar Surahman Hidayat yang saat itu menjabat sebagai Ketua MKD.

Oleh karenanya, Asosiasi ini harus ada yang bisa dihasilkan. Surahman mengatakan, yang perlu segera dilakukan antara lain konsolidasi organisasi dan administrasi, sosialisasi kepada para pihak *stakeholder*.

ALKD memiliki visi terwujudnya sinergitas penegakan etika lembaga perwakilan rakyat, dan misinya menjadi organisasi mitra lembaga kehormatan lembaga perwakilan yang profesional. Selain itu, membangun sinergitas dalam upaya melakukan penegakan sistem etika lembaga



Ketua MKD DPR RI, Surahman Hidayat saat memimpin sidang.

foto: Iwan/iw

perwakilan, mengembangkan sistem penegakan etika lembaga perwakilan yang efektif, dan mendorong terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang sistem penegakan etika lembaga perwakilan.



**Pengaduan dari masyarakat berkurang secara kuantitatif. Ada lima komunikasi dengan masyarakat berupa surat-surat pengaduan, yang menunjukkan kepedulian masyarakat.**

Seluruh peserta, juga mengamanatkan kepada Asosiasi ini untuk menselaraskan UU tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD RI Tahun 1945, dan melakukan *Judicial review* terhadap UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Selain itu, pada masa sidang III tahun 2015/2016, Pimpinan dan Anggota MKD juga telah melaporkan kepada masyarakat tentang kinerjanya. Ada lima komunikasi dengan masyarakat berupa surat-surat pengaduan.

Ketua MKD saat itu, Surahman Hidayat menyatakan bahwa masa persidangan III sudah dapat dilalui dengan baik, selalu ada dinamika tetapi tidak seseru masa persidangan sebelumnya. “Pengaduan dari masyarakat berkurang secara kuantitatif. Ada lima komunikasi dengan masyarakat berupa surat-

surat pengaduan, yang menunjukkan kepedulian masyarakat. Tentu kami bekerja sesuai dengan tata beracara yang ada, diverifikasi administratif, pemeriksaan alat dan barang bukti pendukung,” kata Surahman, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, lima surat dari masyarakat itu, ada satu yang sifatnya himbauan terkait dengan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Anggota DPR RI sebagai pejabat publik.

Himbauan tersebut agar MKD mengingatkan kepada para anggota yang belum menyerahkan LHKPN agar secepatnya menyelesaikan kewajibannya. Karena itu wajib secara UU, nanti kalau tidak dilaksanakan ketentuan UU akan melanggar etika.

“Bagus sekali himbauan dari KPK itu. Kami MKD diawal masa sidang ke IV akan membuat edaran pada masing-masing Anggota DPR RI untuk mengingatkan barangkali ada yang



lupa atau karena kesibukan belum sempat menyerahkan laporan LHKPN,” katanya.

Kemudian yang tiga lagi, setelah diverifikasi ternyata tidak cukup alasan untuk diproses kepersidangan. Artinya menurut Surahman, tidak memenuhi persyaratan dengan tata beracara MKD sehingga tidak ditindaklanjuti.

Sedangkan yang masih dalam proses verifikasi ada satu, kemudian ada satu lagi yang ditindaklanjuti ke persidangan, jadi ada dua yang menunggu keputusan dari Panel. Sepenuhnya Panel diberikan hak otonom untuk rapat bersidang dan nanti menguji dari kecukupan alat bukti.

“Pimpinan MKD nantinya menerima laporan dari Panel, diharapkan diawal masa sidang yang akan datang Panel sudah bisa menyelesaikan tugasnya, terkait dengan perkara-perkara yang masuk,” jelasnya.

Hal yang lain yang diinformasikan, adalah dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi lembaga penegakkan marwah lembaga perwakilan, baik mahkamah kehormatan maupun badan kehormatan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka sosialisasi ke DPRD provinsi dan kabupaten/kota ada satu semangat bersama untuk membuat asosiasi lembaga kehormatan dewan.

Nantinya di *launching* sekaligus dan diselenggarakan seminar nasional tentang sistem penegakkan etika lembaga perwakilan, yang direncanakan dilaksanakan di Jakarta tanggal 18-20 April 2016, yang akan dibuka Ketua DPR RI. Selain itu akan menghadirkan pengurus atau



**Pimpinan MKD  
nantinya menerima  
laporan dari Panel,  
diharapkan diawal  
masa sidang yang akan  
datang Panel sudah  
bisa menyelesaikan  
tugasnya, terkait  
dengan perkara-  
perkara yang masuk.**

Pimpinan Badan-badan kehormatan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Juga dari akademisi, kepolisian, kejaksaan dan media massa, untuk memberikan masukan bagaimana kita meningkatkan upaya penegakan kode etik lembaga perwakilan.

Pada akhir tahun 2016, MKD juga telah akomodatif dalam merespon aduan dari sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI terkait polemik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. MKD memutuskan Ade Komarudin diberhentikan dari jabatan Ketua DPR RI. Ade diberhentikan dari jabatan Ketua DPR RI karena mendapat sanksi sedang dari MKD terkait perilaku etik seorang Anggota Dewan.

Putusan MKD dibacakan langsung oleh Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad di ruang sidang lembaga etik Anggota Dewan. “Diputuskan terhitung sejak hari Rabu tanggal 30 November 2016, yang terhormat saudara Ade Komarudin Anggota Fraksi Golkar dinyatakan berhenti dari jabatan Ketua DPR RI masa keanggotaan tahun 2014-2019,” kata Dasco.

Saat itu Dasco menuturkan, keputusan terhadap Akom itu berdasarkan Pasal 21 huruf b peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Saat membacakan putusan terhadap Ade Komarudin, Dasco didampingi Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding dan Maman Imanulhaq. MKD pun akan terus bersikap akomodatif dalam merespon aduan yang datang, baik dari masyarakat, pemerintah atau dari Anggota Dewan itu sendiri. ■ (ns)



Jajaran Pimpinan MKD DPR RI.

foto : IwanArmanias/iw



foto : Jayadi/iw

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan sejumlah Kementerian terkait membahas RUU APBN 2017

## ◀◀ BADAN ANGGARAN DPR RI

# Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan

**B**adan Anggaran DPR RI melaporkan hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja) perumus kesimpulan, dalam rangka pembicaraan tingkat I tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015. Laporan disampaikan saat Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada Masa Persidangan II.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid membacakan hasil rekomendasi Panja, dia menyampaikan, Banggar DPR RI meminta pemerintah agar mampu meningkatkan kapasitas laporan keuangan pemerintahan.

“Pemerintah agar meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, laporan keuangan kementerian dan lembaga yang masih mendapat opini audit <Wajar Dengan Pengecualian> atau <Tidak Menyatakan Pendapat>,” papar Jazilul di Ruang Rapat Banggar, Nusantara II.

### APBN 2017 Diharapkan Realistis dan Tepat Sasaran

Di penghujung bulan Agustus Badan Anggaran DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat ini membahas tentang penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2017 dan pembentukan Panja dan Tim Perumus.

Dalam rapat, Anggota Banggar DPR RI Sukiman berharap, APBN 2017 disusun secara realistis dan bisa mencapai target. “Kita tidak ingin APBN tahun 2017 ini tidak realistis, tidak tepat sasaran, bahkan tidak sesuai dengan target pertumbuhan kita,” harap Sukiman saat diwawancarai selepas rapat, di Gedung Nusantara II.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini, perumusan APBN tahun 2017 penting. Dalam pembahasannya akan mempertimbangkan situasi ekonomi internasional dan tentu dalam negeri. Penerimaan negara dari sektor pajak juga menjadi sorotan dalam pembahasan.

Dalam agenda rapat juga ada

pembentukan Panja dan Tim Perumus. Antara lain, Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RUU APBN 2017. Akan dibentuk juga, Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2017, Panja RUU Transfer ke Daerah dan Dana Desa RUU APBN 2017, serta Panja Draft RUU APBN 2017.

### Empat Menko Dituntut Jalin Koordinasi Secara Baik

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan kepada empat Kementerian Koordinator agar bersinergi dalam menjalankan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Penegasan tersebut ditujukan agar seluruh program pemerintah tepat sasaran.

“Karenanya kawan-kawan dari Banggar selalu mengingatkan bahwa koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, jauh lebih penting agar seluruh program pemerintah tepat sasaran,” tandasnya.

Anggota Dewan dari Dapil Jawa Timur XI ini juga menilai, empat Menko tersebut masih lemah dalam menjalankan fungsi koordinasi.

“Ada berbagai catatan, kelemahan-kelemahan pada tingkat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, karena banyak di kementerian-kementerian operasional yang sesungguhnya berbeda dengan pemerintah,” ungkapnyanya.

### **Banggar DPR RI Setujui Anggaran Non Migas dan Non Energi**

Pada pertengahan Oktober Badan Anggaran DPR RI menyetujui Rancangan APBN 2017 di sektor non migas sebesar Rp79,4 triliun, dari usulan semula Rp82,7 triliun, yang terdiri dari subsidi pangan, benih, pupuk, *public service obligation* (PSO), bunga kredit program, dan pajak. Subsidi pangan yang diajukan pemerintah sebesar Rp19,8 triliun dalam R-APBN 2017 juga disetujui Banggar.

Subsidi pangan tersebut digunakan untuk meningkatkan akurasi sasaran rumah dengan didukung akuntabilitas pengolahan dan alokasi anggaran dengan parameter Rumah Tangga Sasaran (RTS) 14,3 juta dan harga jual Rp1.600 per kilogram (kg), jelas Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir di Ruang Sidang Banggar, Nusantara II.

“Kalau ada yang ingin membahas mekanismenya bagaimana nanti dibahas di komisinya masing-masing. Bagaimana, setuju ya,” ujar Kahar saat memimpin sidang ketika itu.

Banggar juga telah menyetujui subsidi non energi untuk benih dalam RAPBN 2017 sebesar Rp1,3 triliun



foto : Jayadi/iw

Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir berjabat tangan dengan Menteri Keuangan.

dengan volume benih bersubsidi 116.500 ton, meliputi subsidi padi dan kedelai. Untuk subsidi benih, apakah ada yang mau mengomentari. Jika tidak, ini kita setuju ya,” kata Kahar.

### **Setujui RUU APBN 2017 Dibawa ke Paripurna**

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Gubernur Bank Indonesia, pada akhir Oktober memutuskan naskah

Rancangan Undang-Undang APBN 2017 untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan panja-panja yang dibentuk Banggar.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar, Kahar Muzakir dan Wakilnya Said Abdullah. Di awal rapat, panja sudah melaporkan secara seksama. Setelah selesai melaporkan dan ditanggapi oleh para Anggota Banggar lalu jajaran pemerintah memberikan respon, Anggota Dewan perwakilan dari 10 fraksi tidak ada yang menolak. Sepuluh fraksi di DPR RI menyatakan setuju agar RUU APBN 2017 diputuskan di sidang paripurna.

“Kami akan mengambil keputusan apakah rapat kerja hari ini akan dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas RUU APBN tahun anggaran 2017. Apakah setuju?” tanya Said, sidang Banggar pun menjawab “setuju” ketuk palu menjadi pertanda pengesahan.

Dalam postur RAPBN 2017, pemerintah dan Banggar DPR RI menyepakati belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 triliun, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp763,6 triliun, dan belanja non K/L disepakati Rp552 triliun. Untuk transfer daerah dan dana desa, pemerintah disepakati Rp764,9 triliun, dengan belanja transfer daerah mencapai Rp704,9 triliun, dan dana desa sebesar Rp60 triliun. ■

(sc)



foto : Jayadi/iw

Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir berjabat tangan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## ◀ PANSUS DPR RI

# Jadikan UU Paten Sebagai Payung Hukum

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR RI memiliki beberapa unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan. Alat-alat kelengkapan DPR RI tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara.

Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPR RI berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotaannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Seperti halnya, Panitia Khusus (Pansus) yang ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Namun demikian, rapat paripurna atau Badan Musyawarah (Bamus) dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Pansus.

Dalam tahun 2016, ada beberapa Pansus yang telah berjalan dan baru ditetapkan. Diawali pada pertengahan bulan Januari, Wakil Ketua Pansus RUU Paten Didik Mukrianto (F-Demokrat)



Pansus RUU Minol menerima DIM dari Pemerintah.

mengemukakan, revisi UU Paten adalah jawaban guna memberikan payung hukum dan mengakomodasi keinginan investor terkait paten, sehingga DPR RI akan secepatnya menyelesaikan pembahasan RUU ini.

“Tentunya kita ingin revisi UU Paten ini bisa menjadikan sebuah payung hukum dan mengakomodasi keinginan para inventor dengan seluruh stakeholder terkait hak paten ini. Kita melihat bahwa hak

paten di suatu negara maju menjadi sumber devisa negara yang tidak kecil. Sementara di Indonesia, saya melihat paten-paten ini belum bisa memberikan kontribusi yang besar terkait devisa negara.” ujarnya kala itu.

Dibulan yang sama, dalam pembahasan Pansus RUU Minol mengemuka, salah satu yang dikhawatirkan jika RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) disahkan menjadi UU adalah adanya mafia baru yang akan berjualan minuman beralkohol secara illegal. Hal ini yang menjadi perdebatan ketika Pansus RUU Minol melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar kesehatan Dadang Hawari.

“Saya tidak khawatir jika RUU Minol ini disahkan menjadi UU akan ada mafia baru, itu kan tugas keamanan dan penegak hukum,” kata anggota Pansus RUU Minol Tifatul Sembiring. Menurut Tifatul, jika pelarangan itu ada maka secara sembunyi-sembunyi pelanggaran itu tetap bisa terjadi. Namun bukan berarti itu dilokalisir disuatu tempat. Justru kejahatan itu akan ada jika hal itu tidak dilarang. Ini kan juga sebagai bentuk antisipasi.

Pada akhir Maret 2016, Panitia Khusus Angket Pelindo II DPR RI dipimpin Rieke



Dessy Ratnasari dan Wenny Warouw saat memimpin Pansus RUU Merek.

Diah Pitaloka mengadakan kunjungan lapangan menemui masyarakat yang terkena proyek pembangunan terminal Koja dan Kalibaru, Tanjung Priok, dan menemukan dua permasalahan terkait proyek pembangunan terminal Koja dan Kalibaru. “Diantaranya, peninggalan sengketa lahan Koja yang terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu dan juga persoalan ganti rugi lahan kepada warga Kalibaru yang dijanjikan akan diproses pada tahun 2013. Namun, hingga saat ini

ditekankan dalam membahas aturan penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme. Tiga spirit itu adalah penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan terorisme.

“Tiga spirit tersebut bertujuan agar penindakan aksi terorisme tidak berbenturan dengan aspek lainnya. Jangan pemberantasan terorisme itu melanggar hukum dan tidak melindungi HAM. Jangan pula karena melindungi

HAM, teroris tidak diberantas,” jelas politisi Gerindra itu.

Selanjutnya Bulan Oktober 2016, dalam Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang-Undang

Dalam pemaparannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Desy Ratnasari optimis dengan disahkannya RUU Merek dan Indikasi Geografis mampu memberikan payung hukum atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya dalam menghadapi pasar bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Politisi dari Fraksi PKB Lukman Edy pada Bulan November 2016, terpilih dan disahkan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam rapat perdana Pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu menurut Lukman Edy ada beberapa poin-poin yang akan direvisi dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu tersebut meliputi sistem terbuka-terbatas, waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif, wacana pengembangan daerah pemilihan, dan syarat usia minimal menjadi anggota KPU yang ditingkatkan menjadi 10 tahun, yakni dari 35 tahun menjadi 45 tahun. ■

(nt)



foto : Arief/iw

Pansus Angket Pelindo II DPR RI dipimpin Rieke Diah Pitaloka sidak terkait proyek pembangunan terminal Koja dan Kalibaru, Tanjung Priok

belum terselesaikan sementara proyek tetap berjalan,” jelas Rieke.

Masih dibulan Maret, Ketua Pansus RUU Merek DPR RI Dessy Ratnasari menyampaikan bahwa RUU yang saat ini sedang dalam pembahasan akan menyoroti masalah terkait informasi geografis yang dalam pembinaannya nanti dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembahasan RUU ini lanjut Dessy, masih dalam pembahasan Daftar Inventarisasi masalah (DIM). “Yang jelas dalam pembahasan tinggal 118 DIM lagi. Diharapkan nanti RUU merek ini bisa memberi tambahan pada indikasi geografis. Sehingga tadi usul agar namanya diubah dari RUU Merek menjadi RUU Merek dan Indikasi Geografis,” ujarnya.

Bulan Juni 2016, Ketua Pansus Muhammad Syafi'i mengutarakan bahwa terdapat tiga spirit yang akan



foto : Jaka/iw

Pengesahan Pimpinan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

## ◀◀ SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# Setjen DPR RI Raih WTP 8 Kali Berturut-turut

**P**redikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penghargaan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan yang diterima sebanyak delapan kali berturut-turut ini merupakan salah satu bukti dan komitmen DPR RI dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas laporan keuangannya.

Tepatnya di pertengahan tahun 2016, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany mendapatkan predikat WTP untuk ke delapan kalinya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2015.

“Ya, Alhamdulillah ini adalah ke delapan kalinya Setjen DPR RI mendapatkan penghargaan WTP. Ini adalah ukuran dalam laporan keuangan negara yang dianggap sudah bagus dan sesuai standar,” ungkap Win, sapaan akrabnya saat menghadiri penyerahan LHP di Auditorium BPK RI, Jakarta.

Menurutnya, penghargaan tersebut harus dipandang sebagai tantangan untuk mempertahankan prestasi tersebut pada tahun-tahun mendatang. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa DPR RI telah menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara baik. “Tentu tidak mudah mempertahankannya, jadi nanti harus diteruskan,” tegasnya.

Win menambahkan, setiap program yang disusun harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan tetap memperhatikan akuntabilitasnya. Sehingga untuk mempertahankannya, win selalu memberikan pengarahan dan konsolidasi mengenai laporan keuangan.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelum proses pemeriksaan oleh BPK, semua pejabat pengelola keuangan di



foto : Jaka/iw

*Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany mendapatkan predikat WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2015*

Setjen DPR RI berkoordinasi dengan Inspektorat Utama (Irtama) guna dilakukan pemeriksaan internal.

“Sebelum BPK melakukan pemeriksaan, semua pejabat pengelola keuangan berkoordinasi dengan Irtama. Jadi kita dikoreksi terlebih dahulu oleh pemeriksa internal, jadi ada tahapan pemeriksaan,” terangnya.

Kemudian, dari sisi pelaksanaan Sekjen DPR RI juga mendorong pejabat pengelola anggaran untuk membuat laporan keuangan sesuai standar. Dalam proses pelaporan anggaran menggunakan sistem semar, yakni sistem yang terintegrasi antar pengelola keuangan sehingga bisa dilakukan saling kontrol dan mudah dimonitor oleh inspektorat agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan lebih tertib kedepannya.

“Alhamdulillah berkat tahapan tersebut, kami mendapatkan WTP. Ke depan kita upayakan kita lebih tertib, apalagi sekarang kita membangun sistem semar,” tandas wanita yang menjabat Sekretaris Jenderal sejak 2013 ini.

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, BPK memberikan penilaian, dari tertinggi ke terendah yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Adapun, kriteria pemberian predikat tersebut mencakup kriteria sebagai berikut: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.



foto : Azka/iw

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany saat menerima Sekjen AIPA.

### Aktif Dalam Forum Internasional

Sebagai wujud peran DPR RI untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menghadiri sidang *Association of Secretaries General of Parliaments* (ASGP).

Sidang ini bersamaan dengan konferensi *The 135<sup>th</sup> Assembly of Inter-Parliamentary Union (IPU)* yang berlangsung di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu.

Dalam acara yang dihadiri oleh 30 perwakilan Sekjen anggota Parlemen IPU, Winantuningtyas selaku Komite Eksekutif ASGP periode 2014-2017 menyampaikan presentasi dengan tema “Peran Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Badan Musyawarah untuk meningkatkan kinerja DPR RI lebih efektif”.

ASGP merupakan organisasi dibawah IPU yang memberikan forum kepada para Sekretaris Jenderal Parlemen di seluruh dunia untuk saling berbagi pengalaman dan informasi guna meningkatkan pelayanan Setjen kepada para anggota Parlemen dan standar pelayanan prima Setjen parlemen seluruh dunia.

Badan ini pertama kali dibentuk di Oslo pada 16 Agustus 1939. Saat ini, Komite Eksekutif *Association of Secretaries General of Parliaments* beranggotakan 11 negara, yakni: Zambia,

Belanda, Swiss, Estonia, Portugal, Nepal, Maroco, India, Australia, Indonesia, dan Republik Chad.

Dimana mereka berperan penting dalam mengendalikan roda kegiatan ASGP, sebagai wadah yang memfasilitasi komunikasi antara pemangku jabatan Sekretaris Jenderal Parlemen dari berbagai negara di dunia. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antar parlemen dalam menghadapi tantangan global. ■

(ann)



Sebagai wujud peran DPR RI untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menghadiri sidang ASGP.



foto : Azka/iw

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany meresmikan Pusdiklat Setjen DPR RI



## ◀◀ BADAN KEAHLIAN DEWAN DPR RI

# Peran Aktif BKD Sebagai Sistem Pendukung Baru Kinerja Dewan

**B**adan Keahlian DPR RI, yang dalam peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI disebut Badan Keahlian, merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR RI dan secara administratif berada dibawah Setjen. Badan Keahlian Dewan (BKD) tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 27 Tahun 2015.

Dalam susunannya, Badan Keahlian Dewan dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. Tugas Badan Keahlian Dewan adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang keahlian.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKD menyelenggarakan beberapa fungsi, yakni perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian, koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi dilingkungan Badan Keahlian, penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada DPR RI, penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI, penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemen kepada DPR RI, pelaksanaan administrasi Badan Keahlian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR RI dan Setjen.

Badan Keahlian Dewan terdiri atas lima bagian, yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Penelitian.

Ketua DPR RI Ade Komarudin telah berkomitmen untuk memperkuat Badan Keahlian Dewan seperti penguatan pada fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, anggaran, pengawasan,



BKD menyelenggarakan seminar dihadiri Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Menkumham

dan diplomasi parlemen.

“Saya selaku Pimpinan DPR RI, berkomitmen untuk memberikan penguatan terhadap kelembagaan BKD. Kita ingin dengan penguatan BKD ini, DPR RI semakin kuat dan semakin maksimal dalam melakukan kinerjanya. Oleh karena itu BKD memerlukan SDM yang kuat,” ucap Akom usai menerima Kepala BKD Johnson Radjaguguk beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

SDM memegang peranan penting dalam memperkuat BKD, posisinya harus diisi oleh para ahli diberbagai bidang, seperti hukum, anggaran, dan juga pengawasan diberbagai sektor yang menjadi fungsi dari Komisi I hingga Komisi XI, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

Sementara itu, Kepala BKD Johnson Radjaguguk juga menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2016, BKD menempatkan tiga tenaga fungsional Analisis APBN, untuk melakukan pendampingan saat pembahasan APBN.

Pada saat merayakan HUT DPR RI ke 71, BKD berkesempatan menyelenggarakan kegiatan Forum

Parlemen Indonesia, yang mengangkat tema “71 Tahun DPR RI dan Kinerjanya”. Kinerja Dewan telah menjadi sorotan publik terkait fungsi-fungsinya, maupun hal lain di luar itu.

Dengan digelarnya diskusi tersebut, diharapkan tidak hanya menghasilkan prokontra, namun juga menghasilkan solusi perbaikan yang konstruktif. Berbagai diskusi ilmiah lainnya yang juga digelar oleh BKD, dijadikan sebagai ajang untuk memberikan kontribusi pemikiran dan memperbaiki kelemahan-kelemahan DPR RI.

Hal tersebut berkaitan dengan perbaikan kelembagaan, penyempurnaan mekanisme kerja, maupun perubahan pemikiran yang aplikatif bagi kemajuan bangsa, khususnya DPR RI. Melalui beragam diskusi yang melibatkan berbagai elemen dan masyarakat luas, diharapkan DPR RI nantinya akan mempunyai tradisi pemikiran ilmiah dan tidak hanya berfikir dari perspektif politik.

“Kegiatan diskusi-diskusi yang diselenggarakan BKD, telah dibahas dan disepakati Pimpinan DPR RI

foto : Naefuroji/iw



sebagai suatu forum yang bisa melibatkan Anggota Dewan dan elemen masyarakat,” ujar Johnson.

Johnsorn menghimbau kepada segenap elemen masyarakat, untuk dapat bersama-sama memberikan kontribusi dan solusi terbaik agar kinerja Dewan semakin meningkat, dan pengertian Dewan sebagai representasi rakyat bisa terwujud.

Di bulan Agustus 2016, BKD juga menggelar seminar nasional yang mengusung tema “Peningkatan Peraturan Perundang-undangan”, yang bertempat di Royal Kuningan Hotel, Jakarta.

“Tujuan diadakannya acara tersebut adalah agar dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan memiliki satu kesamaan antara pemikiran didalam diri para perancang sebagai satu sistem pendukung,” jelas Johnson.

Menurutnya, para perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran yang kuat didalam menghasilkan suatu kualitas peraturan perundang-undangan. Ia berharap seminar nasional tersebut dapat menjadi cikal bakal pembentukan satu wadah perancang peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, BKD menghimpun peserta yang hadir pada acara itu, tidak hanya dari pusat, tetapi juga dari seluruh provinsi Indonesia, terutama Kanwil-Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.



foto : Azka/iw

BKD DPR RI saat menerima Delegasi Parlemen Maroko

BKD sebagai pemrakarsa seminar nasional itu menginginkan agar wadah tersebut nantinya bisa benar-benar terwujud, sehingga ada komunikasi diantara para perancang peraturan perundang-undangan.

“Dengan adanya jaringan dari para perancang perundang-undangan tersebut, nantinya akan sangat bermanfaat didalam pembentukan undang-undang. Karena salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perancang perundang-undangan atau *legal drafter* adalah mengumpulkan data dan informasi dari berbagai daerah,” jelasnya.

Terkait pembentukan dan

perubahan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertujuan untuk membentuk agen perubahan, Johnson menyampaikan bahwa BKD mendukung program tersebut dengan ikut serta mempercepat pelaksanaan program reformasi itu di delapan area yang menjadi sasaran tujuan.

“Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI bertujuan agar kinerja para pegawai Kesetjenan DPR RI dapat semakin meningkat dan bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan aturan dan kebutuhan, serta harapan masyarakat,” papar Johnson saat membuka *workshop* BKD yang bertema “Pengembangan Kapasitas Agen Perubahan”.

Selain mengadakan berbagai *workshop* yang menjadi bukti kontribusi nyata, BKD sebagai salah satu sistem pendukung yang ada, juga menerima dan memberikan masukan serta pemahaman yang lebih dalam terhadap satu masalah kepada Anggota DPRD dari berbagai daerah yang hadir ke Gedung DPR RI.

Beberapa DPRD yang pernah bertemu dengan Kepala BKD diantaranya adalah DPRD Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Wonogiri, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi DI Yogyakarta, DPRD Kota Padang, Kota Magelang, dan Delegasi Parlemen Maroko. ■

(dep)



foto : Azka/iw

Johnson Radjaguguk berjabat tangan dengan Kepala Departemen Sosial UGM dalam Seminar Nasional DPR RI “Antara Kepercayaan dan Harapan Publik”

## ◀◀ INSPEKTORAT UTAMA DPR RI

# Irtama Terus Tingkatkan Pengawasan Intern

Sebagai unit pengawas Intern, Inspektorat Utama (Irtama) terus melakukan pengawasan yang kredibel untuk menciptakan tata kelola organisasi yang bebas dari korupsi. Beberapa rencana kerja telah terealisasi dan berakhir pada hasil yang cukup memuaskan yakni kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada Rabu, (28/06/2016). Ini adalah capaian yang perlu diapresiasi dan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

## WTP Delapan Kali Berturut-turut

Di tahun 2016, DPR RI kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pada tahun 2015. Ini adalah predikat WTP yang ke delapan kalinya secara berturut-turut. Sebagai unit pengawas intern, prestasi ini adalah bentuk kerja keras Inspektorat Utama (Irtama) dalam melakukan pengawasan yang kredibel agar menghasilkan tata kerja organisasi yang bersih, transparan dan bebas korupsi.

Terkait predikat WTP yang diperoleh DPR RI, Inspektur Utama Setyanta Nugraha pun menegaskan akan terus mempertahankan predikat WTP ini dan meningkatkan kualitas pelaporan pada tahun berikutnya. Hal itu disampaikan usai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) di Auditorium BPK RI, Jakarta pada Rabu, (28/06/2016).

“Tentu WTP tak sekedar harus dipertahankan tapi bagaimana meningkatkan kualitas. Karena WTP ini opini tertinggi yang melihat kesesuaian antara pelaporan dan kaidah akuntansi,” ujar Setyanta.

Ia pun menjelaskan bahwa tugas Irtama adalah mendorong



Irtama dengan Sekjen DPR RI saat menerima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dari BPK.

kelembagaan untuk tertib administrasi dan keuangan, sehingga berperan dalam mengubah paradigma menjadi *quality insurance* dan konsultasi. “Irtama hadir dalam rangka mendorong entitas untuk tertib administrasi dan tertib keuangan serta disiplin anggaran. Sehingga perannya adalah mengubah paradigma menjadi *quality insurance* dan konsultasi. Sehingga lebih pada fungsi pencegahan *early warning system*,” jelasnya.

Oleh karena itu, Lanjut Setya, dalam pemeriksaan BPK, Irtama pun ikut mendampingi auditor. “Kalau dulu ketika masih pengawasan internal itu mendampingi BPK, kalau sekarang mendampingi auditor. Jadi membantu auditor bagaimana menjawab pertanyaan dari BPK. Kemudian mengkoordinasikan seluruh unit kerja ini. Ketika ada tim pengawas BPK

masuk, kita yang mengkoordinasikan,” terang Setyanta.

## Tingkatkan Kapabilitas Auditor

Selain itu pada tahun 2016 dalam rangka penguatan kelembagaan Inspektorat Utama dan Kapabilitas Auditor di lingkungan Inspektorat Utama, diselenggarakan acara sosialisasi yang mengangkat tema “Standar, Kode Etik, dan Telaah Sejawat AAIFI”. Hadir pada acara tersebut Inspektur I dan II, Kabag TU ITTAMA, Kasubag Perencanaan dan Keuangan ITTAMA, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan ITTAMA, Auditor Madya Inspektorat I, Auditor Inspektorat I dan II, serta nara sumber Eddy Rachman dari AAIFI.

“Sosialisasi yang kami selenggarakan adalah merupakan suatu bentuk pengayaan dalam



foto : Jayadi/iw

Acara sosialisasi bertema “Standar, Kode Etik, dan Telaah Sejawat AAPI” untuk meningkatkan kapabilitas auditor.

rangka peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Ini merupakan satu langkah yang harus kami lakukan mengingat Inspektorat Utama ini merupakan unit baru yang harus terus mencari bentuk peningkatan kapabilitas APIP itu sendiri,” ujar Inspektur I Dewi Barliana di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kinerja kami harus terus di *maintance* dengan cara-cara pengayaan bimbingan teknis, PPM, sosialisasi, membentuk *group discussion*. Ini adalah salah satu cara untuk menjadikan para APIP ini menuju peningkatan kinerja yang lebih baik,” tandas Dewi.

Dia juga mengatakan bahwa kinerja secara individu masing-masing para APIP ini sudah mulai terlihat *performance* nya, dan mereka sudah mencintai dengan pekerjaannya tersebut. “Dan yang terpenting adalah kami harus tetap bekerja sesuai aturan dan batasan dalam koridor yang berlaku,” pungkasnya.

### Irtama Luncurkan E-LIT

Pada tahun 2016, Irtama pun juga telah meluncurkan sebuah aplikasi baru bernama *E-learning* Inspektorat Utama atau yang disingkat E-LIT. Aplikasi ini merupakan sarana untuk berbagai pengetahuan dan ilmu yang berkenaan dengan pengawasan internal terutama meningkatkan kapabilitas auditor.

“Alhamdulillah pada hari ini, kita melakukan *soft launching E-learning*

Inspektorat Utama dan program pelatihan mandiri terutama yang berkaitan dengan tata cara E-LIT,” sambut Irtama DPR RI, Setyanta Nugraha, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Rabu (04/05/2016).



Kinerja kami harus terus di *maintance* dengan cara-cara pengayaan bimbingan teknis, PPM, sosialisasi, membentuk *group discussion*. Ini adalah salah satu cara untuk menjadikan para APIP ini menuju peningkatan kinerja yang lebih baik.

*E-learning* adalah sebuah sistem yang menyediakan media pembelajaran *online* dan mandiri di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya *e-learning* ini maka bagi para auditor yang melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan wajib menyampaikan materi pendidikan dan pelatihan itu untuk *e-learning* dan PPM sehingga materi pelatihan tersebut bisa di *share* kepada seluruh editor melalui *web* sehingga tidak terbatas waktu, tempat dan lain sebagainya.

“Golnya dengan harapan bisa meningkatkan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah ini yang sekarang di Inspektorat Utama itu adalah level 1, dimana pada tahun 2019 amanat Presiden untuk bisa menaikkan level menjadi 3, secara nasional untuk auditor, pengawas pemerintah itu memang saat ini 84 % pada level 1. Kemudian 14% level 2 dan level 3 itu baru ada 1%. Kita termasuk yang diminta untuk meningkat menjadi 3%,” ujar Setyanta.

### Raih Level-2 IACM

Pada pertengahan 2016, Irtama juga telah melaksanakan submit penilaian mandiri *Internal Audit Capability Model* (IACM). Di usianya yang terbilang masih dini, APIP Irtama mampu mencapai level 2 pada audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina APIP di Indonesia.

“Alhamdulillah, meskipun belum genap berusia satu tahun, dengan upaya keras kita mampu berada pada level 2 IACM,” ungkap Kepala Irtama DPR RI Setyanta Nugraha saat memimpin rapat koordinasi di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016). Dijelaskan Setyanta lebih lanjut, meskipun telah meraih level 2, namun pihaknya tidak akan berpuas diri dan akan tetap melakukan pembenahan.

Memasuki tahun 2017, Irtama pun akan terus meningkatkan kapasitas pengawasan guna menjadikan DPR RI sebagai lembaga yang kredibel dan ketat dalam penggunaan anggaran, sehingga tujuan agar DPR RI sebagai lembaga yang bersih dan bebas dari korupsi dapat diwujudkan. ■

(15)

# Menuju Parlemen Modern dalam Demokrasi Indonesia

**M**enuju Parlemen *modern* dalam demokrasi Indonesia, itulah tema yang dipilih oleh DPR RI pada awal masa keanggotaan DPR RI Periode 2014–2019. Suatu tema yang bisa mempunyai multi makna. Dari sudut teknologi paling tidak memiliki dua hikmah, yaitu hikmah kejadian sebelumnya dan harapan ke depan. Hikmah pertama, bahwa masa sebelumnya belum *modern*, dan masa depan diharapkan sudah *modern*. Untuk hikmah ke masa depan sudah terlihat yaitu DPR RI telah membangun teknologi informasi yang cukup tinggi, pemutakhiran *website* secara berkesinambungan, pengadaan televisi parlemen, dan diseminasi kegiatan Dewan dan anggotanya melalui media sosial.

Dari sudut ideologi politik, tema tersebut mengandung makna bahwa revitalisasi fungsi DPR RI akan lebih diutamakan dalam memajukan kualitas kinerja DPR RI. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlu wujud *modernisasi* dalam perilaku anggota dalam melaksanakan fungsi dan menyelesaikan masalah. Dalam prakteknya sudah terlihat meskipun di awal pembentukan perangkat DPR RI kental sekali terlihat gesekan-gesekan politik antara suatu kubu koalisi dengan kubu koalisi lainnya, yang sebenarnya dalam sistem presidensial tidak dikenal. Namun dalam praktek di parlemen Indonesia itu terlihat sekali, seiring dengan berjalannya waktu segmentasi koalisi tersebut mulai mencair. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan diutamakan daripada kepentingan golongan.

Dalam konsep politik dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut mengisyaratkan mulai bergesernya faham politik dari faham klasik ke faham *modern*. Faham politik klasik mengatakan bahwa: “Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana” (Harold D Laswell). Hal ini lebih dinyatakan lagi oleh Rod Hogue bahwa “Politik adalah kegiatan yg menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan di antara anggota-anggotanya”. Dalam pandangan *modern*, “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen



Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, MSI

peraturan-peraturan umum yg mengatur kehidupannya, yang tidak terlepas dari fenomena konflik dan kerjasama”.

Pergeseran tersebut dapat dilihat dari bergesernya kedekatan “kemesraan” antara partai yang tadinya tidak ikut dalam koalisi pemerintah menjadi semakin dekat dengan pemerintah. Tanda-tanda ini mulai terlihat nyata dari peristiwa “Papa minta saham” sampai kepada kembalinya Pak Setya Novianto menjadi Ketua DPR RI pada Bulan Desember ini.

Dalam suasana demokrasi yang lebih *modern* memang kebutuhan akan wawasan kebangsaan yang internasional tidak bisa kita nafikan. *Cyber war* yang telah menjadi penting dalam atmosfer pertahanan, keamanan, dan pengendalian ekonomi negara sudah terjadi di masa kini. Kondisi kehidupan bangsa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kehidupan dalam negeri saja, namun variabel perekonomian internasional. Jaring kehidupan antar bangsa dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi dengan dimediasi oleh teknologi yang canggih telah mendobrak kisi-kisi demarkasi antar negara. Kejadian di suatu negara akan berpengaruh kepada kehidupan negara lain. Dengan teknologi komunikasi yang canggih hubungan antara seseorang dengan orang lain dapat menembus batas wilayah antar negara tanpa menghiraukan aturan yang ada di negara terkait. Paradigma posisi negara tidak lagi sebagai “penjaga malam” tetapi sudah bergeser kepada “pengendali upaya peningkatan kesejahteraan” bangsa. Karena keterkaitan jaringan tersebut seringkali negara-negara lain (tidak hanya yang bertetangga langsung, tetapi juga negara tetangga yang letaknya jauh) berkepentingan untuk ikut berperan dalam dinamika kehidupan negara lain, dengan maksud untuk menjaga dan memelihara kepentingan atau keuntungan negara mereka yang dapat mereka raih dari peran dan pengaruh negara yang bersangkutan. Hal ini bisa kita lihat dari semakin maraknya tenaga-tenaga asing yang bekerja di negara kita seiring dengan maraknya investasi asing yang masuk ke Indonesia, sementara bangsa kita sendiri masih banyak yang menganggur, dan juga mobilitas barang dan jasa ekonomi antar negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembelian barang secara *online* dan penyampaian berita melalui komunikasi *cyber* sulit



foto : Rizka/iw

Rapat Paripurna DPR RI

dibendung. Sebaliknya gangguan komunikasi dan teknologi melalui cyber juga rumit untuk dipantau dan dikendalikan.

Sebagai wakil rakyat, Anggota DPR RI mau tidak mau harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang efektif. Mekanisme demokrasi dalam pengambilan keputusan yang selama ini lama, bisa menggunakan teknologi untuk bisa dipercepat. Hal ini juga mengisyaratkan dalam menyusun mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan DPR RI perlu memperhatikan dan menggunakan perangkat teknologi canggih agar efektif dan efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.

Secara kuantitas DPR RI bisa dilihat sebagai berikut :

- RUU Program Legislasi Nasional Prioritas : 40
- RUU Kumulatif terbuka : 5
- RUU Tambahan dalam RUU Program Legislasi Nasional Prioritas th 2016 : 10
- RUU dalam Tahap Penyusunan : 17
- RUU dalam Tahap Pembahasan : 22
- RUU yang telah dibahas dalam Tahun Sidang 2015 – 2016 : 16
- Jumlah pengaduan masyarakat melalui surat : 4355
- Jumlah pengaduan masyarakat melalui website : 806
- Jumlah pengaduan masyarakat melalui sms : 12.362
- Jumlah pengaduan masyarakat ke alat kelengkapan DPR RI : 7395.
- Jumlah Panja Pengawasan di Komisi-komisi : 45

Sebelum dilantik secara resmi sebagai Anggota DPR RI mereka adalah kader partai masing-masing (politikus), namun setelah dilantik menjadi Anggota DPR RI mereka lebih bersifat seorang negarawan. Artinya selain mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan, mereka harus memperhatikan toleransi, solidaritas, dan keharmonisan kepentingan antar golongan. Inilah sifat pejuang yang sejati.

Pada tahun 2016 ini jalan menuju tercapainya target dari tema tersebut cukup menemui tantangan yang berat. Di awal tahun paket pimpinan DPR RI sudah diuji dengan digugatnya kepemimpinan Setya Novanto berkaitan dengan prasangka “Papa minta saham” . Penyelesaian masalah ini cukup pelik dan melelahkan karena sampai-sampai melibatkan MKD dan kejaksanaan. Meskipun terbukti bahwa beliau tidak bersalah, namun energi yang terkuras cukup banyak. Namun begitu, ada juga suasana yang lebih kondusif yaitu mencairnya dua kubu ideologis Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Dalam konteks ini kita tabek (salut) kepada para Anggota Dewan. Dampak dari sikap Anggota DPR RI terutama para pemimpinnya telah berdampak banyak pada kehidupan kebangsaan Indonesia. Peristiwa demo yang dilakukan oleh masyarakat di tahun 2016 ini meskipun besar seperti demo 212 dan 412 bisa terkendali dengan baik. Para politisi yang berbau dengan masyarakat dapat mengendalikan suasana secara baik yaitu dengan tidak munculnya tindakan anarkhi yang merusak, sehingga polisi pun tidak bertindak keras.

Berangkat dari kenyataan di atas terlihat bahwa mengukur kinerja DPR RI tidak hanya dilihat dari frekwensi kerja yang dilaksanakan dan hasil (out put) saja, tetapi harus juga dilihat dari kualitas dan dinamika politik yang melingkupinya. Kuantitas yang tinggi harus disertai dengan kualitas yang baik dan pengendalian lingkungan yang terukur. Selamat bagi Anggota DPR RI yang telah menutup tahun 2016 ini dengan prestasi yang baik dan pengendalian situasi politik nasional yang kondusif. ■

**Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, MSi**  
(Wakil Dekan Fisip Universitas Sriwijaya)

# “Menutup 2016, Menyongsong 2017”

“What does this mean to me?”

“What do I want to have be true about it?”

“What’s the next step required to make that happen?”

*These are the corner-stone questions we must answer, at somepoint, about everything.*

*This thinking, and the tools that support it, will serve you in ways you may not yet imagine.*

David Allen (*Getting Things Done*, 2016: 253)

Tahun 2016 merupakan tahun penuh tantangan dan dinamika di DPR RI. Persis seperti ramalan bahwa pada tahun monyet api ini apapun bisa terjadi, mulai dari pergolakan politik, demo sampai tindakan diskriminatif. Namun demikian, DPR RI tetap mampu mengemban fungsinya dengan baik. Dalam tulisan pendek ini, ada 2 (dua) hal yang coba diangkat, yaitu: fungsi legislasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Dewan.

Sebelum melakukan evaluasi fungsi legislasi perlu dipahami bahwa tantangan dan dinamika politik proses legislasi DPR RI periode Reformasi 1998 sangat tinggi. Tidak ada jaminan bahwa RUU yang sudah masuk Prolegnas; memiliki Naskah Akademik (NA) dan Naskah RUU, bisa segera diketuk palu untuk pengesahan. Pertama, karena prosesnya panjang, harus melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Kedua, karena prosesnya lama, harus mendengarkan beragam pendapat dari beragam unsur. Seringkali pendapat-pendapat tersebut saling bertentangan, sehingga perdebatan yang terjadi menjadi lama. Padahal, sebelum melanjutkan kedalam tahap berikutnya, tahap sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas fraksi yang ada, juga masih harus mendapatkan persetujuan dari pihak eksekutif, belum lagi harus mendengarkan aspirasi dan tanggapan dari masyarakat. Jadi zaman sekarang, tidak bisa



Reni Suwarso, Ph.D



**Tidak ada jaminan bahwa RUU yang sudah masuk Prolegnas; memiliki Naskah Akademik (NA) dan Naskah RUU, bisa segera diketuk palu untuk pengesahan.**

mengevaluasi fungsi legislasi Dewan hanya dengan bertanya: ‘berapa jumlah RUU yang sudah menjadi UU?’ Tetapi, harus pula menghitung RUU yang dibahas di tiap tahapan. Tercatat ada 7 (tujuh) RUU disetujui menjadi UU, 1 (satu) RUU dalam proses harmonisasi, ada 10 (sepuluh) prolegnas perubahan, 11 (sebelas) RUU dalam proses pembicaraan tingkat I

dan 14 (empat belas) RUU dalam proses penyusunan (data per 12 Oktober 2016).

Kekurang-pahaman tersebut, sering kali menghasilkan kesimpulan yang gegabah, seperti citra kinerja DPR RI di sektor legislasi masih saja dinilai ‘buruk.’ Nah, ini juga mudah terbantahkan karena kepuasan publik terhadap kinerja DPR RI naik dari 29.2% pada Oktober 2015 menjadi 41.9% pada Agustus 2016. Sedangkan penilaian publik terhadap fungsi DPR RI (pembuatan UU, anggaran dan pengawasan) relatif lebih banyak yang mengatakan ‘baik’ dibandingkan yang mengatakan ‘buruk.’ Tetapi, sayangnya memang publik masih kurang percaya kepada DPR RI karena DPR RI berada di urutan paling buncit di tangga ‘tingkat kepercayaan publik kepada 13 Lembaga Negara.’ Ini merupakan hasil survey CSIS pada 8 - 15 Agustus 2016 terhadap 1.000 orang responden, melalui wawancara tatap muka menggunakan kuisioner terstruktur.

Tentu masih banyak yang perlu ditingkatkan oleh DPR RI. Apakah hasilnya akan menjadi lebih baik dari pada tahun 2016? Jawabannya tentu menunggu akhir tahun 2017. Namun, apapun yang terjadi, hasil evaluasi tahun 2016 dan kerja keras semua unsur mungkin saja menghasilkan prestasi luar biasa di tahun depan. Siapa tahu seperti David Allen sampaikan - *This thinking, and the tools that support it, will serve you in ways you may not yet imagine.* ■

*Direktur Center for Election and Political Party, Universitas Indonesia*

# EVALUASI PROLEGNAS 2016

Per 12 Oktober 2016

## 7 RUU Disetujui Menjadi Undang-undang

*Yaitu RUU:*

1. Tabungan Perumahan Rakyat, 2. Penyandang Disabilitas, 3. Pengampunan Pajak, 4. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 5. Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, 6. Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan, 7. Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota


## 1 RUU dalam Proses Harmonisasi *Yaitu RUU:*

Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat




## 10 Prolegnas Perubahan *Yaitu RUU:*

1. Penghapusan Kekerasan Seksual, 2. Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, 3. Perkelapasawitan, 4. Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 5. Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 6. Bea Materai, 7. Perubahan atas UU No.35 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, 8. Kepalangmerahan, 9. Narkotika dan Psikotropika, 10. Perubahan Kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi




## 11 RUU dalam Proses Pembicaraan Tingkat I *Yaitu RUU:*

1. Kekarantinaan Kesehatan, 2. Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 3. Pertanahan, 4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 5. Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, 6. Jasa Konstruksi, 7. Arsitek, 8. Kewirausahaan Nasional, 9. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 10. Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, 11. Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

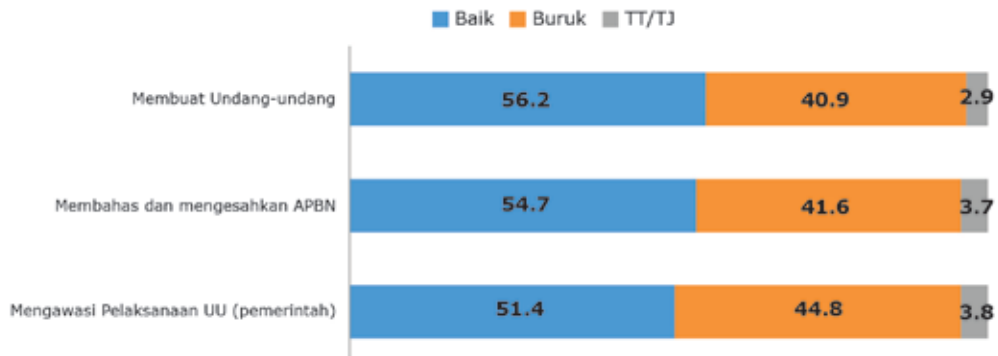


## 14 RUU dalam Proses Penyusunan *Yaitu RUU:*

1. Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, 2. Radio Televisi Republik Indonesia, 3. Kitab Hukum Pemilu, 4. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, 5. Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 7. Kelidanan, 8. Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 9. Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 10. Perubahan atas UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 11. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, 12. Penghapusan Kekerasan Seksual, 13. Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 14. Perkelapasawitan

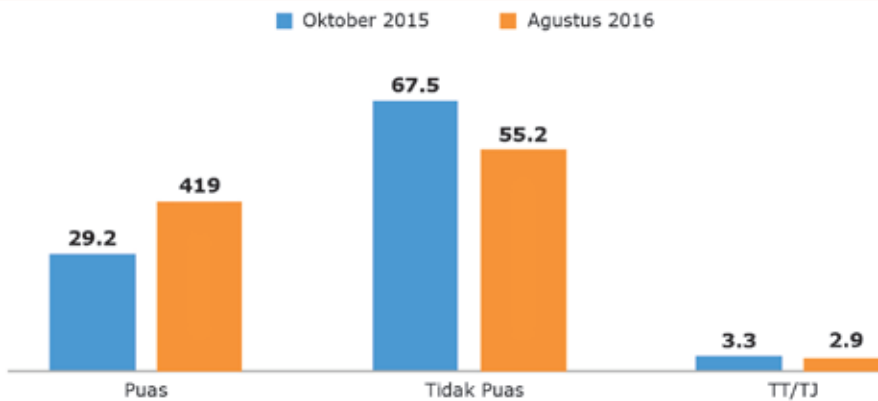


Penilaian Publik terhadap Fungsi DPR



Rilis Hasil Survei Nasional CSIS: 2 Tahun Jokowi (Agustus 2016)

Kepuasan Publik terhadap Kinerja DPR



DPR DI MATA MASYARAKAT



**KINERJA** Parlemen saat ini bisa dibilang bagus. Hal ini dapat dilihat kepedulian Anggota DPR RI terhadap isu perbatasan terutama di Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa kali saya membaca berita terkait kunjungan Anggota DPR RI ke daerah perbatasan di Nunukan yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Kunjungan tersebut mendapatkan dampak yang positif. Salah satunya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PU-PERA) akan membangun infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dengan rincian sepanjang 45 kilometer di Kalimantan Timur, 388,30 kilometer di Kalimantan Utara, dan 77 kilometer di pulau terdepan Sebatik.

**Luay Alisjhabana**  
(Aktivis Daerah Perbatasan Kalimantan Utara - Malaysia)



**MENURUT** saya kinerja DPR RI sudah cukup baik, namun kembali lagi dengan pandangan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, dalam hal pendidikan DPR RI perlu merancang atau membuat suatu sistem pendidikan yang paten karena di Indonesia ini sudah berkali-kali sistem pendidikannya diganti. Karena bagaimana bisa ditetapkan suatu sistem kalau diganti-ganti dan kita juga susah untuk menerapkan sistem pendidikannya.

Terkait Ujian Nasional (UN) menurut saya penting, tetapi jika dilaksanakan karena melihat kondisi pendidikan sekarang di Indonesia ini belum rata. Mungkin kalau UN dilaksanakan, kasihan

teman-teman yang sekolahnya belum disamakan kurikulumnya. Menurut saya masih belum ada kejelasannya kemarin ada wacana dari Pemerintah moratorium UN sampai sekarang masih belum jelas akan diadakan atau tidak. Saya sendiri mendukung adanya UN biar jadi sama serentak se-Indonesia. Tapi menurut saya DPR RI sudah bagus dalam mewakili rakyat menyalurkan aspirasi rakyat ke pemerintah untuk membentuk kedepannya agar Indonesia semakin maju.

**I Gede Sutafa Indra Puspita**  
(Kelas 12 IPA, SMA N 1 Kediri,  
Tabanan Bali)



**NEGARA** dikatakan maju jika sudah memiliki mutu pendidikan yang baik. Seperti kutipan dari Nelson Mandela bahwa “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Dari kutipan tersebut dapat dikatakan pendidikan adalah senjata yang sangat ampuh untuk kemajuan sebuah negara.

Perkembangan pendidikan di Indonesia dapat saya rasakan dengan banyaknya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermunculan, namun masih banyak lembaga PAUD yang memiliki mutu “seadanya” dikarenakan kekurangan dana untuk pengembangan lembaga tersebut. Sebagai tempat untuk menampung aspirasi rakyat, DPR RI pastinya mempunyai andil dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk perhatian DPR RI di bidang pendidikan

Indonesia khususnya PAUD adalah dengan pembuatan kebijakan dan mengalokasikan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Dengan dana tersebut banyak lembaga PAUD yang terbantu untuk menambah inventaris sekolah yang menunjang untuk kegiatan belajar dan bermain anak. Pemberian dana BOP kepada lembaga PAUD hanyalah salah satu bantuan dari pemerintah dalam upaya pengembangan pendidikan di Indonesia. Dengan bantuan yang diupayakan ini, diharapkan adanya pengawasan lebih untuk penyaluran dana pendidikan lainnya agar lebih tepat sasaran.

**Dauti Sarah, S.Pd**  
(Sarjana Pendidik di Daerah Terdepan,  
Terluar, dan Tertinggal atau SM3T Angkatan  
6 Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara)



**SAYA** melihat selama 1 tahun kinerja DPR RI sudah terlihat bagaimana Anggota DPR RI bekerja, mungkin karena sebagian besar tidak dipublikasikan, maka masyarakat hanya melihat sebagian saja tentang kinerja DPR RI dan apalagi masih posisi pemberitaan hanya sedikit yang menyinggung tentang Anggota DPR RI. Sehingga hal-hal negatif lebih terlihat ketimbang hal positif dari hasil kerja DPR RI itu sendiri.

Mungkin untuk tahun depan Anggota DPR RI itu lebih harus menonjolkan diri. Lebih banyak turun ke masyarakat, atau blusukan. Karena dengan blusukan itu bisa membuat citra DPR RI menjadi berubah di mata masyarakat. Masyarakat lebih banyak lihat Anggota DPR RI

kerja di Gedung Parlemen. Jika lebih banyak blusukan maka bisa lebih mendengar aspirasi masyarakat. sampai saat ini masih belum terlihat jelas gimana blusukannya

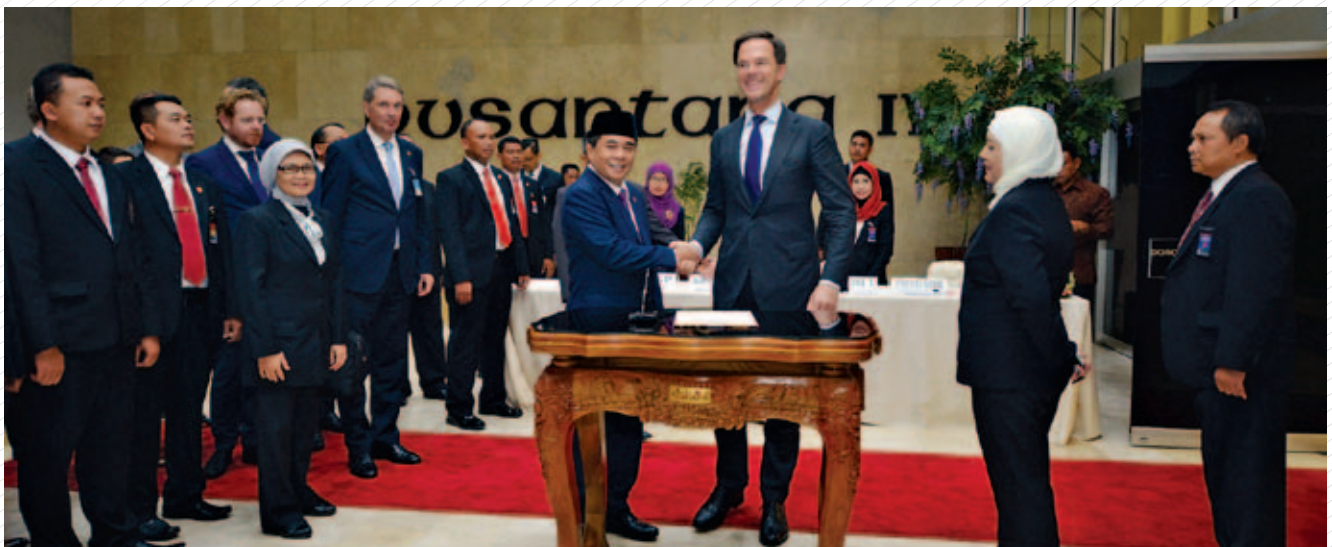
Terkait produksi Undang-Undang itu sudah bagus tapi bagi pelaksanaannya bisa lebih terbuka lagi. Apalagi untuk hal terkait peraturan pendidikan lebih ditingkatkan. Karena ada sejumlah permasalahan terkait UN itu. Mungkin ada masukan Anggota DPR RI kepada menteri. Supaya kita tidak bingung mengenai UN nantinya.

**Mita Indrayani**  
(Siswa SMA 1 Kediri, Tabanan, Bali)





*Pimpinan DPR RI didampingi sejumlah Anggota DPR RI menerima Perdana Menteri Belanda. Foto: Iwan, Jaka, Naefuroji, Andri/iw*





*Pelantikan Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Pelaksana Harian MA, disaksikan empat Wakil Ketua serta para Anggota DPR RI.  
Foto: Iwan Armanias, Jaka, Naefuroji, Andri /iw*





Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Taufik Kurniawan menerima kunjungan 100 siswa Sekolah Politik Kerakyatan. Foto: Iwan Armanias/iw





*Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto meninjau arus balik Lebaran 2016 Terminal Bus Terboyo dan Stasiun Poncol Semarang, Jateng. Foto: Anne/iw*





Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Anggota BKSAP DPR RI melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Tunisia dan Menteri Pertahanan Meksiko. Foto: Andri, Andi/iw



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon menerima Dubes Ukraina dan Dubes Kuba serta Kyai se Jawa di Gedung Parlemen. Foto: Andi/iw





*Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah mengunjungi korban gempa di Kabupaten Pidie, Aceh. Foto: Kresno/iw*





*Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Lapas di Bandung, Bengkulu, Manado, Palangkaraya dan Mapolda Bali. Foto: jk, ayu, tra, oji, rnm/iw*







*Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali, Jawa Tengah, Riau dan Kalimantan Utara. Foto: dep, iw, skr, sf, mp/iw*





*Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Bali, Sumatera Utara dan Papua. Foto: mh, iw, hr/iw*





*Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat. Foto: eno, jk, iw, dep/iw*





*Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. Foto: iw, ray, sc, rnm, sf/iw*





*Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Sulawesi Utara. Foto: jk, rnm, iw, sf, ray, rn /iw*



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

# Politisi Religius dan Sederhana

**Sosoknya tenang dan sederhana. Tuturnya juga lembut. Ketika Parlementaria menemuinya di tengah kesibukan, ia menyapa dengan ramah. Inilah pria Minang yang besar di Kota Bandung. Inas Nasrullah Zubir politisi Partai Hanura yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.**

**B**erdarah Minang, lahir di Jakarta, tapi besar di Bandung. Dua kota besar ini menyimpan kenangan berharga dalam hidup Inas. Ia senang berbagi cerita tentang masa kecilnya di Bandung. Kenangan membangun usaha mandiri juga jadi bagian kisahnya di masa muda. Inas mewarisi ayahnya sebagai usahawan dan pedagang yang mandiri.

## Masa Kecil di Bandung

Jakarta, awal 1960-an. Kota masih sepi dan belum seramai sekarang. Jalan-jalan juga relatif lengang, tak separah kemacetan kini. Sebuah keluarga Minang di Ibu Kota sedang tekun menjalani usaha rumah makannya. Adalah sepasang insan Zubir Zakaria pria asal Pariaman dan istrinya Nurma Yusuf dari Bukit Tinggi, tinggal di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat. Keduanya gigih menghidupi keluarga dengan berdagang.

Saat yang sama sang istri juga sedang mengandung anak kesembilannya. Hari persalinan pun tiba. Seketika tangis bayi

mungil memecah ketegangan di RS. St. Carolus, Salemba, Jakarta Pusat. Tahmid dan takbir tiada henti terucap sebagai tanda syukur. Hari itu, kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 23 September 1959. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu kemudian diberi nama Inas Nasrullah Zubir. Kehadiran Inas kecil sangat membahagiakan.

Setelah kelahiran Inas, masih ada dua adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Inas adalah anak kesembilan dari sebelas bersaudara. Inas kecil tumbuh di tengah keluarga religius dan pekerja keras. Ayah dan ibunya ketika itu masih membuka usaha rumah makan Padang di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Karena melihat persaingan usaha yang tidak kondusif lagi, akhirnya sang ayah memboyong keluarganya hijrah ke Bandung.

Hanya sekitar satu tahun Inas kecil tinggal di Jakarta. Di Kota Kembang itu, sang ayah kembali membuka usaha rumah makan. Di Bandung persaingan usaha rumah makan tidak seketat di Jakarta. Ayahnya kemudian membuka Rumah Makan "Hidangan Indonesia" di kawasan Jalan Tamblong No.36 Bandung. Inilah rumah makan Padang pertama yang berdiri di



foto: Rumi/iw

*Inas Nasrullah Zubir*

“Hidup di lingkungan berkultur Sunda, membuat Inas kecil lebih mengenal budaya dan bahasa Sunda daripada budaya dan bahasa Minang.”

Kota Bandung. Mending Presiden Soeharta dan Jenderal Nasution pernah singgah di rumah makan ini.

Sementara itu, Inas kecil terus tumbuh menjadi anak yang periang dan suka bermain. Hidup di lingkungan berkultur Sunda, membuat Inas kecil lebih mengenal budaya dan bahasa Sunda daripada budaya dan bahasa Minang. Bersama sahabat-sahabat kecilnya, Inas suka bermain galasin dan bola kasti. Permainan favorit lainnya adalah kelereng dan layang-layang. Senangnya mengingat masa kecil di Bandung.

Mengawali pendidikan formalnya, Inas kecil bersekolah di TK Kutilang di bilangan Jalan Sumatera, Bandung. Lalu, melanjutkan ke SD Merdeka V Bandung, tepatnya di Jalan Merdeka, dekat Hotel Panghegar. Jaraknya sekitar 2 km dari rumah. Ia dan para sahabat kecil selalu berjalan kaki ke sekolah. Pelajaran yang disukai adalah berhitung. Setamat SD tahun 1971, Inas kecil kembali tinggal di Jakarta dan melanjutkan ke SMPN 89 Jakarta.

Selama di SMP ini, Inas selalu menjadi juara kelas. Ia siswa yang cerdas dengan prestasi yang gemilang. Di Jakarta, Inas juga menyaksikan usaha ayahnya. Saat itu, ayahnya membuka usaha apotek di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Apotek itu bernama Apotek Tomang Tok yang buka 24 jam.

“Insting bisnis ayah saya hebat. Ketika itu belum ada apotek yang buka selama 24 jam. Di rumah sakit juga tidak ada. Itulah apotek pertama di Jakarta yang buka 24 jam penuh,” ungkap Inas. Usaha apotek ini juga maju pesat menyusul usaha rumah makan yang sudah lebih dulu maju.

Inas kecil masih ingat betul kegiatan usaha ayahnya. Maka ketika ditanya cita-citanya sedari



Inas Nasrullah Zubir

foto : Rumi/iw



**Cita-cita saya simpel saja, ingin jadi pedagang seperti bapak saya. Ya, jadi pengusaha, karena tidak tergantung waktu. Waktu sepenuhnya kita yang atur. Tidak juga dimarahi bos.**

kecil, ia menjawab, ingin menjadi pedagang seperti sang ayah. “Cita-cita saya simpel saja, ingin jadi pedagang seperti bapak saya. Ya, jadi pengusaha, karena tidak tergantung waktu. Waktu sepenuhnya kita yang atur. Tidak juga dimarahi bos,” kilahnya, tersenyum.

### **Kenangan Masa SMA**

Setamat SMP tahun 1974, Inas kembali hijrah ke Bandung. Dia melanjutkan sekolah di SMAN 3 Bandung. Inas menyukai pelajaran kimia dan matematika. Dua mata pelajaran itu selalu mendapat nilai tinggi. Namun di sisi lain, kenakalan masa remaja Inas mulai terlihat. Ada masa transisi kurikulum waktu itu, dari sistem lama ke sistem baru.

Di masa transisi itu banyak kekosongan waktu di sekolah. Akhirnya, dimanfaatkan Inas untuk banyak bermain. Dia sudah jarang masuk sekolah. Sempat tak naik kelas saat duduk di kelas II, karena kenakalannya. Inas tak pernah belajar selama ada perubahan

kurikulum tersebut. Ia juga sering dihukum gurunya. Orangtuanya juga kerap dipanggil ke sekolah, karena kenakalannya.

Ada kenangan menarik, memang, semasa SMA. Inas berkisah, ada guru agamanya bernama Ibu Johar. Di mata pelajaran agama, Inas mendapat nilai merah. Selain agama, nilai mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) juga merah. Karena dua mata pelajaran penting ini mendapat merah, Inas tak naik kelas. Ia sampai bermusuhan dengan Ibu Johar, sang guru agama itu.

Syahdan, Inas diminta menghadap Ibu Johar. Saat tiba di rumah gurunya, Inas diminta untuk datang pada hari-hari tertentu untuk belajar agama. “Tapi di sana saya tidak belajar agama. Malah saya diminta untuk membantu dia berkebun. Ada tanaman bunga bagus di belakang rumahnya. Saya mengurus tanamannya seminggu dua sampai tiga kali. Nah, setelah itu diajak diskusi masalah agama,” ungkap Inas mengisahkan kenangannya semasa SMA.

Inas lalu melanjutkan kisah pertemuannya dengan Ibu Johar. “Sebenarnya nilai agama kamu enggak jelek-jelek banget. Kelakuan kamu yang jelek,” tuturnya, mengutip pernyataan sang guru. Inas mengaku tak mampu menulis Arab. Saat ujian atau ulangan agama, malah kertas ujiannya digambar macam-macam. “Kadang gambar pemandangan, gambar orang, gambar mickey mouse. Guru saya tentu marah besar.”

Karena kelakuan Inas itulah, Ibu Johar memberi nilai 3 pada mata pelajaran agama. Ibunda Inas yang mengingatkannya untuk selalu menemui Ibu Johar untuk mengetahui kekurangannya. Dengan belajar merawat tanaman, sesungguhnya Inas sedang dilatih



**Ini yang saya tunggu. Kamu bisa mengeluarkan air mata . Selama ini, kamu berkepal batu, tak pernah mengeluarkan air mata. Ibu kamu juga bilang, kamu tidak pernah megeluarkan air mata. Setelah kamu mengeluarkan air mata, berarti saya bisa melepaskan kamu.**

kesabaran, konsentrasi, dan daya fokusnya oleh sang guru. Hampir setengah tahun, Inas selalu merawat tanaman dan diskusi agama dengan Ibu Johar.

Inas pun mulai mengerti apa yang diinginkan gurunya. Hatinya mulai luluh. Tak dinyana, air mata Inas berderai membasahi pipi saat berdialog dengan gurunya itu. “Ini yang saya tunggu. Kamu bisa mengeluarkan air mata . Selama ini, kamu berkepal batu, tak pernah mengeluarkan air mata. Ibu kamu juga bilang, kamu tidak pernah megeluarkan air mata. Setelah kamu mengeluarkan air mata, berarti saya bisa melepaskan kamu,” kenang Inas, mengingat ucapan terakhir sang guru dengan penuh haru.

### **Menjadi Politisi**

Setamat SMA tahun 1979, pemuda Inas melanjutkan studi ke Akademi Teknologi Nasional (ATENAS) Bandung. Ia mengambil jurusan teknik sipil. Selama kuliah, Inas juga membangun usaha kecil-kecilan bersama teman-temannya untuk mengisi waktu luang. Ia kerap mendapat proyek merangkai janur dan usaha sablon kaos. Lewat usaha mandiri itu, Inas mempelajari betul manajemen ekonomi untuk menambah ilmu dalam menjalankan usahanya.

Bersama teman-teman kuliah, Inas juga punya grup musik bernama Wingers yang sering manggung dari kampus ke kampus. Selepas mendapat gelar BE (Bachelor Engineering) atau sarjana muda bidang teknik, Inas muda mengawali karir profesionalnya sebagai *marketing executive* dan *senior marketing* di beberapa perusahaan di Bandung.

Memasuki tahun 1999, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Sipil Atenas ini, mulai memimpin





foto : dokpri/iw

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir bersama keluarga

perusahaan. Tercatat ia menjadi *Managing Director* PT. Wingerindo Githa Wardhana. Lalu, menjadi Komisaris Utama PT. Acarana Media Utama. Inas juga pernah menjadi Presiden Direktur PT. Spectra Samudra.

Pergaulannya yang luas mengantarnya pada dunia politik. Saat Pemilu 2014 lalu, Dewan Panasihat Kadin Banten ini, menjadi caleg Partai Hanura dari dapil Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan). Ia terpilih dan resmi menjadi Anggota DPR RI. Setelah resmi dilantik, Inas berkiprah di Komisi VII yang membidangi energi.

Setelah itu, mantan Ketua Granat Tangsel tersebut, dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi VI yang membidangi perdagangan, investasi, UKM, dan koperasi. Ketua DPP Partai Hanura ini terus berkiprah di jantung kebijakan dengan mengarsiteki berbagai UU



**Waktu masih hobi moge, saya selalu bawa anak-anak dan istri. Padahal, saat itu anak-anak masih berusia 3-4 tahun. Bahkan, saat istri hamil pun saya ajak touring ke luar kota. Saya di atas motor dan anak-anak beserta istri di mobil.**

dan kebijakan publik. Inilah kiprah pertamanya sebagai wakil rakyat di Senayan.

### **Bahagia Bersama Keluarga**

Kesibukannya sebagai wakil rakyat telah menyita waktu kebersamaannya dengan keluarga. Saat di rumah, mantan Ketua Umum Brata Bhayangkara Serpong tersebut tetaplah seorang ayah dan suami yang bersahaja. Di rumahnya ada Melda Sofanda Inas, istri tercinta yang dinikahinya pada tahun 1997. Melda adalah wanita berdarah Lampung.

Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai tiga buah hati tercinta, Gemilang Adhityatama, Gemintang Adhityatama, dan Gemerlang Adhityatama. Sesekali Inas juga suka mengajak keluarga berwisata. Kebetulan dulu ia suka *touring* dengan mengendarai moge. Istri dan anaknya dibawa berwisata ke Bali, Sumatera, dan Jawa.

“Waktu masih hobi moge, saya selalu bawa anak-anak dan istri. Padahal, saat itu anak-anak masih berusia 3-4 tahun. Bahkan, saat istri hamil pun saya ajak *touring* ke luar kota. Saya di atas motor dan anak-anak beserta istri di mobil,” ujar penggemar mie bakso ini, menceritakan pengalaman berwisatanya bersama keluarga.

Inas juga sangat suka menyeruput kopi dan teh. Namun, ia menyarankan agar penikmat kopi dan teh yang sebaya dengannya menggunakan madu sebagai pemanis. Itu lebih menyehatkan. Kini, mantan Ketua ARDIN Tangsel ini punya hobi *ngegym*. Kesukaannya pada lagu-lagu juga tak ketinggalan.

Sejak mahasiswa lalu, peraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Adhy Niaga ini, suka pada lirik lagu *Cotton Field*. Dan penyanyi favoritnya adalah Bon Jovi. ■

(mh)



Foto: Nita/iw

Perwakilan delegasi dari sejumlah negara foto bersama pada Sidang Pleno ke-9 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Siem Reap, Kamboja

## Sidang APA Kamboja

# Delegasi Indonesia Perjuangkan Perlindungan *Migrant Workers*

Parlemen Indonesia, baru-baru ini menghadiri Sidang Pleno ke-9 Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung tanggal 28 November - 1 Desember 2016 di Siem Reap, Kamboja. Sidang mengambil tema “Promoting Peace And Sustainable Development In Asia” dan dihadiri oleh 25 parlemen dari 43 negara anggota.

Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP, Dave Akbarshah Fikarno, Sartono, dan M. Arief Suditomo membawa sejumlah isu yang akan dibahas dalam forum tersebut, salah satu isu yang patut diperjuangkan oleh Delegasi Parlemen Indonesia adalah persoalan *Migrant Workers*.

Wakil Ketua BKSAP yang juga Pimpinan Delegasi DPR RI Juliari P Batubara disela-sela Sidang APA ke-9 di Siem Reap, Kamboja mengatakan, ada sejumlah resolusi yang akan disepakati di APA Plenary Session kali ini. Diantaranya adalah, resolusi yang sangat penting mengenai perlindungan terhadap *migrant workers*.

“Menegenai *migrant workers*, dimana negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain sangat

berkeberatan mengikuti konvensi yang ada di ILO. Tapi kita tetap mendesak, karena hal tersebut merupakan kesepakatan dari negara-negara ILO, mereka harus tetap mengikuti,” katanya Kamis, (1/12/2016)

Namun meski mereka tidak tergabung dalam ILO lanjut Ari, sapaan akrab Juliari, memang menjadi masalah. “Kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk memaksa mereka mengikuti, tetapi memang itu kan kedaulatan masing masing negara juga, bahwa kalau memang dia tidak mengikuti atau meratifikasi ILO memang tidak punya kewajiban untuk mengikuti. Tetapi mungkin kita bisa siasati dengan perundingan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan *migrant workers* dari Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya, pada Senin (28/11/2016) Delegasi Dewan

Perwakilan Rakyat RI dalam Sidang APA di sesi *Executive Council Meeting* meminta serta memperjuangkan agar Sidang APA tetap membahas mengenai buruh migran untuk dimasukkan kedalam agenda rapat. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari beberapa negara di kawasan teluk untuk mendrop pembahasan mengenai hal itu.



Dave Akbarshah Fikarno

Anggota delegasi DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam rapat menyampaikan, Indonesia mendukung mekanisme yang disarankan oleh Presiden APA untuk membahas mengenai buruh migran atau *migrant worker* secara khusus di sidang komisi.

Ditemui usai rapat kepada Parleментарia Dave menilai bahwa beberapa negara di kawasan teluk terlihat sekali agar tidak ada pembahasan mengenai *migrant worker*, karena, jelas Dave, memang mereka tidak menginginkan adanya perlindungan berlebihan terhadap para buruh migran itu.

“Nah ini kan ada banyak juga warga negara kita yang menjadi buruh disana, mereka adalah pahlawan pahlawan devisa, jadi kepastian hidup, keamanan hidup, pendidikan, kesehatan mereka juga keluarga yang sudah banyak bermigrasi secara penuh. Nah kita harus pastikan mereka benar-benar terpenuhi hak-hak azasi nya, gajinya, kesehatannya, dipastikan pendidikan anak-anak mereka semua itu harus benar-benar dijamin oleh *house country*. Jadi jangan mereka itu (pekerja migran-red) istilahnya hanya

diundang kesana untuk diperas tenaga dan pikirannya, lalu setelah mereka sudah selesai bila sakit terus dibuang, anak-anaknya tidak diurusin,” tegas Dave di Siem Reap.

Ia menambahkan, jangan demi kepentingan mereka (negara penerima pekerja-red) hanya ingin memakai tenaga nya dan begitu selesai dikembalikan lalu diganti dengan yang baru. “Nah ini yang harus kita perjuangkan,” lugasnya.

Lalu, pada Selasa (29/11/2016) dalam *Standing Committee Meeting on Social and Cultural Affairs*, mengagendakan penyusunan *draft resolution on protection and promotion of the rights of migrant workers in Asia*.

Anggota Delegasi Parlemen RI yang diwakili oleh Arief Suditomo dan

bagi delegasi Indonesia merupakan sebuah definisi yang tidak pas dengan kepentingan nasional kita,” kata Arief.

Arief mencontohkan, banyak sekali buruh migran Indonesia yang tadinya *legal documented* itu akhirnya menjadi ilegal atau *undocumented* karena satu dan lain hal, bisa karena disiksa, punya masalah, karena satu dan lain hal terjadi antara mereka dan majikannya.

“Nah kepada mereka, kita sama sekali tidak boleh mengenyampingkan. Mereka adalah situasi riil dilapangan, mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya juga tidak ingin menjadi warga negara lain, mereka hanya ingin mencari kerja, jadi kalau kita menggunakan definisi dari delegasi Bahrain, Saudi Arabia



Foto: Nita/iw

Anggota Delegasi Parlemen RI yang diwakili Arief Suditomo dan Sartono berdebat dengan Delegasi Parlemen Bahrain, Saudi Arabia dan Rusia.

Sartono berdebat dengan Delegasi Parlemen Bahrain, Saudi Arabia dan Rusia terkait definisi *migrant workers* yang mereka usulkan.

“Salah satu yang mengemuka pada sidang hari ini delegasi dari Bahrain, Saudi Arabia, dan Rusia sama-sama menyatakan bahwa definisi dari buruh migran itu dibatasi berdasarkan kepentingan mereka (buruh migran-red). Yakni hanya orang-orang yang pada dasarnya menjadi buruh migran yang *documented* dan buruh migran yang akan menjadi warga negara. Itu merupakan salah satu definisi yang

yang juga didukung oleh Rusia, saya pikir itu salah satu hal dimana kita akan mengenyampingkan apa yang menjadi cerita dari orang-orang kita yang menjadi buruh migran di negara-negara lain, dan sudah menjadi kewajiban untuk kita bela kepentingan mereka,” tegas Arief.

Ia menambahkan, situasi hari ini adalah bagaimana kita harus mengemukakan apa yang menjadi posisi dari Indonesia, khususnya kepentingan nasional dalam hal membela hak-hak dari buruh migran dalam hal perlindungan.

Arief melanjutkan, bagi Indonesia, jika tidak ada titik temu lebih baik mengambil jalan *deadlock* untuk tidak disetujui sebagai draf resolusi, dibanding Indonesia menyetujui tetapi itu tidak memberikan perlindungan terhadap buruh migran kita.

Arief pun menambahkan atas hal ini rencananya delegasi Indonesia akan melakukan rapat trilateral ditengahi oleh Pakistan, untuk coba *refresh* atau mencari definisi baru atas usulan yang disampaikan oleh delegasi Bahrain dan Saudi Arabia.

Dan, lanjutnya, yang Indonesia inginkan adalah APA mengakui bahwa perlindungan terhadap buruh migran baik yang legal maupun ilegal itu tetap harus dilakukan. “Kita harus berjuang untuk memperhatikan hak-hak buruh migran Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya dalam sidang komite, delegasi Bahrain, Saudi Arabia menyatakan definisi *migrant workers* itu hanyalah orang-orang yang mencari kewarganegaraan di suatu negara.

Selain berbicara mengenai *Migrant Workers*, Delegasi Indonesia melalui anggota delegasinya yakni Sartono (F-PD) pun menyampaikan pandangan mengenai pembentukan Parlemen Asia, Delegasi Parlemen DPR RI menyambut baik usulan pembentukan Parlemen Asia, namun transformasi APA ke Parlemen Asia harus diteliti dengan seksama serta diprakarsai oleh penguatan organisasi dalam hal kontribusinya untuk menyelesaikan

isu-isu global melalui jalur diplomatik.

“Kita harus mengakui bahwa pembentukan Parlemen Asia merupakan upaya jangka panjang. Disini kami mendorong sekretariat nasional APA guna memperkuat kemitraan dan jaringan yang akan memungkinkan pertukaran informasi mengenai hasil parlemen di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, dalam sebuah karya transparan, adil dan produktif,” kata Sartono dihadapan 25 delegasi parlemen di kawasan Asia.

Pimpinan Delegasi Parlemen Indonesia Juliari P Batubara



**Yang Indonesia inginkan adalah APA mengakui bahwa perlindungan terhadap buruh migran baik yang legal maupun ilegal itu tetap harus dilakukan. Kita harus berjuang untuk memperhatikan hak-hak buruh migran Indonesia.**

menyampaikan, bahwa sebenarnya pembentukan parlemen Asia belum disepakati dalam Plenary Session di Sidang APA ke-9. “Pembentukan Parlemen Asia ini kan belum disepakati di Plenary Session sekarang dan akan dibahas pada tahun 2017 di Abu Dhabi, UEA. Untuk Indonesia sendiri, sebenarnya kita belum melihat satu *budget proposal*,” kata Juliari di sela-sela rapat pembahasan resolusi Siem Reap.

Menurut Juliari, Indonesia belum melihat detailnya seperti apa Asian Parlemen itu, “Memang tidak mudah, karena beda dengan *european* parlemen, tidak mengikat masalahnya, jadi kita juga harus lebih kritis terhadap inisiasi-inisiasi dari negara-negara lain. Artinya membentuk ini, membentuk itu dan juga harus melihat keuntungan buat kita apa,” ujarnya.

Lalu dalam sesi *General Debate* di Sidang Pleno ke-9 *Asian Parliamentary Assembly* (APA) delegasi DPR RI berkesempatan menyampaikan beberapa pandangannya terkait dengan sejumlah isu di kawasan Asia.

Paparan itu di sampaikan oleh Anggota Delegasi DPR RI Dave Akbarshah Fikarno. Salah satu isu yang disampaikan adalah tentang radikalisme dan terorisme. Indonesia menilai pada saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang kebal dari aksi terorisme dan radikalisme.

“Asia dan Pacific secara kolektif perlu berupaya untuk mengatasi radikalisme dan terorisme baik didalam



Foto: Nita/iw

Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP, Dave Akbarshah Fikarno, Sartono, dan M. Arief Suditomo pada Sidang Pleno ke-9 *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Siem Reap, Kamboja



Foto: Nita/iw

Delegasi Parlemen Republik Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Iran.

negeri maupun tingkat regional. Kunci untuk menjaga kedamaian itu adalah hubungan yang baik diantara kita melalui dialog yang konstruktif, mendorong pluralisme, dan saling menghormati terhadap integritas teritorial serta kedaulatannya,” kata Dave.

Dave pun berharap melalui Sidang APA ini dirinya yakin dengan adanya persatuan di kawasan Asia, dapat secara efektif dalam menghadapi rintangan, dengan saling memperkuat dalam menjaga perdamaian dan stabilitas politik di kawasan ini. “Saya yakin, kerjasama ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berarti seperti yang diharapkan,” tutupnya.

Disela-sela sidang APA ke-9 di Siem Reap, Kamboja, Delegasi Parlemen Republik Indonesia melalui Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Islam Iram Fatima Zolghadr selaku Ketua Parlemen.

“Iran mengapresiasi Indonesia bahwa disetiap forum pertemuan internasional, atas beberapa resolusi-resolusi yang menurut Iran memberatkan Iran, dan kita (Indonesia-red) *againts* daripada resolusi-resolusi tersebut, dan tentunya Iran berkepentingan juga untuk bekerjasama dengan Indonesia karena dua negara yang mayoritas

penduduknya muslim dan juga negara yang sama-sama memiliki demokrasi yang bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa demokrasi juga bisa diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya Islam,” terang Juliari kepada Parlementaria.

DPR RI sendiri menurut Juliari, memandang Republik Islam Iran punya posisi yang sangat strategis dimana mereka juga merupakan negara besar dibagian timur dari Asia dan negara yang mempunyai

sejarah panjang dengan Indonesia. Usai pertemuan, Delegasi DPR RI memberikan cenderamata berupa Wayang Golek kepada delegasi Iran.

Sidang Pleno *Asian Parliamentary Assembly* (APA) ke-9 pada Kamis (1/12/2016) di Provinsi Siem Reap, Kamboja, hasilkan Deklarasi Siem Reap yang berisi 19 resolusi tentang isu-isu politik, sosial ekonomi, dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Dan sidang APA pun secara resmi ditutup. ■

(nt)



Foto: Nita/iw

Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, mewakili delegasi Parlemen Indonesia memberikan cenderamata berupa wayang golek kepada delegasi Parlemen Iran, Iram Fatima Zolghadr.

# Komisi Surga dan Neraka

**B**eragam istilah sering muncul dalam rapat Komisi-komisi DPR RI. Kalau istilah komisi basah dan komisi kering sudah banyak disebut, seperti komisi basah karena membidangi keuangan dan perbankan. Atau komisi yang berpasangan kerja dengan kementerian infrastruktur dengan anggaran ratusan triliun. Sedangkan komisi yang dinilai kering lantaran pasangan kerjanya bidang hukum, sosial atau bidang keamanan.

Ada lagi istilah Komisi dunia akhirat yaitu Komisi VIII DPR RI. Komisi ini mempunyai mitra kerja antara lain dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menyebut bahwa Komisinya layak disebut Komisi dunia akhirat. Pasalnya Komisi VIII ikut mengurus orang dari lahir hingga meninggal. “Bahkan Komisi VIII bisa dikatakan paling elit di DPR RI,” tukasnya.

Namun dalam acara Kunspek Tim Panja Pendidikan Islam (Pendis) Komisi VIII ke Provinsi Sulsel belum lama ini, anggota Tim Itet Trijayati Sumarjanto (Fraksi PDI

Perjuangan), melontarkan istilah tambahan bagi Komisi VIII. “Banyak yang menyebut Komisi VIII adalah Komisi dunia-akhirat, kalau saya menyebut Komisi VIII adalah Komisi Surga dan Neraka,” ujarnya dengan setengah bercanda sambil menambahkan, kalau ada pejabat yang lurus-lurus akan masuk surga, tetapi kalau yang menyimpang akan masuk ke neraka.

Mengomentari demo besar 411 lalu, Iskan yang baru saja mengikuti diskusi di London menyatakan bahwa sekarang trend global sedang sakit. Secara global negara dan secara organisasi semuanya ingin berantem. Makanya peran Komisi VIII sangat penting untuk membangun soliditas bangsa.

“Coba bayangkan. Demo 411 tidak ada yang biayai, tiba-tiba kumpul 2 juta orang di Jakarta. Trend ini terjadi setiap 20 tahun dan masyarakat bergejolak. Komisi VIII sudah mengingatkan Menag agar responsif sebelum terjadi, karena kurang diperhatikan akhirnya semuanya jadi kaget,” tandas politisi PKS ini sembari menambahkan, kesadaran politik masyarakat sekarang sangat tinggi karena itu pemerintah harus responsif. ■

(mp)



Foto: Mastur/iw

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan



PIMPINAN DPR RI, ANGGOTA DPR RI  
DAN KELUARGA BESAR  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI SERTA  
BADAN KEAHLIAN DPR RI



Mengucapkan

*Selamat Hari Natal*  
dan  
*Tahun Baru 2017*



# Bung PARLE

DI TAHUN KETIGA INI  
KIPRAH DPR CUKUP DINAMIS  
BANYAK KEBERHASILAN YANG  
DICAPAI.  
DPR-RI DI TAHUN INI  
MEMANG MENCANANGKAN  
PERBAIKAN KINERJA

2017  
AKAN SEGERA  
DATANG TANPA TERASA  
INI TAHUN KE TIGA  
PENGABDIAN DPR  
PRIODE 2014-2019  
YA BUNG ...

IYA...  
SALAH SATUNYA  
DENGAN MENGURANGI  
MASA RESES ANGGOTA  
DPR DEMI MEMAKSIMAL  
KAN KENERJA  
DEWAN...

DALAM  
RAPAT PARIPURNA  
DPR MENARGETKAN  
40 RUU TERCAPAI  
DITAHUN INI...  
KEBERHASILAN LAIN  
DPR MELALUI PANJA  
BERHASIL  
MENURUNKAN  
ONGKOS  
NAIK HAJI...

TERKAIT FUNGSI  
PENGAWASAN PUN TELAH  
MEMBERIKAN PERSETUJUAN  
DAN PERTIMBANGAN TERBAIK  
ATAS USULAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PUBLIK...  
SALAH SATUNYA  
PIMPINAN KPK  
DAN KAPOLRI...

SATU LAGI...  
DPR JUGA MENARUH  
PERHATIAN CUKUP BESAR  
KEPADA PERS LHO... BUKTINYA  
MEDIA CENTER DPR SEKARANG  
TAK KALAH DENGAN LEMBAGA  
NEGARA LAIN...

BETUL... BETUL...  
JEMPOL DEH BUAT DPR,  
OPTIMIS... DI HARI-HARI  
KE DEPAN PAK SETYA NOVANTO  
BISA MEWUJUDKAN DPR  
YANG MODERN, MAJU DAN  
DEKAT DENGAN RAKYAT,  
SEMOGA !!